

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Pernikahan merupakan ibadah dua dimensi, yakni dimensi ritual dan dimensi sosial. Secara ritual pernikahan itu sah apabila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan fiqih ritual yakni memenuhi syarat dan rukun pernikahan. Sedangkan secara sosial, pernikahan baru dapat pengakuan masyarakat manakala telah diadakan *Walimatul 'urs* (bukan *'ursi* atau *'arus*), yaitu peresmian pernikahan yang tujuan untuk memberitahukan khalayak ramai bahwa kedua pengantin telah resmi menjadi suami isteri sekaligus rasa syukur sebagai ekspresi rasa syukur keluarga kedua belah pihak atas berlangsungnya pernikahan tersebut.¹

Sudah menjadi kodrat alam, bahwa dua manusia dengan jenis kelamin yang berlainan yaitu seorang perempuan dan seorang laki-laki, diantara keduanya ada daya saling menarik satu sama lain untuk hidup bersama dalam ikatan perkawinan sebagai salah satu tujuan yaitu meneruskan keturunan.²

Salah satu bentuk keuniversalan Islam adalah pengaturan mengenai masalah perkawinan untuk dijalinnya hubungan mengenai pria dan wanita, sehingga berakhirlah kerisauan hati pria dan wanita menjadi ketenteraman.³ Perkawinan bukanlah hidup bergaul semata, tetapi juga untuk menyatukan diri dalam segala bidang, hingga terpadu dua badan menjadi satu jiwa dan akan

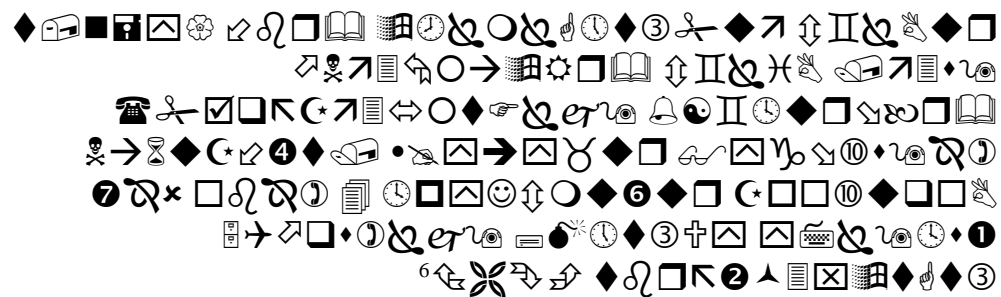
¹Ahmad Zahro, *Fiqih Kontemporer*, Jombang: Qaf Media Kreatifa, 2016, h. 194-195.

²Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung, 1960, h.7.

³M. Qura isy Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1997, Cet. XV, h.192.

terpelihara kehormatannya di masyarakat.⁴ Perkawinan juga bisa diartikan mengandung arti kasih sayang, pemenuhan hubungan seksual, rela berkorban dan saling mencintai antara suami isteri. Karenanya, dalam melaksanakannya harus sesuai dengan aturan agama Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵

Dengan memahami arti dan maksud perkawinan tersebut maka diharapkan suami isteri dapat menjadi keluarga yang diidamkan Islam, yaitu keluarga yang sakinah. Sebagaimana firman Allah swt. pada surah Ar Rum ayat 21 :



Artinya: Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.⁷

Para ulama tafsir memberikan penjelasan mengenai makna “*litaskunu*”

⁴H.S.A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, terj. Agus Salim, Jakarta: Pustaka Amani, 1989, Cet. 3, h. 15.

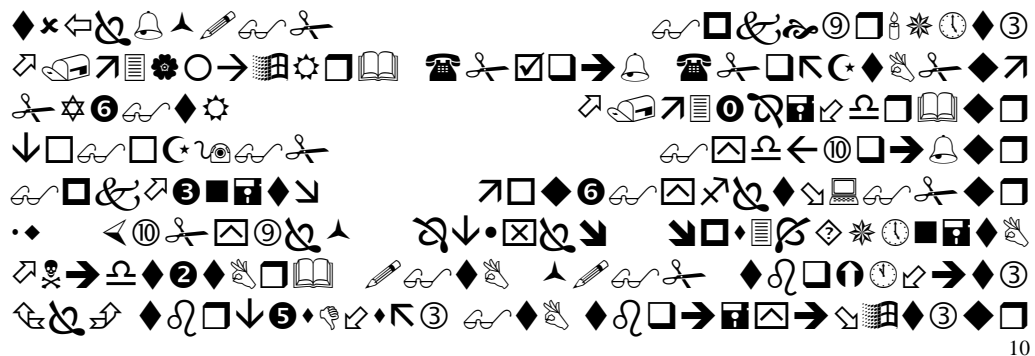
⁵Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia, Berlaku Bagi Umat Islam*, Jakarta: UI Press, 1986, h. 12.

⁶Ar-Rum (30) : 21

⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Sinergi Pusaka Indonesia, 2012, h. 572.

adalah bertujuan untuk membentuk keluarga yang damai, saling mencintai dan tenteram berbahagia,⁸ dengan kata lain keluarga sakinah, yang berdampak pada terbentuknya pondasi keluarga yang kuat, dan tidak gampang terjadi perceraian. Kata “*sakinah*” sendiri adalah berasal dari bahasa Arab, yang berarti: tenang, terhormat, aman, penuh kasih sayang, mantap dan memperoleh pembelaan”.⁹

Keluarga sakinah merupakan subsistem dari sistem sosial, yang menurut Al-Qur'an bukan bangunan di atas tanah kosong. Tetapi bagaimana membangun keluarga yang Islami dengan memerlukan kerja keras dari seluruh anggota keluarga, yang dikomandani oleh suami dan isteri sebagai pemimpin didalam rumah tangga. Karenanya, pembentukan keluarga sakinah pada dasarnya merupakan implementasi dari firman Allah dalam surah At Tahrim ayat 6:



10

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak durhaka

⁸Ibnu Katsier, *Tafsir Ibnu Katsier*, terj. Salim Bahreisy dan Said Bahriesy, Surabaya: Bina Ilmu, 1996, Jilid 3, h. 77.

⁹A.W. Munawwir, Al Munawwir: *Kamus Arab Indonesia*, tashih Ali Ma'shum dan Zainal Abidin Munawwir, Surabaya: Pustaka Progressif, 2002, Cet. 25, h. 646.

¹⁰At Tahrim [66]:6.

kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.¹¹

Memahami ayat tersebut di atas, yang dikehendaki dari keluarga sakinah adalah bagaimana strategi pembinaan keluarga sejak awal (sebelum) pernikahan, pendidikan yang Islami dalam sebuah keluarga dan diselaraskan dengan fungsi manusia untuk beramal di dunia dan akhirat.¹² Dengan demikian diharapkan pasangan yang akan menikah kelak akan dapat membentuk keluarga sakinah pula, keluarga akan mendapatkan ketenangan dan ketenteraman. Paling utama diantara pembentukan keluarga adalah bagaimana menghindarkan terjadinya perceraian.

Setiap individu muslim yang menikah tentunya pasti berkeinginan untuk mewujudkan keluarga sakinah, terhindar dari konflik rumah tangga dan tidak ingin bercerai. Untuk itu mereka rela melakukan apa saja agar keinginan itu bisa terwujud. Permasalahannya sekarang adalah, dalam mewujudkan keluarga yang kokoh, terhindar dari konflik dan perceraian tersebut bukanlah perkara mudah. Karena terbukti banyak permasalahan yang timbul dan mengganggu bahtera rumah tangga yang akhirnya menghambat cita-cita keluarga tersebut. Diperlukan pula langkah-langkah *preventif* atau sebuah tindakan yang diambil untuk mengurangi atau menghilangkan kemungkinan terjadinya suatu kejadian yang diinginkan masa depan, kemudian langkah *selektif* atau penyaringan dan *antisipatif* atau bersikap tanggap atas sesuatu

¹¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Sinergi Pusaka Indonesia, 2012, h. 820

¹²Armai Arief, *Reformulasi Pendidikan Islam*, Jakarta: CRSD-Ciputat Press, 2007, Cet. II, h.18

yang akan terjadi dari setiap individu muslim yang berkeinginan untuk mewujudkan keluarga sakinah.

Setelah pernikahan dilakukan, penting bagi pasangan suami isteri untuk menata kehidupan keluarganya agar ada keserasian dengan baik, termasuk sifat, sikap dan tingkah laku. Sebab, setinggi apapun pendidikan seseorang, setinggi apapun jabatan seseorang dan setinggi apapun pangkat seseorang, maka selama menjalani kehidupan berumah tangga pasti ada permasalahan yang dihadapi.

Bila keserasian itu sudah tidak tercapai lagi dan sudah tidak dapat lagi menyatukan dua watak yang berbeda, berbagai macam permasalahan kemudian timbul, baik yang berkenaan dengan permasalahan keluarga, perilaku masing-masing yang tidak dapat diperbaiki dan hubungan seksual tidak berjalan semestinya, maupun kebutuhan ekonomi hidup sehari-hari tidak terpenuhi, karena itu tidak ada lagi kemaslahatan dalam perkawinan. Karena itu, talak merupakan alternatif terbaik untuk melepaskan ikatan perkawinan.¹³

Keberadaan keluarga yang sakinah serta menghindarkan terjadinya perceraian khususnya perceraian dini maka sangat relevan dengan penasehatan calon pengantin, pembinaan keluarga sakinah dan memediasi keluarga yang bermasalah. Disinilah keberadaan Kantor Urusan Agama atau sering disebut KUA, apalagi KUA yang berada di wilayah Kabupaten Katingan, tentunya memiliki peran yang sangat urgen dalam strategi pencegahan perceraian dini.

¹³Abu Abdillah Muhammad bin Abdul Rahman al-Bukhari, *Keagungan dan Keindahan Syari'at Islam*, terjemah Rosihan Anwar, Bandung: Pustaka Setia, 1999, h. 104.

Berdasarkan hasil survey lapangan dan fakta yang terungkap bahwa dari tiga KUA di Kabupaten Katingan, yaitu KUA Kecamatan Katingan Kuala (Pegatan), KUA Kecamatan Katingan Hilir (Kasongan) dan Kecamatan Katingan Tengah (Tumbang Samba) menunjukkan bahwa dalam setiap tahunnya selalu ada laporan, pengaduan dan sengketa dalam rumah tangga yang tergolong baru pernikahannya, setelah akad nikah ada yang 0-12 bulan, 1-2 tahun dan 2-3 tahun menjalin rumah tangga kemudian terjadinya perceraian yang penulis sebut perceraian dini. Bahkan ada pula pihak pengadu dan keluarganya yang bersikeras agar pernikahan dihentikan dan justeru kemudian menanyakan prosedur perceraian secara resmi.

Pencegahan perceraian dini, konflik keluarga dan mewujudkan pondasi keluarga yang kuat, Kementerian Agama melalui Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah berusaha mengembangkan program-program yang bersentuhan langsung dengan pembinaan keluarga yang kuat, seperti melakukan pembekalan calon pengantin melalui penghulu yang ada di KUA, melalui Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4). Hal ini ditandai dengan penguatan peran KUA dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, terutama melakukan kegiatan penasehatan calon pengantin, pembinaan keluarga sakinah, atau sosialisasi Undang Undang Perkawinan, dan kegiatan lainnya yang relevan dengan pembinaan keluarga muslim.

Dalam strategi meningkatkan dan mewujudkan peran KUA dalam pencegahan perceraian dini tersebut maka melalui subdit pemberdayaan KUA

pada Kementerian Agama Pusat, kemudian melalui seksi pemberdayaan KUA pada Bidang Urusan Agama Islam (URAIIS) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian Seksi Bimas Islam (sebelumnya Urais) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Katingan dan seluruh KUA di Kabupaten Katingan maka program pembinaan keluarga menjadi salah satu program yang harus dilaksanakan setiap waktu dan kesempatan, selain program pencatatan nikah.¹⁴

KUA di wilayah Kabupaten Katingan sebagai ujung tombak dalam kegiatan program pencegahan perceraian dini harus berupaya secara sungguh-sungguh dan terus menerus untuk memberikan pembekalan dan pembinaan bagi calon pengantin serta juga mewujudkan, mengembangkan dan memelihara potensi dan kualitas keluarga dalam kehidupan spritual dan material yang seimbang berlandaskan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, dan akhlak mulia serta terhindar dari perceraian. Oleh karena itu KUA di wilayah kabupaten Katingan harus mampu melakukan pembekalan dan pembinaan calon pengantin secara kontinew agar mempunyai bekal atau modal dalam mengarungi rumah tangga ke depan, terutama bagaimana memahami prinsip dasar pernikahan dalam Islam, dan dapat menjadi keluarga yang kuat.

Memperhatikan urgennya peran KUA di wilayah kabupaten Katingan tersebut, jika dikaitkan dengan upaya optimalisasi visi dan misi, tugas dan fungsinya sebagai aparat Kementerian Agama tentang bagaimana peningkatan

¹⁴Lihat Peraturan Dirjen Bimas Islam, Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

pemahaman hidup berkeluarga dan pengamalan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan *akhlak al karimah* dalam berkeluarga dan bermasyarakat, maka KUA di wilayah kabupaten Katingan sebagai Kantor Kementerian Agama di tingkat kecamatan, melalui aparatnya harus memberikan pembinaan bagaimana pendidikan agama dalam keluarga, pendidikan agama di masyarakat, peningkatan pendidikan agama melalui lembaga pendidikan formal, mengoptimalkan kursus calon pengantin, melayani konseling keluarga, dan melakukan pembinaan remaja usia nikah. Tujuannya adalah agar menghindarkan keluarga dari perceraian. Sebab, di wilayah kabupaten Katingan memang banyak terjadi kasus perceraian dini yang diajukan ke Pengadilan Agama, baik perkara cerai talak maupun cerai gugat.

Mengenai strategi apa saja yang mesti dilakukan KUA di wilayah kabupaten Katingan dalam pencegahan perceraian dini di masyarakat, maka pemerintah melalui Kementerian Agama berinisiatif melaksanakan program kursus calon pengantin atau penasehatan nikah di KUA. Melalui program ini diharapkan mampu untuk meningkatkan kualitas keluarga.

Melalui peraturan Dirjen Bimas Islam nomor DJ.II/491 tahun 2009 tentang kursus calon pengantin. Peraturan tersebut mengamatkan bahwa pengetahuan tentang perkawinan haruslah diberitahukan sedini mungkin, sejak sebelum berlangsungnya perkawinan, yaitu melalui kursus calon pengantin. Program ini dimasukkan kedalam salah satu proses dan prosedur perkawinan yang diikuti oleh calon pengantin yang akan menikah. Materinya meliputi tujuh aspek, yaitu tata cara dan prosedur perkawinan, pengetahuan agama,

peraturan perundang-undangan dibidang perkawinan dan keluarga, kesehatan dan reproduksi, manajemen keluarga, psikologi perkawinan dan keluarga, serta hak dan kewajiban suami isteri. Kegiatan kursus calon pengantin atau penasehatan calon pengantin menjadi urgen sekali adalah memahami alasan terjadinya perceraian dini di kabupaten Katingan dan bagaimana strategi Kantor Urusan Agama dalam pencegahan perceraian dini.

Strategi pencegahan perceraian dini di kabupaten Katingan dapat pula dilakukan dengan usaha peningkatan penanaman nilai-nilai keagamaan, ketaqwaan dan *akhlak al karimah* dalam bermasyarakat. Pendidikan ini sebagai usaha penanaman nilai-nilai keagamaan di masyarakat. Sebab, pendidikan tidak hanya diperoleh dari dalam rumah atau dikeluarga saja, tetapi harus dilengkapi dengan usaha memperluasnya dengan menghadiri berbagai tempat pengajian, majelis taklim, ceramah agama dan kegiatan keagamaan lainnya. Dengan pendidikan agama di masyarakat ini setiap anggota keluarga akan memperoleh pendidikan yang lebih optimal, berkembangnya keluhuran akhlak dan moral masyarakat. Artinya, sebuah keluarga dibina agar menjadi insan-insan agamis yang di fokuskan pada penanaman, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan *akhlak al karimah* Keluarga yang baik tentunya juga memperhatikan kearah mana pendidikan anggota keluarganya, sebab kalau salah langkah maka akan membuat keluarga bersangkutan sulit mencapai keluarga yang kuat dan terhindar dari perceraian dini.

Menyimak strategi Kantor Urusan Agama dalam strategi pencegahan perceraian dini di kabupaten Katingan, sebenarnya pemahaman berkeluarga

dan keagamaan yang diberikan melalui program pra nikah, program pasca nikah, program konsultasi hukum perkawinan, program sosialisasi dalam usaha pencegahan perceraian, program keluarga sakinah, dan program penyediaan buku-buku dan brosur-brosur adalah sudah merupakan usaha optimal yang telah dilakukan.

Beranjak dari permasalahan tersebut, maka penulis beralasan sangat penting kiranya untuk mengangkat permasalahan ini yang di tuangkan dalam suatu penelitian ilmiah. Dari penelitian lapangan yang dilakukan, hasilnya kemudian dituangkan dalam sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk tesis dengan judul: **Strategi Pencegahan Perceraian Dini Pada Kantor Urusan Agama Se Kabupaten Katingan**

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa terjadi perceraian dini di kabupaten Katingan ?
2. Bagaimana strategi pencegahan perceraian dini Kantor Urusan Agama di kabupaten Katingan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok masalah di atas penelitian bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis.

1. Sebab terjadinya perceraian dini di kabupaten Katingan.
2. Strategi strategi pencegahan perceraian dini Kantor Urusan Agama di kabupaten Katingan.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat berguna atau bermanfaat, baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara Teoritis

Temuan dalam penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap pemikiran hukum Islam terutama permasalahan pernikahan. Sebab, terkadang menimbulkan problematika dalam kehidupan berumah tangga, dan ada kalanya berakhir melalui perceraian. Oleh karena itu diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam pembinaan keluarga muslim dalam mencegah terjadinya perceraian dini.

2. Secara Praktis

Kajian yang dilakukan ini, secara praktis diharapkan bermanfaat untuk kepentingan:

Pertama, bagi Kementerian Agama dan jajarannya, dan semua elemennya, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan untuk bahan referensi bagaimana strategi yang dilakukan melakukan kegiatan pernikah terutama dari segi preventif untuk mencegah perceraian khususnya perceraian dini dengan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang urgennya pernikahan melalui berbagai cara, seperti penasehatan calon pengantin, pembinaan keluarga sakinah dan sosialisasi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kedua, bagi masyarakat muslim agar hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan dan bahan pemikiran untuk memberikan perhatian intensif terhadap calon pengantin yang akan menikah dan pembinaannya, sehingga dapat menjadi bahan untuk memperkuat keluarga muslim dan pembinaan keluarga sakinah.

Ketiga, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran terhadap IAIN Palangka Raya, khusus pada Program Pascasarjana dengan Konsentrasi Hukum Keluarga Islam dan bagi siapa saja yang berkeinginan untuk mengadakan penelitian lebih jauh mengenai masalah seperti ini, namun dari aspek yang berbeda.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Perceraian

Perceraian berasal dari kata cerai, yang berarti pisah dan talak, kata cerai berarti berpisah, sedang kata talak artinya sama dengan cerai. Kata mentalak berarti menceraikan.¹⁵ Talak menurut bahasa Arab adalah “melepaskan ikatan” yang dimaksud di sini ialah melepaskan ikatan.¹⁶ Jadi mentalak istri berarti melepaskan isteri dari ikatan perkawinan.

Talak berarti memutuskan atau membatalkan ikatan pernikahan, baik pemutusan terjadi pada masa kini (jika talak itu berupa talak *ba'in*) maupun pada masa mendatang (jika talak itu berupa talak *raj'i*) dengan menggunakan lapaz tertentu.¹⁷

Talak *raj'i* adalah talak dimana suami masih mempunyai hak untuk kembali kepada isterinya (*rujuk*) sepanjang isterinya tersebut masih dalam keadaan *'iddah*, sedangkan talak *raj'i* adalah talak yang suami tidak memiliki hak untuk rujuk kepada wanita yang ditalaknya.¹⁸

Perceraian dalam bahasa Arab disebut “talak” atau “*furqah*”. Adapun talak berarti “membuka ikatan”, membatalkan perjanjian, sedangkan *furgah*

¹⁵W.J.S. Poerwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976, h. 20.

¹⁶H. Sulaiman Rasid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1996, h. 402.

¹⁷Abu Malik Kamal, *Fikih Sunnah Wanita Jilid 2*, Bandung: Cordova Internasional Indonesia, 2016, h. 239

¹⁸Muhammad Jawab Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera, 2011, h. 484-485

berarti “bercerai”, lawan dari “berkumpul” kemudian dua kata itu dipahami oleh para ahli fiqh sebagai istilah yang berarti perceraian antara suami isteri.¹⁹

Sayid Sabiq dalam bukunya *Fiqh al-Sunnah*, menjelaskan bahwa talak menurut istilah syara’ adalah: “melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri hubungan perkawinan suami isteri.”²⁰

Di dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak disebutkan apa yang dimaksud dengan perceraian, hanya pengertian perceraian itu dijumpai dalam pasal 117 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1990) yaitu: Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang pengadilan agama yang mengadili salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 129,²¹ 130.²²

B. Dasar Hukum Perceraian

Dalam melaksanakan kehidupan rumah tangga tidak mustahil apabila akan terjadi salah paham antara suami isteri, salah satu atau keduanya tidak melaksanakan kewajiban, tidak saling percaya dan sebagainya, sehingga menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga dikarenakan tidak dapat dipersatukan lagi persepsi dan visi antara keduanya, keadaan seperti ini adakalanya dapat diatasi dan diselesaikan, sehingga hubungan suami isteri baik

¹⁹Kamal Mukhtar, *Azas-azas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Yogyakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 156.

²⁰Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid II, (Beirut: Daar al-Fikr, 1992), hlm. 206

²¹Lihat KHI Pasal 129 Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

²²Lihat KHI Pasal 130 Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi

kembali.²³ Namun adakalanya tidak dapat diselesaikan atau didamaikan. Bahkan kadang-kadang menimbulkan kebencian dan pertengkaran yang berkepanjangan.

Ketika ikatan perkawinan sudah tidak mampu lagi untuk dipertahankan, rumah tangga yang mereka bina tidak lagi memberi rasa damai terhadap pasangan suami isteri, maka Islam mengatur tata cara untuk menyelesaikan dari keadaan seperti itu yang disebut dengan talak atau perceraian. Ketentuan Perceraian itu didasarkan pada al-Qur'an dan al-Hadits.

1). Dasar Al-Qur'an Surah An-Nisa : 130 sebagai berikut :



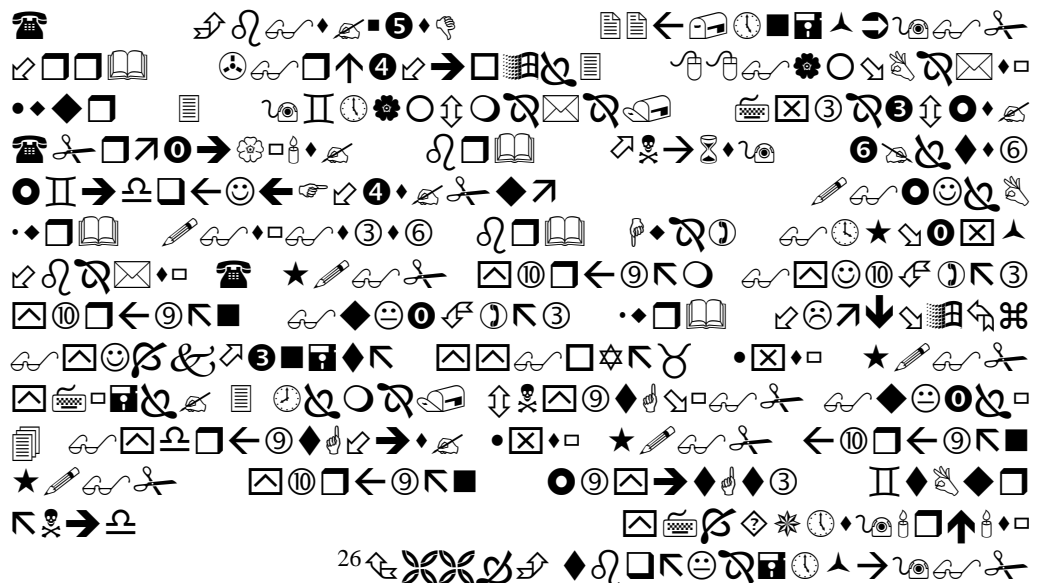
Artinya: Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan adalah Allah Maha luas (karunia-Nya), Maha Bijaksana.²⁵

Ayat di atas menjelaskan jika memang perceraian harus ditempuh sebagai alternatif atau jalan terakhir, maka Allah akan mencukupkan karunianya kepada masing-masing keduanya (suami istri). Walaupun pasangan suami istri sudah di akhiri dengan perceraian, namun Islam tetap memberikan jalan kembali bila kedua belah pihak menghendaknya, dengan catatan talak yang di lakukan bukan bain kubro, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 299 sebagai berikut:

²³Abdul Ghani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), h. 112

²⁴An-Nisa (4) : 130

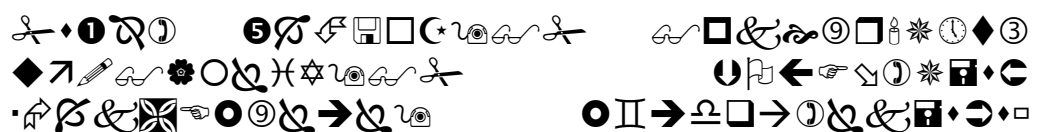
²⁵Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Sinergi Pusaka Indonesia, 2012, h. 130



Artinya; Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang Telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim. (Q.S. al-Baqarah: 249).²⁷

Ayat di atas menerangkan bahwa ketentuan talak yang masih dapat dirujuk oleh suami adalah sebanyak dua kali, maka apabila suami mentalak lagi (ketiga kalinya) maka tidak halal lagi baginya (suami) untuk merujuk isterinya lagi, kecuali si isteri telah menikah lagi dengan orang lain dan telah bercerai.²⁸

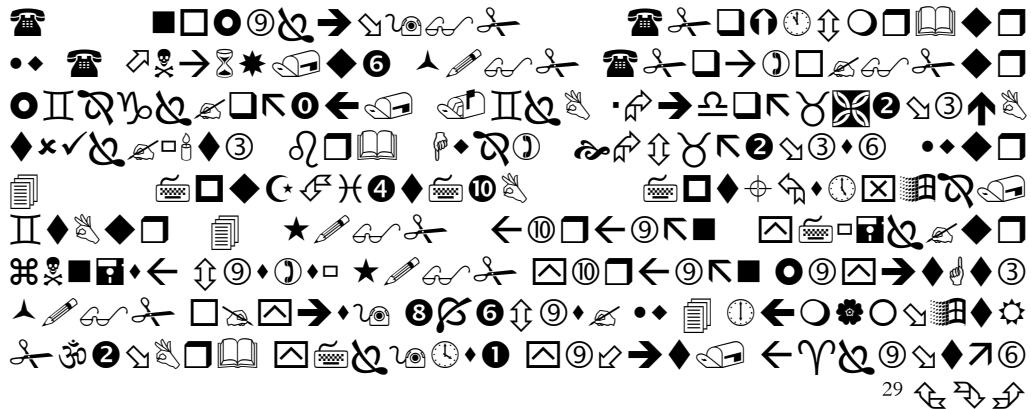
Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Thalaq ayat 1 :



²⁶Baqarah (2) : 299

²⁷Kementerian Agama RI, Op.Cit, h. 45.

²⁸Muhammad Ali al-Sabuni, *Rawa'I al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam*, Dar al-Fikr, t.th., h.



Artinya: Wahai nabi! apabila kamu menceraikan Istri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang[1482]. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya dia Telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru (Q.S. al-Thalaq: 1).³⁰

Ayat di atas menjelaskan ketentuan waktu mentalak yaitu ketika si

isteri dalam keadaan suci dan belum dicampuri atau dinamakan talak suni.

b). Al- Hadist

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسَّالَ عُمَرَ ابْنُ الْخَطَّابِ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرَّةً فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ إِنِّشَأْ أَمْسَكَ بَعْدَ ذَلِكَ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمْسَ قَتْلَكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تَطْلُقَ هَآ النَّسَاءُ 31

Artinya : “Diriwayatkan dari Ibn Umar r.a., “Sesungguhnya dia telah menceraikan isterinya dalam keadaan haid, kasus itu terjadi pada zaman Rasulullah S.a.w., kemudian masalah itu dinyatakan oleh Umar bin Khattab kepada rasulullah s.a.w., lalu beliau bersabda “Perintahkan supaya dia rujuk (kembali kepada isterinya, kemudian menahannya sampai isterinya suci,kemudian haid

²⁹Ath-Thalaq (65): 1

³⁰Kementerian Agama RI, *op.cit*, h. 816.

³¹Abi Daud, *Sunan Abi Daud, Kitab at-Thalaq, Bab Talak Sunnah*, Beirut Libanon: Dar Al-Fikr, 1994., h. 500-501

lagi, kemudian suci lagi, kemudian apabila ia mau, dia dapat menahannya atau menceraikannya, asal dia mencampurinya, itulah tempo iddah yang diperintahkan oleh Allah yang Maha Mulia lagi Maha Agung bagi wanita yang diceraikan”.

C. Perceraian Dini Menurut Peraturan Perundang-undangan

Meskipun perkawinan dimaksudkan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmat bagi pasangan suami isteri yang memeluk agama Islam, namun dalam perjalanan kehidupan rumah tangganya juga dimungkinkan timbulnya permasalahan yang dapat mengakibatkan terancamnya keharmonisan ikatan perkawinannya. Bahkan apabila permasalahan tersebut tidak memungkinkan untuk dirukunkan kembali, sehingga keduanya sepakat untuk memutuskan ikatan perkawinannya melalui perceraian. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang putusnya perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena :

1. Kematian;
2. Perceraian;
3. Atas putusan Pengadilan.

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya mengatur tentang tatacara perceraian, yaitu dalam Pasal 14 yang menyatakan bahwa:

“seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan isterinya, mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia

bermaksud menceraikan isterinya disertai dengan alasan-alasannya, serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu”.³²

Alasan-alasan yang dimaksud dalam Pasal 14 tersebut adalah sebagai berikut sebagaimana diatur dalam Pasal 19 UUP, yaitu :

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukum lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
6. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perceraian adalah lepasnya ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan perkawinan.³³ Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 14 seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan

³²Lihat PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

³³Al Hamdani, *Risalah Nikah*, Jakarta : Pustaka Amani, 2002, h. 202

menceraikan isterinya, mengajukan surat gugatan kepada Pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya disertai dengan alasan-alasan serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

Perceraian dini yang penulis maksudkan adalah pasangan suami isteri yang telah melaksanakan pernikahan selama 1-12 bulan, 1-2 tahun dan 2-3 tahun telah terjadi keretakan rumah tangga sampai terjadinya perceraian, baik yang sudah memiliki putusan Pengadilan Agama maupun masih dalam proses perceraian.

D. Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui lebih jelas tentang penelitian ini, kiranya sangat penting untuk mengkaji pemikiran dan penelitian terdahulu. Sepengetahuan penulis hanya sedikit peneliti yang mengkaji tentang pencegahan perceraian dini, sebagai berikut:

1. H. Bustaniansyah, NIM. 0802020401, berjudul: *Kewajiban Nafkah Iddah Terhadap Istri yang Ditalak Suami (Telaah Menurut Fiqih dan KHI)*. Penelitian ini adalah fakta yang ada di masyarakat ketika suami mentalak isterinya, selama masa iddahnya tidak diberikan nafkah bahkan istri tersebut juga diusir dari rumahnya. Padahal istri yang beriddah talak raj'i berhak mendapatkan tempat tinggal dan nafkah

iddah, karena secara tekstual ayat Alquran dan hadis menegaskan dan karena masih dapat rujuk.³⁴

2. M. Rasyidi, NIM. 07.0202.0360, berjudul: *Sikap Tuan Guru Terhadap Pencatatan Nikah dan Perceraian di Kec. Rantau Badauh Kab. Barito Kuala*. Penelitian ini membahas pendapat yang menjadi sikap dari guru-guru agama yang ada di wilayah Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala tentang hukum dari pencatatan nikah dan perceraian tanpa melalui Pengadilan Agama.³⁵
3. Rusinah, NIM. 05.01.02.0208, berjudul: *Perkawinan Poligami (Studi Kritis Pasal 4 dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974)*. Penelitian ini mengkaji tentang terjadinya poligami dalam sebuah perkawinan, seperti: hukumnya, alasan-alasan dibolehkannya, tata caranya, hak-hak isteri bersangkutan, konsekuensinya ketika telah terjadi pernikahan poligami, dan problematikanya.³⁶
4. Eka Widiasmara, NIM B4B 008 075, berjudul: *Kedudukan Perkawinan Dan Perceraian Dibawah Tangan di Tinjau Dari Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku di Indonesia*. Penelitian ini mengkaji tentang kedudukan perkawinan dan perceraian dibawah tangan ditinjau dari Hukum Islam dan ketentuan Hukum Positif yang berlaku di Indonesia dan hambatan-hambatan yang dihadapi pelaku perkawinan dan

³⁴http://idr.iain-antasari.ac.id/thesis/chapter_ii/0802020401-diakses pada hari Selasa, tanggal 09 Pebruari 2017, pukul 11.15 wib.

³⁵http://idr.iain-antasari.ac.id/thesis/chapter_ii/05.01.02.0197-diakses pada hari Rabu, tanggal 15 Pebruari 2017, pukul 13.15 wib.

³⁶http://idr.iain-antasari.ac.id/thesis/chapter_ii/05.01.02.0208-diakses pada hari Rabu, tanggal 15 Pebruari 2017, pukul 21.15 wib.

perceraian dibawah tangan menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia dan solusi hukumnya, dengan menggunakan metodologi penelitian yuridis normatif.³⁷

TABEL 1
PERBEDAAN DAN PERSAMAAN SERTA KEDUDUKAN
PENELITIAN PENULIS

No	Nama, Judul, dan Jenis Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Kedudukan Penelitian
1	H. Bustaniansyah, Kewajiban Nafkah Iddah terhadap isteri yang ditalak suami, kajian lapangan	Pemberlakuan perceraian kepada isteri	Kewajiban suami memberi nafkah selama iddah	Studi Analisis Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam
2	M. Rasyidi, Sikap Tuan Guru Terhadap Pencatatan Nikah dan perceraian, kajian Lapangan	Pencatatan Nikah dan perceraian	Sikap dari guru-guru agama nikah dan cerai tanpa melalui Pengadilan Agama	Studi Analisis pencatatan nikah dan Perceraian
3	Rusinah, Perkawinan Poligami, kajian pustaka	Kedudukan perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974	Konsekwensi dan Problematika berpoligami	Studi kritis pasal 4 UU Nomor 1 Tahun 1974
4	Eka Widiasmara, Kedudukan perkawinan dan perceraian Dibawah tangan.	Analisis perkawinan dan perceraian	Pemahaman Perkawinan dan perceraian dibawah tangan	Analisis menurut Hukum islam dan UU yang berlaku

Memperhatikan semua tesis tersebut baik judulnya, permasalahannya, hasil penelitian dan analisisnya ternyata sangat berbeda dengan penelitian yang telah dikaji tersebut, sehingga jelas fokus permasalahan yang diteliti juga berbeda sekali.

E. Pencegahan Perceraian Dini

³⁷http://idr.un-diponogoro.ac.id/thesis/chapter_ii/05.01.02.0208-diakses pada hari Jum'at, tanggal 17 Pebruari 2017, pukul 22.15 wib.

Teori yang digunakan sebagai bahan analisis dalam penelitian ini adalah:

1. Teori *Sadd Az-Zari'ah*

a. Pengertian *Sadd Az-Zari'ah* (سَدُّ الدَّرِيَّةِ)

Sadd Az-Zari'ah terdiri dari dua kata, yaitu saddu (سَدُّ) artinya menutup, menghalangi, dan *Az-Zari'ah* (الدَّرِيَّةِ) artinya jalan, wasilah, atau yang menjadi perantara (mediator). Secara bahasa *Sadd Az-Zari'ah* yaitu:

اَلْوَسِيْلَةُ الَّتِي يَتَوَصَّلُ بِهَا إِلَى الشَّيْءِ

Wasilah yang menyampaikan pada sesuatu³⁸

Pengertian ini sejalan dengan yang dikemukakan Khalid Ramadhan Hasan:

اَلْوَسِيْلَةُ وَالطَّرِيقُ إِلَى الشَّيْءِ, سَوَاءٌ كَانَ هَذَا الشَّيْءُ مَفْسَدَةً أَوْ مَصْلَحَةً

Wasilah atau jalan kepada sesuatu, baik yang berupa kerusakan maupun kebaikan³⁹

Kata *Az-Zari'ah* itu didahului dengan *Sadd* yang artinya menutup, maksudnya menutup jalan terjadinya kerusakan. Sehingga, pengertian *Sadd Az-Zari'ah* menurut para ulama ahli ushul fiqh, yaitu:

مَنْعَ كُلِّ مَا يَتَوَصَّلُ بِهِ إِلَى الشَّيْءِ الْمَمْنُوعِ الْمُشْتَمِلِ عَلَى مَفْسَدَةٍ أَوْ مُضَرَّةٍ

Mencegah segala sesuatu (perkataan maupun perbuatan) yang menyampaikan pada sesuatu yang dicegah/dilarang yang mengandung kerusakan atau bahaya.⁴⁰

³⁸Wahbah Al-Zuhayliy, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1986), h. 873.

³⁹ Khalid Ramadan Hasan, *Mu'jam Ushul Al-Fiqh*, (Mesir: Al-Rawdah, 1998), h. 148

⁴⁰Wahbah Al-Zuhayliy, *Al-Wajiz fi Ushul Al-Fiqh*, (Damaskus: Dar Al-Fiqr, 1999) h. 108

Menurut Al-Syatibi, *Sadd Az-Zari'ah* ialah:

التَّوَصَّلُ بِمَا بِهِ وَ مَصْلَحَةُ إِلَى مَفْسَدَتِهِ

Melaksanakan suatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan menuju pada suatu kerusakan (kemafsadatan)⁴¹

Dari beberapa pengertian di atas dapat diketahui bahwa *Sadd Az-Zari'ah* merupakan suatu metode penggalan hukum Islam dengan mencegah, melarang, menutup jalan atau wasilah suatu pekerjaan yang awalnya dibolehkan karena dapat menimbulkan sesuatu yang menyebabkan terjadinya kerusakan atau sesuatu yang dilarang.

Contohnya, seseorang yang telah dikenai kewajiban zakat, namun sebelum haul (genap setahun) ia menghibahkan hartanya kepada anaknya sehingga dia terhindar dari kewajiban zakat. Hibbah (memberikan sesuatu kepada orang lain, tanpa ikatan apa-apa) dalam syari'at Islam merupakan perbuatan baik yang mengandung kemashlahatan. Akan tetapi, bila tujuannya tidak baik, misalnya untuk menghindarkan dari kewajiban zakat maka hukumnya dilarang. Hal itu didasarkan pada pertimbangan bahwa hukum zakat adalah wajib sedangkan hibbah adalah sunnah.⁴²

M. Hasbi Ash-Shiddieqy menyebutkan bahwa *Sadd Sadd Az-Zari'ah* merupakan salah satu pengecualian dalam metode penggalan hukum Islam selain *Ihtisn*. Di mana, *Ihtisn* merupakan pengecualian

⁴¹Andewi Suhartini, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2012), h. 156.

⁴²*Ibid.* 157

yang merupakan kebolehan dan kemudahan sementara *Sadd Az-Zari'ah* merupakan pengecualian yang merupakan pencegahan.⁴³

Salah satu kaidah *Sadd Az-Zari'ah* adalah:

مَا تَكُونُ وَسِيَّةً وَطَرِيقًا إِلَى شَيْءٍ مَّمنُوعٍ شَرْعًا

Sesuatu yang menjadi perantara dan jalan kepada sesuatu yang terlarang pada syara'.⁴⁴

Sesungguhnya segala maksud syara' yaitu mendatangkan manfaat kepada manusia dan menolak mafsadat dari mereka, tidaklah mungkin diperoleh kecuali dengan melalui sebab-sebab yang menyampaikan kita kepadanya. Maka kita diharuskan mengerjakan sebab-sebab itu karena sebab itulah yang menyebabkan kita kepada maksud.

Dengan demikian, kita dapat menetapkan bahwa pekerjaan-pekerjaan yang menyampaikan kepada kemaslahatan, dituntut untuk mengerjakannya, dan pekerjaan-pekerjaan yang menyampaikan kita pada kerusakan dan kemafsadatan dilarang kita mengerjakannya.

Menurut penulis teori *Sadd Az-Zari'ah* adalah mendatangkan kemaslahatan menolak mudarat, mudarat yang dimaksud penulis adalah terjadinya perceraian suami isteri yang sudah melaksanakan pernikahan, sehingga dengan adanya strategi kantor urusan agama kecamatan memberikan penasihatn baik melalui kursus calon pengantin (suscatin) maupun melalui Badan Penasihatn Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4) yang ada di kantor urusan agama, sehingga perceraian itu dapat

⁴³M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), h. 320.

⁴⁴*Ibid.* 321

dihindari. Karena perceraian itu dilihat aspek *pertama* dari bentuk sesuatu perbuatan yang jika dilakukan menurut pertimbangan adalah sama kemungkinannya untuk terbawa pada yang terlarang dan yang tidak terlarang. *Kedua* di lihat dari (dampak) bahwa perceraian itu akan menimbulkan putusnya hubungan silaturrahi antara kedua belah pihak baik keluarga laki-laki maupun keluarga perempuan. *Ketiga* dilihat dari tingkat kerusakan yang ditimbulkan akibat dari perbuatan perceraian itu membawa kerusakan pasti karena perceraian suatu perbuatan yang halal tetapi dibenci oleh Allah SWT.

b. Dasar Hukum

Sadd Az-Zari'ah Pada dasarnya, tidak ada dalil yang jelas dan pasti baik menurut nash maupun ijma' ulama tentang boleh atau tidaknya menggunakan *Sadd Az-Zari'ah*. Namun demikian, ada beberapa nash yang mengarah kepadanya, baik Al-Qur'an maupun As-Sunnah, juga kaidah fiqh, di antaranya yaitu:

1. Al-Qur'an

a). Surat Al-An'am ayat 108

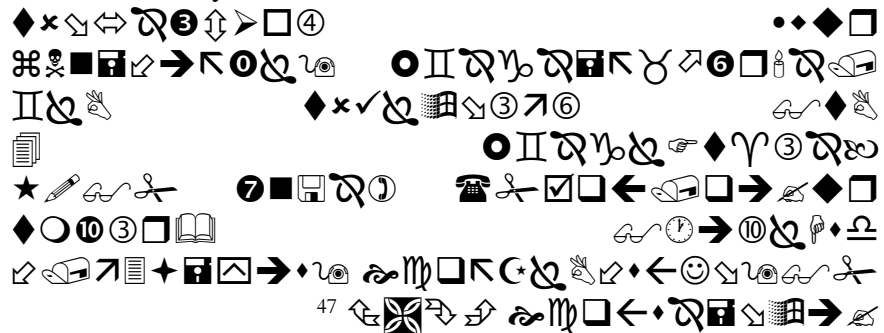


Dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, Karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan.⁴⁵

⁴⁵Al-An'am (6): 108

⁴⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Sinergi Pusaka Indonesia, 2012, h. 190

b). Surat An-Nur ayat 31



Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.⁴⁸

Mencaci maki sesembahan kaum Musyrikin sebenarnya diperbolehkan, bahkan mengandung kemaslahatan. Namun jika dilakukan hal itu akan menimbulkan kerusakan yang lebih besar daripada kemaslahatan itu sendiri, yaitu balasan orang-orang Musyrik dengan mencaci Allah.⁴⁹

Begitu pula perempuan Mukmin yang menghentakkan kakinya, meskipun dibolehkan namun jika mengakibatkan rangsangan bagi kaum lelaki (selain suami) yang mendengarnya, maka itu dilarang.

2. As-Sunnah

Dari Al-Miqdad bin Al-Aswad bahwa dia memberi kabar kalau dia telah berkata:

⁴⁷An-Nur (24): 31

⁴⁸Kementerian Agama RI, h. 493

⁴⁹Abdullah bin Muhammad bin 'Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, Lubaah At-Tafsir Min Ibnu Kastir, penterj. M. Abdul Ghoffar Tafsir Ibnu Katsir, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2008), h. 272

قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ لَقِيتُ رَجُلًا مِّنَ الْكُفِّ فَقَاتَلَنِي فَضَرَبَ إِحْدَى يَدَيَّ بِالسَّيْفِ فَقَطَعَهَا ثُمَّ لَادَ مِنِّي بِشَجَرَةٍ فَقَالَ أَسْلَمْتُ لِلَّهِ أَفَأَقْتُلُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَعْدَ أَنْ قَالِيهَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقْتُلُهُ قَالَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ قَدْ قَطَعَ يَدَيَّ ثُمَّ قَالَ ذَلِكَ بَعْدَ أَنْ فَقَطَعَهَا أَفَأَقْتُلُهَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقْتُلُهُ فَإِنْ قَتَلْتَهُ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ كَلِمَتَهُ الَّتِي قَالَ

Artinya: “Wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu jika aku bertemu dengan salah seorang dari kaum kafir lantas dia memerangi aku. Lalu dia memotong salah satu dari tanganku sehingga benar-benar berhasil memenggalnya. Setelah itu dia berlindung dariku di balik sebatang pohon sembari berkata, ‘Aku telah menyatakan keislaman kepada Allah’. Apakah aku (masih boleh) membunuhnya wahai Rasulullah setelah dia berkata seperti itu?”. Rasulullah SAW. bersabda, “Janganlah kamu membunuhnya”. Al-Miqdad berkata, “Aku berkata, ‘Wahai Rasulullah, sesungguhnya dia telah memotong tanganku. Baru kemudian dia mengatakan hal tersebut (menyatakan keislaman) setelah berhasil memotongnya. Apakah aku (boleh) membunuhnya?’. Rasulullah SAW. bersabda, “Janganlah kamu membunuhnya. Jika kamu tetap saja membunuhnya, maka dia sama dengan statusmu sebelum kamu membunuhnya sedangkan kamu sama dengan statusnya sebelum dia mengucapkan kalimat yang dilafazkan tersebut.”⁵⁰

Hadis di atas berisi larangan membunuh orang kafir (munafik) setelah mengucapkan kalimat tauhid, *la ilaha illallah*, meskipun itu hanya berlandaskan karena takut dibunuh. Al-Qadhi ‘Iyad menjelaskan bahwa makna hadis ini adalah bahwa sesungguhnya orang yang membunuh itu tidak ubahnya seperti orang kafir tersebut dalam hal menentang kebenaran dan mempraktekkan perbuatan dosa. Karena begitu banyaknya jenis perbuatan dosa, maka dosa orang kafir

⁵⁰ Imam Al-Nawawi, *Shahih Muslim bi Al-Syarh An-Nawawi*, penterj. Wawan Djunaedi Soffandi Terjemah Syarah Shahih Muslim, Jakarta: Mustaqim, 2002, h. 669.

tersebut dinamakan kufur sedangkan dosa orang yang membunuh itu disebut maksiat dan kefasikan.⁵¹

3. Kaidah Fiqh

مَا أَذَا إِلَى الْحَرَامِ فَهُوَ حَرَامٌ

Apa yang membawa kepada yang haram maka hal tersebut juga haram hukumnya.⁵²

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan.⁵³

Pengembangan dari kaidah di atas adalah bahwa segala perbuatan dan perkataan yang dilakukan mukallaf yang dilarang syara' terkadang menyampaikan dengan sendirinya kepada kerusakan tanpa perantara, seperti zina, percurian, dan pembunuhan. Namun terkadang tidak menyampaikan dengan sendirinya, tetapi dia menjadi wasilah kepada sesuatu yang lain yang menyampaikan kepada kerusakan tersebut, seperti khalwat yang tidak menjadi sebab terjadinya percampuran keturunan, tetapi dia menjadi perantara kepada zina yang menimbulkan kerusakan.⁵⁴

c. Klasifikasi *Sadd Az-Zari'ah*

Para ulama berbeda mengklasifikasikan *Sadd Az-Zari'ah* dalam beberapa aspek, di antaranya:

1. Dilihat dari bentuknya dapat dibagi tiga:

⁵¹*Ibid.* h. 673.

⁵² Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, h. 32

⁵³ Nashr Farid Muhammad Washil, dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Al-Madkhalu fi Al-Qaw'id Al-Fiqhiyyati wa Asaruha fi Al-Ahkami Al-Syar'iyyati*, terj. Qawaid Fiqhiyyah penterj. Wahyu Setiawan, (Jakarta: Amzah, 2009), h. 21.

⁵⁴ Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam.*, h. 322.

- a) Sesuatu yang jika dilakukan, biasanya akan terbawa pada yang terlarang;
- b) Sesuatu yang jika dilakukan tidak terbawa kepada yang dilarang;
- c) Sesuatu perbuatan yang jika dilakukan menurut pertimbangan adalah sama kemungkinannya untuk terbawa pada yang terlarang dan yang tidak terlarang.⁵⁵

2. Dilihat dari akibat (dampak) yang ditimbulkannya, Ibn Qayyim membaginya menjadi empat:

- a) Perbuatan yang memang pada dasarnya membawa kepada kerusakan seperti meminum khamar yang merusak akal dan zina yang merusak tata keturunan;
- b) Perbuatan yang ditentukan untuk sesuatu yang mubah, namun ditujukan untuk perbuatan buruk yang merusak, seperti nikah muhallil, atau transaksi jual beli yang mengantarkan pada riba;
- c) Perbuatan yang semula ditentukan untuk yang mubah, tidak ditujukan untuk kerusakan, namun biasanya sampai juga kepada kerusakan yang mana kerusakan itu lebih besar dari kebaikannya, seperti mencaci sembah agama lain; dan
- d) Perbuatan yang semula ditentukan untuk mubah, namun terkadang membawa kerusakan, sedang kerusakannya lebih kecil dibanding kebaikannya. Contoh melihat wajah perempuan saat dipinang.⁵⁶

⁵⁵A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih 1 dan 2*, Jakarta: Kencana, 2010, h. 166.

⁵⁶Al-Zuhayliy, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*, h. 884.

3. Dilihat dari tingkat kerusakan yang ditimbulkan, Abu Ishak Al-Syatibi membaginya ke dalam 4 macam, di antaranya yaitu:

- a) Perbuatan yang dilakukan tersebut membawa kerusakan yang pasti. Misalnya menggali sumur di depan rumah orang lain pada waktu malam, yang menyebabkan pemilik rumah jatuh ke dalam sumur tersebut. Orang yang bersangkutan dikenai hukuman karena melakukan perbuatan tersebut dengan disengaja;
- b) Perbuatan yang boleh dilakukan karena jarang mengandung kemafsadatan, misalnya menjual makanan yang biasanya tidak mengandung kemafsadatan;
- c) Perbuatan yang dilakukan kemungkinan besar akan membawa kemafsadatan. Misalnya, menjual senjata pada musuh, yang dimungkinkan akan digunakan untuk membunuh;
- d) Perbuatan yang pada dasarnya boleh dilakukan karena mengandung kemaslahatan, tetapi memungkinkan terjadinya kemafsadatan. Misalnya bai' al-ajal (jual beli dengan harga yang lebih tinggi dari harga asal karena tidak kontan).⁵⁷

d. Kedudukan *Sadd Az-Zari'ah* Dalam Hukum Islam

Di kalangan ulama Ushul terjadi perbedaan pendapat dalam menetapkan boleh atau tidaknya menggunakan *Sadd Az-Zari'ah* sebagai dalil syara'. Sebagaimana dijelaskan M. Quraish Shihab, Ulama Malikiyah menggunakan Q.S. Al-An'am ayat 108 dan Q.S. An-Nur ayat

⁵⁷Al-Zuhayliy, *Al-Wajiz fi Ushul Al-Fiqh*, h.109.

31 yang dijadikan alasan untuk menguatkan pendapatnya tentang *Sadd Az-Zari'ah*.⁵⁸

Jumhur ulama menempatkan faktor manfaat dan mafsadat sebagai pertimbangan dalam menetapkan hukum, salah satunya dalam metode *Sadd Az-Zari'ah* ini. Dasar pegangan jumhur ulama untuk menggunakan metode ini adalah kehati-hatian dalam beramal ketika menghadapi perbenturan antara maslahat dan mafsadat. Bila maslahat dominan, maka boleh dilakukan; dan bila mafsadat yang dominan, maka harus ditinggalkan. Namun, jika sama-sama kuat, maka untuk menjaga kehati-hatian harus mengambil prinsip yang berlaku.

مَا أَذَا إِلَى الْحَرَامِ فَهُوَ حَرَامٌ

Apa yang membawa kepada yang haram maka hal tersebut juga haram hukumnya.⁵⁹

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan.⁶⁰

Sementara itu, ulama Zhahiriyyah, Ibnu Hazm secara mutlak menolak metode *Sadd Az-Zari'ah* ini. Hal ini dikarenakan ulama Zhahiriyyah hanya menggunakan sumber nash murni (Al-Qur'an dan As-Sunnah) dalam menetapkan suatu hukum tertentu tanpa campur tangan logika pemikiran manusia (ra'yu) seperti pada *Sadd Az-Zari'ah*. Hasil

⁵⁸M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Volume 4*, (Jakarta: Lentera Hati, 2001), h. 237

⁵⁹Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, h. 32

⁶⁰Nashr Farid Muhammad Washil, dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Al-Madkhalu fi Al-Qaw'id Al-Fiqhiyyati wa Asaruha fi Al-Ahkami Al-Syar'iyyati*, terj. *Qawaid Fiqhiyyah* penterj. Wahyu Setiawan, Jakarta: Amzah, 2009, h. 21.

ra'yu selalu erat dengan adanya persangkaan (*zhan*), dan haram hukumnya menetapkan sesuatu berdasarkan persangkaan, karena menghukumi dengan persangkaan sangat dekat dengan kebohongan, dan kebohongan adalah satu bentuk kebatilan.⁶¹

Namun demikian, perbedaan pendapat mengenai kedudukan *Sadd Az-Zari'ah* ini dalam perkembangannya tidak menjadikan *Sadd Az-Zari'ah* tidak digunakan sama sekali. Para ulama zaman sekarang pun dalam kegiatan tertentu menggunakan *Sadd Az-Zari'ah* untuk menetapkan suatu hukum tertentu. Salah satu lembaga keagamaan yang menggunakan metode ini adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menggunakan metode ini dalam menetapkan fatwa halal atau memberikan sertifikasi halal terhadap produk-produk perdagangan baik itu makanan, kosmetik, maupun penggunaan nama produk yang beredar dan dijual di pasaran. Seperti larangan menggunakan ungkapan kata-kata pada produk kosmetik yang merangsang syahwat, yang dikhawatirkan akan menimbulkan rangsangan syahwat yang menjurus pada perbuatan yang dilarang. Maka penggunaan nama itu pun dilarang.⁶²

Teori *Sadd Az-Zari'ah* menurut penulis menempatkan faktor manfaat dan mafsadat sebagai pertimbangan dalam menetapkan hukum,

⁶¹Al-Imam Muhammad Abu Zahrah, Ibnu Hazm: *Hayatuh Wa 'Asruh, Arauh Wa Fiqhuh*, Qaira: Daar Al-Fikr Al-'Arabi, tt, h. 372.

⁶²Usman, "Sertifikasi Halal MUI Berprinsip pada Saddudz Dzari'ah", dalam http://www.halalmui.org/index.php?option=com_content&view=article&id=872%3Asertifikasi-halal-bepinsip-pada-saddudz-dzariah&catid=1%3Alatest-news&Itemid=434&lang=en 26 Pebruari 2017) jam. 11.32 WIB

salah satunya dalam metode *Sadd Az-Zari'ah* ini. Dasarnya untuk menggunakan metode ini adalah harus hat-hati dalam beramal ketika menghadapi perbenturan antara maslahat dan mafsadat. Bila maslahat dominan, maka boleh dilakukan dan bila mafsadat yang dominan, maka harus ditinggalkan. Namun, jika sama-sama kuat, maka untuk menjaga kehati-hatian harus mengambil prinsip yang berlaku.

2. Teori Kewenangan

a. Pengertian Kewenangan

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain.⁶³ Menurut H.D Stout wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik didalam hubungan hukum publik.⁶⁴

Menurut Bagir Manan wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat dan tidak berbuat. Wewenang sekaligus berarti hak dan

⁶³Kamal Hidjaz. *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Pustaka Refleksi. Makasar. 2010. h. 35.

⁶⁴ Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta 2013. h. 71

kewajiban.⁶⁵ Kewenangan adalah merupakan hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku, dengan demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaedah-kaedah formal, jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi.

Kewenangan memiliki kedudukan yang penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Begitu pentingnya kedudukan kewenangan ini, sehingga F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek menyebut sebagai konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi negara.⁶⁶ Berdasarkan definisi kewenangan menurut para ahli diatas, penulis berpendapat bahwa kewenangan merupakan suatu hak yang dimiliki oleh seorang pejabat atau institusi yang berindak menjalankan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Sumber Kewenangan

Indroharto, mengemukakan bahwa wewenang diperoleh secara atribusi, delegasi, dan mandat, yang masing-masing dijelaskan sebagai berikut : Wewenang yang diperoleh secara atribusi, yaitu pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi, disini dilahirkan/diciptakan suatu wewenang pemerintah yang baru. Pada delegasi terjadilah pelimpahan suatu

⁶⁵Nurmayani S.H.,M.H. *Hukum Administrasi Daerah*. Universitas Lampung Bandarlampung. 2009. hal 26.

⁶⁶Ridwan HR. *Op.Cit*. h. 99.

wewenang yang telah ada oleh Badan atau Jabatan TUN yang telah memperoleh suatu wewenang pemerintahan secara atributif kepada Badan atau Jabatan TUN lainnya.

Jadi, suatu delegasi selalu didahului oleh adanya sesuatu atribusi wewenang. Pada mandat, disitu tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari Badan atau Jabatan TUN yang satu kepada yang lain.⁶⁷

Philipus M. Hadjon, mengatakan bahwa setiap tindakan pemerintahan disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan *atribusi* lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh undang-undang dasar, sedangkan kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan. Kemudian Philipus M Hadjon pada dasarnya membuat perbedaan antara delegasi dan mandat. Dalam hal delegasi mengenai prosedur pelimpahannya berasal dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan yang lainnya dengan peraturan perundang-undangan, dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih ke delegataris.

Pemberi delegasi tidak dapat menggunakan wewenang itu lagi, kecuali setelah ada pencabutan dengan berpegang dengan asas "*contrarius actus*". Artinya, setiap perubahan, pencabutan suatu peraturan pelaksanaan perundang-undangan, dilakukan oleh pejabat yang

⁶⁷Indroharto. *Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pustaka Harapan. 1993. h. 68.

menetapkan peraturan dimaksud, dan dilakukan dengan peraturan yang setaraf atau yang lebih tinggi. Dalam hal mandat, prosedur pelimpahan dalam rangka hubungan atasan bawahan yang bersifat rutin. Adapun tanggung jawab dan tanggung gugat tetap pada pemberi mandat. Setiap saat pemberi mandat dapat menggunakan sendiri wewenang yang dilimpahkan itu.⁶⁸

Bagir Manan, menyatakan dalam Hukum Tata Negara, kekuasaan menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Wewenang mengandung arti hak dan kewajiban. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu. Kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu. Dalam hukum administrasi negara wewenang pemerintahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui cara-cara yaitu atribusi, delegasi dan mandat.⁶⁹

Atribusi terjadinya pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Atribusi kewenangan dalam peraturan perundang-undangan adalah pemberian kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang pada puncaknya diberikan oleh UUD 1945 atau UU kepada suatu lembaga negara atau pemerintah. Kewenangan tersebut melekat terus menerus dan

⁶⁸Ridwan HR. *Op.Cit.* h.108-109

⁶⁹Bagir Manan. *Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah*. Fakultas Hukum Unpad. Bandung, 2000. h. 1-2.

dapat dilaksanakan atas prakarsa sendiri setiap diperlukan. Disini dilahirkan atau diciptakan suatu wewenang baru.⁷⁰

Legislator yang kompeten untuk memberikan atribusi wewenang pemerintahan dibedakan: *Original legislator*, dalam hal ini tingkat pusat adalah Kementerian Agama Republik Indonesia. Selanjutnya ditetapkan Peraturan Menteri Agama Nomor 188 5/KI Tahun 1946 tentang susunan Departemen agama. Mengenai kewenangan KUA dalam melaksanakan tugas pencatatan nikah bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam. tugasnya diserahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan Penghulu yang merupakan PNS yang bertugas di KUA, Kewajiban PPN adalah melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas Pegawai Pencatat nikah.⁷¹

Kewenangan KUA sebagai lembaga pencatatan pernikahan telah dimuat dalam berbagai produk hukum di Indonesia. Dasar utamanya adalah UU. No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk:

Pasal 1:

- (1) Nikah yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut nikah, diawasi oleh pegawai Pencatat Nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau oleh pegawai yang ditunjuk olehnya. Talak dan rujuk yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut talak dan rujuk, diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah”.
- 2) Yang berhak melakukan pengawasan atas nikah dan menerima pemberitahuan tentang talak dan rujuk, hanya pegawai yang diangkat oleh Menteri Agama atau Pegawai Pencatat Nikah.⁷²

⁷⁰Ridwan HR. *Op.Cit.* h. 104.

⁷¹Departemen Agama RI, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2003), h. 2.

⁷²*Ibid.* h. 75

Penegasan kewenangan KUA dalam pencatatan nikah tersebut kemudian dimuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 2 ayat (1) bahwa Pencatatan perkawinan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah.⁷³

Selama ini KUA lebih dikenal masyarakat sebagai instansi yang mengurus pernikahan, baik pendaftarannya maupun menikahkan, dan tempat minta bimbingan kalau ada permasalahan suami istri, namun siapa yang bertugas sebagai pegawai yang mencatat nikah, maka berdasarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 298 Tahun 2003 Tentang Pencatatan Nikah :

Pasal 1:

- (c) Pegawai Pencatat Nikah yang selanjutnya disebut PPN adalah pegawai negeri sipil yang diangkat dalam jabatan tersebut berdasarkan undang-undang Nomor 22 tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk pada tiap KUA Kecamatan sebagai Kepala KUA Kecamatan.

Pasal 2:

- (3) PPN mempunyai tugas mengawasi dan atau mencatat nikah dan rujuk serta mendaftar cerai talak dan cerai gugat dibantu oleh pegawai pada KUA Kecamatan sebagaimana diatur dalam penjelasan Undang-undang Nomor 22 tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.⁷⁴

Kewenangan KUA sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang untuk melakukan pencatatan pernikahan bagi warga negara Indonesia beragama Islam tersebut, dalam pelaksanaannya diperkuat lagi melalui Peraturan Menteri Agama. Salah satunya adalah sebagaimana

⁷³*Ibid*, h. 184

⁷⁴*Ibid*. h. 307-308

tertuang dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.

Pasal 2:

- (1) Pegawai Pencatat Nikah yang selanjutnya disebut PPN adalah pejabat yang melakukan pemeriksaan persyaratan, pengawasan dan pencatatan peristiwa nikah/rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat, dan melakukan bimbingan perkawinan.
- (2) PPN dijabat oleh Kepala KUA.
- (3) Kepala KUA sebagaimana pada ayat (2) menandatangani akta nikah, akta rujuk, buku nikah (kutipan akta nikah) dan/atau kutipan akta rujuk.⁷⁵

Selanjutnya tugas PPN diperkuat lagi dalam Peraturan Menteri Agama PMA Nomor 39 Tahun 2012:

Pasal 2:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat

- (1) KUA menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk;
 - b. Penyusunan statistik, dokumentasi dan pengelolaan sistem informasi manajemen KUA;
 - c. Pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga KUA;
 - d. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah;
 - e. Pelayanan bimbingan kemesjidan;
 - f. Pelayanan bimbingan pembinaan syariah; dan
 - g. Penyelenggaraan fungsi lain di bidang agama Islam yang ditugaskan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.⁷⁶

Pada delegasi, terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh badan atau jabatan tata usaha negara yang telah memperoleh wewenang pemerintahan secara atributif kepada badan atau jabatan tata usaha negara lainnya. Jadi suatu delegasi selalu didahului oleh adanya

⁷⁵Departemen Agama RI, *Pedoman Penghulu*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2012), h. 206

⁷⁶ *Ibid*, h. 218

suatu atribusi wewenang. Misal, dalam Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Pasal 93 (1) Pejabat struktural eselon I diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri yang bersangkutan (2) Pejabat struktural eselon II ke bawah diangkat dan diberhentikan oleh Menteri yang bersangkutan. (3) Pejabat struktural eselon III ke bawah dapat diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang diberi pelimpahan wewenang oleh Menteri yang bersangkutan.⁷⁷

Pengertian mandat dalam asas-asas Hukum Administrasi Negara, berbeda dengan pengertian mandataris dalam konstruksi mandataris menurut penjelasan UUD 1945 sebelum perubahan. Dalam Hukum Administrasi Negara mandat diartikan sebagai perintah untuk melaksanakan atasan, kewenangan dapat sewaktu-waktu dilaksanakan oleh pemberi mandat, dan tidak terjadi peralihan tanggung jawab. Berdasarkan uraian tersebut, apabila wewenang yang diperoleh organ pemerintahan secara atribusi itu bersifat asli yang berasal dari peraturan perundang-undangan, yaitu dari redaksi pasal-pasal tertentu dalam peraturan perundang-undangan. Penerima dapat menciptakan wewenang baru atau memperluas wewenang yang sudah ada dengan tanggung jawab intern dan ekstern pelaksanaan wewenang yang diatribusikan sepenuhnya berada pada penerima wewenang (atributaris).⁷⁸

⁷⁷*Ibid.* h. 100

⁷⁸*Ibid.* h. 109.

Teori kewenangan yang dimaksud penulis adalah Kantor Urusan Agama yang merupakan satu-satunya lembaga pemerintah yang berwenang melakukan pencatatan pernikahan dikalangan umat Islam. Eksistensi Kantor Urusan Agama tidak semata karena pemenuhan tuntutan birokrasi saja tetapi secara substansial juga bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan keabsahan sebuah pernikahan. Dewasa ini persoalan-persoalan perkawinan yang dihadapi oleh umat muslim semakin kompleks. Kantor Urusan Agama sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas keabsahan pernikahan diharuskan mampu menyelesaikan permasalahan pernikahan yang terjadi di masyarakat.

3. Teori Muqasid Al-Syariah

Selain teori tersebut diatas perlu juga teori *Muqasid Al-Syari'ah* karena ada berkaitan dengan bahasan penelitian penulis yaitu tentang pencegahan perceraian dini. Secara *Lughowy* (bahasa) *Maqashid al-syrai'ah* terdiri dari dua kata, yakni *Maqashid* dan *syari'ah*. *Maqashid* adalah bentuk plural dari *Maqshad*, *Qashd*, *Maqshid* atau *Qushud* yang merupakan bentuk kata dari *Qashada* *Yaqshudu* dengan beragam makna, seperti menuju suatu arah, tujuan, tengah-tengah, adil dan tidak melampaui batas, jalan lurus, tengah-tengah antara berlebih-lebihan dan kekuarangan.⁷⁹

Adapun *Syari'ah* secara bahasa berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat pula dikaitkan sebagai jalan ke sumber pokok

⁷⁹Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas fiqh al-Aqlliyat dan Evolusi Maqashid al-Syari'ah dari konsep ke pendekatan*, (Yogyakarta: Lkis, 2010) h. 178-179

kehidupan.⁸⁰ Sedangkan menurut Yusuf Qardhowi dalam bukunya “*Membumikan Syariat Islam*” dengan mengutip dari “*Mu’jam Al-Fadz al-Qur’an al-Karim*” menjelaskan bahwa kata *Syari’at* berasal dari kata *Syara’a al syari’a* yang berarti menerangkan atau menjelaskan sesuatu, atau juga berasal dari kata *syir’ah* dan *syari’ah* yang berarti suatu tempat yang dijadikan sarana untuk mengambil air secara langsung sehingga orang yang mengambilnya tidak memerlukan bantuan alat lain⁸¹ kesamaan syari’at dengan arti bahasa syari’ah yakni jalan menuju sumber air ini adalah dari segi bahwa siapa saja yang mengikuti *Syari’ah* itu, ia akan mengalir dan bersih jiwanya. Allah menjadikan air sebagai penyebab kehidupan tumbuh-tumbuhan dan hewan sebagaimana dia menjadikan syari’ah sebagai penyebab kehidupan jiwa manusia.⁸²

Dari definisi di atas, dapat dianalogikan bahwa yang dimaksud dengan *Maqashid al-Syari’ah* adalah tujuan segala ketentuan Allah yang disyariatkan kepada umat manusia. Istilah *Maqashid al-Syari’ah* dipopulerkan oleh Abu Ishak Al-Syatibi yang tertuang dalam karyanya *Muwaffaqat* juz II sebagaimana dalam ungkapannya adalah:

هذه الشريعة وضعة لتحقيق مقاصده الشرع قيام مصالح في الدين الدنيا معا

Artinya :“Sesungguhnya syariat itu diturunkan untuk merealisasikan maksud Allah dalam mewujudkan kemashlahatan duniyah dan duniawiyah secara bersama-sama”.⁸³

⁸⁰Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid al_syari’ah menurut al-syatibi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1996), h. 61

⁸¹Yusuf Qardhowi, *Membumikan Syari’at Islam, Keluwasan aturan Illahi untuk Manusia*, (Bandung: Pustaka Mizan, 2003), Cet.ke I, Hal 13

⁸²Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), Edisi Ke I, h. 2-3

⁸³Al-Syatibi, *al-Muafaqot* Juz II.

Sedangkan secara terminologis, makna *Maqashid al-Syari'ah* berkembang dari makna yang paling sederhana sampai pada makna yang *holistik*. Dikalangan ulama klasik sebelum al-Syatibi, belum ditemukan definisi yang konkrit dan komperhensif tentang *Maqashid al-Syari'ah* definisi mereka cenderung mengikuti makna bahasa dengan menyebutkan padanan-padanan maknanya. Al-Bannani memaknainya dengan hikmah hukum, al-Asnawi mengartikannya dengan tujuan-tujuan hukum, al-Samarqandi menyamakannya dengan makna dengan makna-makna hukum, sementara Al-Ghozali, Al-Amidi dan Al-Hajib mendefinisikanya dengan menggapai manfaat dan menolak mafsadat. Variasi devinisi tersebut mengindikasikan kaitan erat *Maqashid al-Syari'ah* dengan hikmah, illat, tujuan atau niat, dan kemaslahatan.⁸⁴ *Maqashid al-syari'ah* adalah *al-ma'anni allati syari'at laha al-ahkam* (kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyari'atan hukum). Sedangkan menurut Imam al-syatibi, *Maqashid al-syrai'ah* adalah tujuan-tujuan disyari'atkannya hukum oleh Allah SWT. Yang berintikan kemaslahatan umat manusia di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Setiap pensyari'atan hukum oleh Allah mengandung *Maqashid* (tujuan-tujuan) yakni kemaslahatan bagi umat manusia.⁸⁵

Dalam memaparkan hakikat *Maqasid Al-Syari'ah*, telah dikemukakan bahwa dari segi substansi *Maqasid Al-Syari'ah* adalah kemaslahatan. Kemaslahatan dalam taklif Tuhan dapat berwujud dalam dua bentuk, pertama dalam bentuk hakiki, yakni manfaat langsung dalam arti kausalitas,

⁸⁴Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas fiqh al-Aqlliyat dan Evolusi Maqashid al-yari'ah dari konsep ke pendekatan*, (Yogyakarta:Lkis, 2010) h. 180.

⁸⁵Asafri Jaya bakri, *Konsep Maqashid al_syari'ah menurut al-syatibi*..... h. 5 dan 167

kedua, dalam bentuk majazi yakni bentuk yang merupakan sebab yang membawa kemaslahatan.⁸⁶ Menurut Al-Syatibi kemaslahatan tersebut dilihat dari dua sudut pandang. Dua sudut pandang itu adalah:

- a. *Maqasid Al-Syari'* (Tujuan Tuhan)
- b. *Maqasid Al-mukalaf* (Tujuan Mukallaf)⁸⁷

Maqasid Al-Syari'ah dalam arti *Maqasid al-Syari'*, mengandung empat aspek. Keempat aspek tersebut adalah :

- a. Tujuan awal dari syari'at yakni kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat
- b. Syari'at sebagai sesuatu yang harus di fahami
- c. Syari'at sebagai hukum taklif yang harus dilakukan, dan
- d. Tujuan syari'at adalah membawa manusia ke bawah naungan hukum.⁸⁸

Menurut penulis teori *Maqasid Al-Syari'ah* mempunyai beberapa aspek yaitu *pertama* berkaitan dengan muatan dan hakikat *maqasid al sayri'ah*. *kedua* berkaitan dengan dimensi bahasa agar syariat dapat dipahami sehingga dicapai kemaslahatan yang dikandungnya. *ketiga* berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan-ketentuan syari'at dalam rangka mewujudkan kemaslahatan. Ini juga berkaitan dengan kemampuan manusia untuk melaksanakannya. *Keempat* berkaitan dengan kepatuhan manusia sebagai mukallaf di bawah dan terhadap hukum-hukum Allah atau dalam

⁸⁶Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas fiqh al-Aqlliyat dan Evolusi Maqashid al-Syari'ah dari konsep ke pendekatan*, (Yogyakarta:Lkis, 2010) h. 198-199.

⁸⁷Al Muafaqat, Juz II hal 5

⁸⁸*Ibid.* h. 5

istilah yang lebih tegas aspek tujuan syari'at berupaya membebaskan manusia dari kekangan hawa nafsu.

F. Definisi Istilah.

Untuk memudahkan dalam memahami maksud judul penelitian ini, dijelaskan definisi operasional sebagai berikut berikut:

1. Pengertian strategi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus.⁸⁹ Strategi menurut Purnomo Setiawan Hari sebenarnya berasal dari bahasa Yunani "*strategis*" diambil dari kata *stratos* yang berarti militer. Jadi strategi dalam konteks awalnya ini diartikan sebagai *general ship* yang artinya sesuatu yang dikerjakan oleh para jenderal dalam membuat rencana untuk menaklukkan musuh dan memenangkan perang.⁹⁰ Menurut David Hunger dan Thomas L. Wheelen, strategi adalah serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Manajemen strategi meliputi pengamatan lingkungan, perumusan strategi (perencanaan strategi atau perencanaan jangka panjang). Implementasi strategi dan evaluasi serta pengendalian.⁹¹ Menurut Hamel dan Prahalad, strategi merupakan tindakan yang bersifat incremental (mengikat) dan terus menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan dimasa depan.

⁸⁹*Ibid*, h. 1377.

⁹⁰Setiawan Hari Purnomo, *Manajemen Strategi: Sebuah Konsep Pengantar*, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1996, h. 8

⁹¹David Hunger dan Thomas L. Wheelen, *Manajemen Strategi*, Yogyakarta; Andi, 2003, h.

Terjadinya kecepatan inovasi pasar baru dan perubahan pola konsumen memerlukan komperensi inti.⁹²

Sedangkan strategi menurut Anwar Arifin adalah keseluruhan kepuasan kondisional tentang tindakan yang akan dijalankan guna mencapai tujuan.⁹³ Strategi yang dimaksud oleh penulis adalah tahapan-tahapan yang harus dilalui untuk menuju target yang diinginkan untuk pelaksanaan pencegahan perceraian dini bagi calon mempelai yang akan melaksanakan pernikahan atau sudah melaksanakan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan.

2. Pengertian Pencegahan atau preventif Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pencegahan berasal dari kata cegah, artinya mencegah, menolak, merintangi mengihtiarkan supaya jangan terjadi (melanda) sedangkan pencegahan adalah proses, cara, perbuatan mencegah; penolakan.⁹⁴ Dalam penelitian ini ditekankan kepada upaya yang akan diteliti berupa strategi pencegahan perceraian dini. Langkah preventif biasanya dilakukan kepada pihak yang belum atau rentan terhadap suatu masalah, pencegahan yang dimaksud penulis adalah suatu usaha yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan untuk menghindari terjadinya perceraian dini bagi calon pengantin atau yang sudah melaksanakan pernikahan.

⁹²Rokhmad Slamet, *Seminar Akademik Program BBA Jakarta Institute of Management Studies*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, h. 2

⁹³Anwar Arifin, *Strategi Komunikasi*, Bandung: Armilo, 1984, h. 59

⁹⁴W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, di olah kembali oleh Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta: Balai Pustaka, 2003, Edisi III, h. 267-268.

3. Pengertian Perceraian Dini (Thalaq), perceraian berasal dari kata “cerai” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti: pisah, putus hubungan sebagai suami istri. Kemudian, sedangkan “perceraian” mengandung arti: perpisahan, perihal bercerai (antara suami istri), perpecahan. Adapun kata “bercerai” berarti: tidak bercampur (berhubungan, bersatu) lagi, berhenti berlaki-bini (suami istri).⁹⁵ Istilah perceraian terdapat dalam pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan fakultatif bahwa “perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan”.⁹⁶ Jadi secara yuridis istilah perceraian berarti putusnya perkawinan, yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri atau berhenti berlaki-bini (suami istri) sebagaimana diartikan dalam kamus besar Bahasa Indonesia di atas.

Perceraian menurut Subekti adalah “Penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu”. Jadi pengertian perceraian menurut Subekti adalah penghapusan perkawinan baik dengan putusan hakim atau tuntutan Suami atau istri. Dengan adanya perceraian, maka perkawinan antara suami dan istri menjadi hapus. Namun Subekti tidak menyatakan pengertian perceraian sebagai penghapusan perkawinan itu dengan kematian atau yang lazim disebut dengan istilah “cerai mati”.⁹⁷

⁹⁵*Ibid*, h. 165

⁹⁶Lihat *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974*

⁹⁷Muhammad Syaifudin, *Hukum Perceraian*, Palembang : Sinar Gravika, 2012, h. 20

Adapun pengertian dini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu dini adalah sebelum waktunya.⁹⁸ Strategi pencegahan perceraian dini semakin maksimal bila anggota masyarakat turut serta berperan aktif dalam pencegahan perceraian dini disekitar mereka. Sinergi antara pemerintah dan masyarakat merupakan jurus terampuh sementara ini untuk mencegah terjadinya perceraian dini sehingga kedepannya diharapkan tidak ada lagi korban akibat perceraian dini tersebut dan anak-anak Indonesia bisa lebih optimis dalam menatap masa depannya kelak.

Yang dimaksud penulis tentang perceraian dini adalah putusnya pernikahan antara suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan atau perkawinan menurut agama islam dan undang undang perkawinan, usia pernikahan dini yang dimaksudkan penulis dengan usia pernikahan antara 0 bulan sampai dengan 12 bulan, 1 tahun sampai dengan 2 tahun dan 2 tahun sampai dengan 3 tahun, suami yang akan menceraikan isterinya (cerai talak) atau isteri yang menceraikan suaminya (cerai gugat), mengajukan permohonan secara lisan maupun tertulis untuk memanggil para pihak yang bersengketa (bercerai) kemudian diberikan arahan dan penasihatn kepada kedua belah pihak tentang perkawinan dan perceraian, serta akibat bila terjadinya perceraian. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi perpisahan suami istri yang cepat atau dini.

⁹⁸W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, h. 356

4. Pengertian Kantor Urusan Agama menurut Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor : 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama:

Pasal 1:

- (1) Kantor Urusan agama yang selanjutnya disingkat KUA adalah Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jendral Bimbingan asyarakat Islam yang melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di Bidang Urusan Agama Islam.
- (2) KUA kecamatan berkedudukan di Kecamatan.
- (3) KUA kecamatan dipimpin oleh Kepala⁹⁹

Dari pengertian tersebut, KUA sebagai instansi vertikal (non otonomi) dan merupakan unit kerja terdepan di Kementerian Agama RI yang melaksanakan sebagian dari tugas-tugas pemerintahan di bidang Agama, khususnya agama Islam yang wilayah operasionalnya berada di tingkat Kecamatan, sebab KUA secara langsung berhadapan dengan masyarakat.¹⁰⁰ Tugas utamanya adalah untuk melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kota atau Kabupaten dibidang Bimbingan Masyarakat Islam (BIMAS) di wilayah Kecamatan. Kantor Urusan Agama disingkat KUA yang penulis maksudkan adalah di wilayah Kabupaten Katingan yang meliputi KUA Kecamatan Katingan Kuala, Kecamatan Katingan Hilir dan KUA Kecamatan Katingan Tengah.

⁹⁹Kementerian Agama RI, *Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor: 36 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama*

¹⁰⁰Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji Departemen Agama RI, *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*, Jakarta : Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji, 2003), Cet. 3, h.10.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian mengambil tempat di KUA Kecamatan Katingan Kuala, KUA Kecamatan Katingan Hilir dan KUA Kecamatan Katingan Tengah.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini adalah dimulai dari pembuatan proposal hingga menjadi tesis memerlukan waktu enam bulan dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

TABEL 2
WAKTU PENELITIAN

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
		Minggu
1	Menyusun proposal	4
2	Seminar proposal	4
3	Menyusun instrument penggali data	4
4	Menggali data	4
5	Mengolah dan menganalisa data	4
6	Menyusun laporan hasil penelitian	4

B. Latar Penelitian

Latar penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan secara singkat tentang strategi pencegahan perceraian dini di Kantor Urusan Agama se Kabupaten Katingan sesuai dengan tujuan dan pendirian dan kehadiran Kantor Urusan Agama, maka Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Kuala, Katingan Hilir dan Katingan Tengah saat ini kehadirannya sangat berperan

terutama dalam pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk, serta pelayanan bimbingan keluarga sakinah, intinya adalah pelayanan pernikahan dan bimbingan keluarga sakinah untuk mencegah dan menghindarkan terjadinya perceraian, khususnya di wilayah Kabupaten Katingan.

C. Metode dan Prosedur Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian ini adalah penelitian hukum empiris¹⁰¹ (*empirical legal research*) atau Penelitian *Socio-legal* (*Socio-Legal Research*) mengkaji tentang strategi yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan dalam usaha pencegahan perceraian dini di Kabupaten Katingan. Penelitian ini mengambil di tiga KUA yaitu KUA Kecamatan Katingan Kuala, KUA Kecamatan Katingan Hilir dan KUA Kecamatan Katingan Tengah yang sudah melaksanakan strategi pencegahan perceraian dini dengan berbagai macam cara atau metode yang dilakukan.

Suratman dan Philips Dillah Mengatakan bahwa Penelitian sosial tentang hukum atau yang disebut dengan *sosial legal research* merupakan bagian dari penelitian hukum, tidak dapat disangkal bahwa yang sering menjadi topik didalam penelitian sosial legal adalah masalah efektivitas

¹⁰¹Pengistilahan konsep “*Penelitian Hukum Empiris*” masih dipertahankan sampai saat ini di beberapa fakultas hukum di Indonesia, khususnya Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dan tetap mengacu kepada buku referensi untuk melakukan penelitian hukum yang berjudul “Pengantar Penelitian Hukum” ditulis oleh Soerjono Soekanto. Mungkin mengingat bahwa beliau adalah seorang sarjana hukum dan *Master of Art* dibidang sosiologi maka wajar jika banyak tulisan-tulisannya yang berkaitan dengan hukum dan masyarakat/sosiologi hukum, karena beliau salah satu peletak dasar perkembangan disiplin tersebut berikut pengaruhnya dalam memperkenalkan metode penelitian hukum di hampir semua fakultas hukum di Indonesia.

aturan hukum, kepatuhan terhadap aturan hukum, peranan lembaga atau institusi hukum dalam penegakan hukum, implementasi aturan hukum, pengaruh aturan hukum terhadap kehidupan sosial atau sebaliknya.¹⁰²

Penelitian ini beda dengan penelitian hukum normatif. Sabian Ustman dalam bukunya *Metode Penelitian Hukum Progresif* menjelaskan perbedaan mendasar antara penelitian hukum empiris dengan penelitian hukum normatif sebagai berikut:

Ada perbedaan yang mendasar antara penelitian yang normatif (hukum sebagai fakta hukum) dan penelitian hukum sebagai fakta sosial (*social-legal*) terutama pada langkah-langkah yang dilakukan dalam hal mana langkah-langkah yang dilakukan penelitian yang normatif menekankan pada langkah-langkah spekulatif teoritis pada peristiwa hukum sedangkan langkah-langkah penelitian hukum sebagai fakta sosial (*social-legal*) yang menekankan pada pentingnya langkah-langkah observasi, pengamatan dan analitis yang bersifat empiris atau lebih dikenal dengan *social-legal research*. Penelitian hukum yang berparadigma hukum sebagai fakta sosial (*social-legal*) yang mana data hukumnya dieksplorasi dari proses interaksi hukum di masyarakat (*living law*).¹⁰³

Penelitian empiris yang dimaksudkan dapat mendeskripsikan dan menganalisis apa yang terjadi di lapangan dengan lebih jelas secara detail sehingga dapat dikumpulkan data akurat mengenai strategi pencegahan perceraian dini di Kabupaten Katingan. Kemudian di kaji dengan mentalaah dari Hukum fiqih, peraturan perundang-undangan di Indonesia dan teori-teori hukum terkait.

2. Pendekatan Penelitian

¹⁰²Suratman dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2013, h. 88

¹⁰³Sabian Utsman, *Metodelogi Penelitian Hukum Progresif; Pengembangan Permasalahan Penelitian Hukum, Aplikasi Mudah Membuat Proposal Penelitian Hukum*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2014) h. 2-3

Pendekatan dalam penelitian penulis menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan pencegahan perceraian dini di Kabupaten Katingan. Pater Mahmud Marzuki mengatakan bahwa :

Dalam pendekatan undang-undang peneliti perlu memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan,.... peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan oleh undang-undang.¹⁰⁴

Selain itu penulis juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dengan cara melakukan talaah terhadap kasus-kasus terjadinya perceraian dini di Kantor Urusan Agama Se Kabupaten Katingan. Menurut Peter Mahmud Marzuki yang menjadi kajian pokok didalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning* merupakan referensi bagi penyusun argumentasi dalam pemecahan isu hukum.¹⁰⁵

Pendekatan konseptual (*conceptual Approach*) menurut Peter Mahmud Marzuki mengatakan bahwa:

Dalam membangun konsep ia bukan hanya melamun dan mencari-cari dalam khayalan, melainkan pertama kali ia harus beranjak dari pandangn-pandangan dan dokrin-dokrin yang berkembang didalam ilmu hukum..... peneliti perlu merujuk prinsip-prinsip hukum.¹⁰⁶

¹⁰⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015) h.

¹⁰⁵*Ibid.* h. 134

¹⁰⁶*Ibid.* h. 177-178

Konsep yang dimaksud penulis dalam penelitian ini adalah konsep strategi Kantor Urusan Agama dalam pencegahan perceraian dini di Kabupaten Katingan.

3. Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian dalam penelitian kualitatif, peneliti wajib hadir di lapangan karena peneliti merupakan instrument utama (*the instrument of choice in naturalistic inquiry is the human*)¹⁰⁷ yang memang harus hadir sendiri secara langsung di lapangan untuk mengumpulkan data. Dalam memasuki lapangan, peneliti harus berhati-hati menjaga sikap agar terjadi iklim yang kondusif. Peneliti harus bisa menjalin komunikasi yang harmonis terutama dengan informan kunci yang dalam hal ini adalah kepala Kantor Urusan Agama se Kabupaten Katingan yaitu pada KUA Kecamatan Katingan Kuala, KUA Kecamatan Katingan Hilir dan KUA Kecamatan Katingan Tengah yang sudah melaksanakan stretegi pencegahan perceraian dini dengan berbagai macam cara atau metode yang dilakukan dalam pencegahan tersebut.

¹⁰⁷Yonna S. Lincoln and Egon G. Guba, *Naturalistic Inquiry*, California: Sage Publications, 1985, h. 236.

D. Data dan Sumber Data

1. Data

Data yang diambil dari penelitian ini adalah data yang relevan dengan fokus penelitian yakni tentang strategi pencegahan perceraian dini pada Kantor Urusan Agama se Kabupaten Katingan. Jenis data dari penelitian ini dapat dibedakan menjadi data primer,¹⁰⁸ data sekunder,¹⁰⁹. Adapun data primer diperoleh dari bentuk kata-kata atau ucapan lisan dan perilaku dari informan tentang strategi pencegahan perceraian dini pada Kantor Urusan Agama se Kabupaten Katingan. Sedangkan data sekunder merupakan data-data yang diperoleh melalui informan berupa dokumen-dokumen ataupun foto-foto ataupun benda-benda yang dapat dijadikan pendukung dalam informasi penelitian bagi peneliti.

2. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini terdiri dari dua yaitu manusia dan bukan manusia. Sumber data manusia yaitu berfungsi sebagai informan kunci dan data yang diperoleh melalui informan bersifat data lunak. Sedangkan sumber data yang bukan berasal dari bukan manusia berupa dokumen yang relevan dengan fokus penelitian seperti gambar, foto, catatan atau tulisan yang ada kaitannya dengan fokus penelitian, data yang

¹⁰⁸Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Lihat Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta, Bagian Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, 200, h. 55

¹⁰⁹Data skunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti. Artinya data ini merupakan data yang berasal dari tangan kedua, ketiga, dan seterusnya lihat *Ibid.* h. 56

diperoleh melalui dokumen bersifat data keras.¹¹⁰ Dalam hal ini peneliti berusaha menggali data yang akurat melalui kepala kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Kuala, Kecamatan Katingan Hilir dan Kecamatan Katingan Tengah.

E. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data di lapangan peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu, observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan peneliti.¹¹¹

Melalui teknik observasi, peneliti mencurahkan perhatian dan pengamatan pada kelompok yang ingin diteliti. Dengan tehnik ini juga peneliti memperoleh gejala-gejala berupa peristiwa di lapangan dengan melihat langsung tentang mengapa terjadinya perceraian dini serta strategi Kantor Urusan Agama se Kabupaten Katingan dalam pencegahan perceraian dini.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya dengan

¹¹⁰S. Nastioan, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Bandung: Tarsito, 2003, h. 55.

¹¹¹S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003, h. 158.

mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu.¹¹² Langkah-langkah wawancara dalam penelitian ini adalah (a). Menetapkan kepada siapa wawancara itu dilakukan, (b). Menyiapkan pokok-pokok masalah yang akan menjadi bahan pembicaraan, (c). Mengawali atau membuka alur wawancara, (d). Melangsungkan alur wawancara, (e). Menginformasikan hasil wawancara, (f). Menulis hasil wawancara ke dalam catatan lapangan, dan (g). Mengidentifikasi tindak lanjut hasil wawancara.¹¹³

Dari langkah-langkah wawancara di atas, peneliti berusaha mengumpulkan informasi yang jelas, mengungkap tentang mengapa terjadinya perceraian dini serta strategi pencegahan perceraian dini pada Kantor Urusan Agama se Kabupaten Katingan. Sehingga peneliti dapat memperoleh jawaban hasil dari penelitian ini dengan kepala Kantor Urusan Agama se Kabupaten Katingan yang sangat terkait dengan mengapa terjadinya perceraian dini serta bagaimana strategi Kantor Urusan Agama se Kabupaten Katingan dalam pencegahan perceraian dini.

3. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang berarti barang-barang tertulis. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi adalah pengambilan data dengan melalui dokumen-dokumen, dan lain sebagainya.¹¹⁴

¹¹²Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003, h. 180.

¹¹³Sanapiah Faisal, *Penelitian Kualitatif: Dasar-dasar dan Aplikasi*, Malang: Y3, 1990, h. 63.

¹¹⁴James P. Spradley, *Participant Observation*, New York: Holt Rinehart and Wiston, 1980, (Lihat Pula: Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, h. 135.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dokumentasi berarti pengumpulan, pemilihan, dan penyimpanan informasi dibidang pengetahuan, pemberian atau pengumpulan bukti-bukti dan keterangan.¹¹⁵ Dari beberapa pengertian di atas, dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mengambil data tertulis melalui dokumen-dokumen ataupun tulisan-tulisan yang berhubung dengan penelitian.

F. Prosedur Analisis Data

Menurut Moleong menyatakan “Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya”.¹¹⁶ Analisis data dilakukan secara bersamaan dengan saat proses penyusunan dan penafsiran data guna menyimpulkan penelitian, maka peneliti berpedoman kepada teknik analisis data versi Milles dan Huberman yang dikutip oleh Sugiyono bahwa teknik analisis data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan melalui beberapa tahapan yakni:

1. Pengurangan Data

Langkah ini dilakukan dengan memilih dan memilah antara sekian banyak data yang terkumpul, kemudian membedakan antara yang relevan dan bermakna, serta yang kurang relevan. Ini dilakukan agar data yang disajikan dapat sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Data yang

¹¹⁵Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2007, h. 240.

¹¹⁶Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian....* h. 178.

diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, kompleks dan rumit, maka diperlukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

Jazim Hamidi memahami dan menafsirkan bagaimana suatu teks itu dilahirkan oleh pengarangnya dan muatan apa yang ada dalam teks juga penafsir melahirkan kembali makna tersebut sesuai dengan situasi dan kondisi saat teks dibaca atau dipahami. Kesimpulannya hermeneutika harus selalu memperhatikan tiga komponen yaitu teks, konteks dan kontekstualisasi.¹¹⁷

2. Penampilan Data

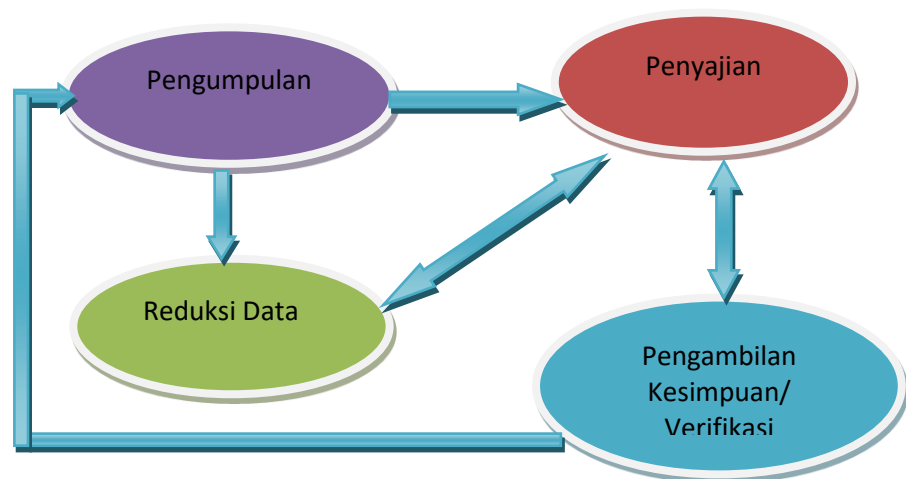
Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah melakukan penampilan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dengan bentuk uraian singkat, bagan dan sejenisnya. Dengan menampilkan data akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi.

3. Penarikan Kesimpulan

Langkah ini dilakukan dalam analisis data kualitatif adalah untuk penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di

¹¹⁷Jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum, Teori Penemuan Hukum Baru dengan Interpretasi Teks*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), h. 28-29

lapangan.¹¹⁸ Selanjutnya dalam pengambilan kesimpulan dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar Komponen komponen Analisis Data: Model Interaktif¹¹⁹

Dengan langkah analisis data di atas, maka peneliti dapat menemukan hasil penelitian yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan dengan benar tentang mengapa terjadinya perceraian dini serta strategi pencegahan perceraian dini pada Kantor Urusan Agama se Kabupaten Katingan.

G. Pemeriksaan Keabsahan Data

Keabsahan data adalah untuk menjamin bahwa semua data yang diamati dan diteliti peneliti relevan dengan apa yang sesungguhnya ada dalam kenyataan yang sebenarnya dan memang terjadi. Menurut Moeleong ada

¹¹⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2007, h. 35.

¹¹⁹Matthew B Milles and Michael A Hubberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Rohendi Rohidi Terjemahan), Jakarta: UI Press, 1992, h. 20.

beberapa kriteria yang dapat dilihat pada teknik keabsahan data penelitian kualitatif, yakni:¹²⁰

1. Kredibilitas

Kredibilitas atau penerapan derajat kepercayaan pada dasarnya menggantikan konsep validitas internal dan non kualitatif. Fungsi dari kredibilitas; *pertama*, penemuannya dapat dicapai, *kedua*, mempertunjukkan kredibilitas hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti. Kriteria kredibilitas dapat diperiksa dengan beberapa teknik pemeriksaan antara lain;

a. Perpanjangan Penelitian

Dengan perpanjangan penelitian, keikutsertaan peneliti pada latar penelitian memungkinkan kredibilitas terhadap data yang dikumpulkan, karena peneliti dapat mempelajari fenomena dari sebuah kasus, dapat menguji ketidakbenaran informasi dan juga peneliti dapat memperdalam informasi dari responden.

b. Triangulasi

Teknik triangulasi ada empat yaitu teknik triangulasi dengan sumber, metode, penyidik, dan teori. Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemeriksaan melalui sumber lainnya. Teknik triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik kredibilitas data sesuai informasi yang diperoleh

¹²⁰Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian....* h. 324

melalui waktu dan alat berbeda, hal ini dicapai dengan jalan: (1) Membandingkan hasil data observasi di lapangan berupa pengamatan, baik secara langsung kepada subyek penelitian maupun secara tidak langsung dengan informan dengan data-data hasil wawancara di lapangan dengan subyek penelitian. (2) Membandingkan data-data hasil wawancara, baik secara subyek penelitian atau informan dengan suatu dokumen yang didapat dari penelitian tersebut. (3) Membandingkan data yang diperoleh dari informan dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa.¹²¹ Trianggulasi ini dilakukan oleh peneliti untuk menyimpulkan keabsahan informasi tentang strategi pencegahan perceraian dini pada kantor urusan agama se Kabupaten Katingan.

2. Transferabilitas

Transferabilitas atau keteralihan dilakukan seorang peneliti dengan mencari dan mengumpulkan data kejadian empiris dalam konteks yang sama. Dengan demikian, peneliti bertanggung jawab untuk mengumpulkan data deskriptif secukupnya. Standar transferabilitas merupakan pertanyaan empirik yang tidak dapat dijawab oleh peneliti kualitatif sendiri, melainkan dijawab dan dinilai oleh pembaca laporan penelitian. Dalam prakteknya peneliti meminta kepada rekan akademisi dan praktisi di bidang pendidikan untuk membaca draf laporan penelitian ini dengan mengecek pemahaman mereka mengenai

¹²¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian*.... h. 178.

arah dalam penelitian ini terkait dengan strategi pencegahan perceraian dini pada kantor urusan agama se Kabupaten Katingan. Pada ranah ini, peneliti harus melakukan triangulasi untuk mengecek kebenaran dalam transferabilitas dalam penelitian ini.

3. Dependabilitas

Teknik ini menggunakan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Caranya dilakukan oleh auditor yang independen atau pembimbing untuk mengaudit keseluruhan aktivitas dalam melakukan penelitian terkait dengan strategi pencegahan perceraian dini pada kantor urusan agama se Kabupaten Katingan.

4. Konfirmabilitas

Konfirmabilitas atau menguji kepastian berarti menguji kebenaran hasil penelitian. Standar transferabilitas lebih terfokus pada audit kualitas dan kepastian hasil penelitian. Audit ini dilakukan bersama dengan audit kebergantungan. Dalam ranah ini penelitian dikatakan objektif apabila telah disepakati banyak orang terhadap pandangan, pendapat dan temuan penelitian tentang mengapa terjadinya perceraian dini serta strategi Kantor Urusan Agama se Kabupaten Katingan dalam pencegahan perceraian dini.

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum lokus Penelitian

Secara geografis Kabupaten Katingan berada di Provinsi Kalimantan Tengah yang terletak pada posisi $112^{\circ}00'$ - $113^{\circ}45'$ bujur timur dan $0^{\circ}20'$ - $3^{\circ}30'$ lintang selatan. Wilayah administrasi di Kabupaten Katingan berbatasan dengan beberapa wilayah lain, yaitu:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Malawi Provinsi Kalimantan Barat
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Gunung Mas, Kota Palangka Raya serta Kabupaten Pulang Pisau
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kabupaten Seruyan.

Secara administratif, luas Kabupaten Katingan adalah 17.800 Km^2 yang terdiri dari 13 (tiga belas) Kecamatan, 161 (seratus enam puluh satu) desa/kelurahan. Kecamatan-Kecamatan tersebut adalah :

- a. Kecamatan Katingan Kuala (14 Desa/2 Kelurahan),
- b. Kecamatan Mendawai (7 Desa/Kelurahan),
- c. Kecamatan Kamipang (9 Desa/Kelurahan),
- d. Kecamatan Tasik Payawan (8 Desa/Kelurahan),
- e. Kecamatan Katingan Hilir (8 Desa/2 Kelurahan),
- f. Kecamatan Tewang Sangalang Garing (9 Desa/1Kelurahan),

- g. Kecamatan Pulau Malan (14 Desa/Kelurahan),
- h. Kecamatan Katingan Tengah (15 Desa/1Kelurahan),
- i. Kecamatan Sanaman Mantikei (14 Desa/Kelurahan),
- j. Kecamatan Petak Malai (7 Desa/Kelurahan),
- k. Kecamatan Marikit (18 Desa/Kelurahan),
- l. Kecamatan Katingan Hulu (23 Desa/Kelurahan) dan
- m. Kecamatan Bukit Raya (11 Desa/Kelurahan).

Dilihat dari sisi topografi, Kabupaten Katingan dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu:

- a. Bagian selatan adalah daerah pantai dan rawa yang dipengaruhi oleh pasang surut, dengan ketinggian 0 – 50 m dari permukaan laut.
- b. Bagian tengah merupakan dataran dengan ketinggian 50 – 200 m dari permukaan laut.
- c. Bagian Utara merupakan perbukitan dengan ketinggian 200 – 1500 m dari permukaan laut.¹²²

¹²²Buku Putih Sanitasi Kabupaten Katingan Tahun 2014. h. 1

Berikut Peta Wilayah Kabupaten Katingan¹²³



Peta lokasi Kabupaten Katingan, Koordinat: 112⁰⁰' - 113⁴⁵'

Data jumlah penduduk menurut agama berjumlah 160.520 Jiwa jumlah penduduk tersebut diuraikan dalam tabel berikut:

TABEL 3
JUMLAH PENDUDUK
KABUPATEN KATINGAN BERDASARKAN AGAMA¹²⁴

No	Kecamatan	Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha
1	Katingan Kuala	19.725	832	28	5	
2	Mendawai	3.968	123	13	13	
3	Kamipang	6.741	267	14	161	
4	Tasik Payawan	4.764	756	562	1.845	
5	Katingan Hilir	23.991	5.386	612	1.302	
6	Twg. S. Garing	4.732	3.366	139	5.085	
7	Pulau Malan	5.216	1.832	207	2.389	

¹²³*Ibid.* h. 2

¹²⁴Dokumen Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Katingan

8	Katingan Tengah	17.087	5.972	766	3.184	
9	S. Mantikei	3.645	3.883	93	4.125	
10	Petak Malai	941	1.993	67	3.586	
11	Marikit	1.693	1.778	604	3.750	
12	Katingan Hulu	3.371	1.959	226	3.217	
13	Bukit Raya	1.065	1.567	331	1.559	
Jumlah		96.930	29.705	3.664	30.221	
Persentasi		60,38%	18,50%	32%	18,82%	

Wilayah Kabupaten Katingan terdiri dari 13 (tigabelas) kecamatan tidak semua kecamatan memiliki Kantor Urusan Agama (KUA). Menurut data dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Katingan, dua kecamatan yang belum memiliki kantor KUA, yaitu kecamatan Bukit Raya dan Kecamatan Petak Malai. Dari 13 (tigabelas) Kantor Urusan Agama yang akan diuraikan 3 (tiga) Kantor Urusan Agama sebagai sampel gambaran umum lokasi penelitian yaitu :

1. KUA Kecamatan Katingan Kuala

a. Sejarah singkat KUA Katingan Kuala

Kantor Urusan Agama Kecamatan adalah unit kerja yang melaksanakan sebagian tugas pokok Kementerian Agama Kabupaten Katingan di bidang urusan agama Islam. Sebagai salah satu unit kerja di lingkungan Kantor Kementerian Agama unit kerja Kantor Wilayah Kementrian Agama Propinsi, KUA merupakan salah satu unit kerja

Kantor Kementrian Agama Kabupaten Katingan berkedudukan di Kecamatan Katingan Kuala.

KUA Kecamatan Katingan Kuala terletak di wilayah kelurahan Pegatan Hulu Kecamatan Katingan Kuala. Tepatnya di Jl. Pantai RT. II No.21 KUA Katingan Kuala resmi didirikan pada tahun 1973 dengan menempati bangunan dengan panjang 15 m, lebar 10 m dan luas 150 m², dengan luas tanah 40 m². Berdiri sejak tahun 1973 dan pembangunan Kantor Urusan Agama tahun 1984.¹²⁵

Adapun batas wilayah KUA Kecamatan Katingan Kuala sebelah utara berbatasan dengan kecamatan Mandawai, sebelah timur dengan sungai Katingan, sebelah selatan dengan laut Jawa dan sebelah barat dengan laut Jawa. Jumlah desa di wilayah Kecamatan Katingan Kuala ada 16 (enamblas) desa. Sedangkan jumlah penduduknya ada 20.461 jiwa yang terdiri dari 10.626 penduduk laki-laki dan 9.836 penduduk perempuan. Dengan luas wilayah 141.360 Ha.¹²⁶

b. Visi, Misi dan Motto

Adapun misi Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Kuala terwujudnya pelayanan berkualitas, tertib administrasi, taat azas dan kehidupan umat beragama yang kondusif.

Sedangkan visi Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Kuala yaitu :

a. Meningkatkan pelayanan nikah dan rujuk

¹²⁵Dokumen Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Kuala. h. 9

¹²⁶Dokumen Profil Kecamatan Katingan Kuala tahun 2016.

- b. Meningkatkan pelayanan zakat infaq sadaqah dan ibadah sosial
- c. Meningkatkan pelayanan kemasjidan
- d. Meningkatkan pelayanan BP-4
- e. Meningkatkan pelayanan ibadah haji
- f. Meningkatkan kerjasama lintas sektoral

Motto Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Kuala pelayanan kami bagian dari ibadah (*everythink we do it for the people service*)¹²⁷

c. Organisasi

KUA Kecamatan Katingan Kuala dipimpin oleh seorang Kepala KUA dan yang juga sekaligus sebagai Petugas Pencatat Nikah (PPN). Posisi ini diduduki oleh H. Anwar, S.HI. berikut tabel kepala KUA Kecamatan Katingan Kuala dari tahun 1973 sampai 2017

TABEL 4
DATA KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA
KECAMATAN KATINGAN KUALA¹²⁸

No.	Kepala KUA	Tahun	Masa Kerja
1.	Abdul Hamid	1973 – 1984	11
	Sayuti Malik, BA	1984 – 1992	7

¹²⁷Loc. Cit. h. 10

¹²⁸Ibid. 10

2.			
3.	Muhammad Isra	1992 - 1993	1
4.	Drs. Darlan	1993 - 2004	10
5.	Moh. Kariansyah, S.Ag	2004 – 2007	2
6.	H. Rusdiannor, HMA, S.Ag	2007 – 2012	6
7.	H. ANWAR, S.H.I	2012 - sekarang	5

Dalam menjalankan tugasnya, Kepala KUA Kecamatan Katingan Kuala memiliki 3 (tiga) Pegawai, 14 (empatbelas) orang penghulu, dan 8 (delapan) orang Penyuluh Agama Islam (PAI) non PNS dengan data sebagai berikut:

TABEL 5

**DATA PEGAWAI KANTOR URUSAN AGAMA
KECAMATAN KATINGAN KUALA¹²⁹**

No	Nama	TEMPAT TGL LAHIR	T M T
1.	H. Anwar, S.H.I	Pasar Jati, 04 Februari 1977	1 Jan 2005
2.	Abdul Khair, S.HI	Parebok, 15 Juli 1979	1 Jan 2003
3.	Supiannor	Pegatan, 27 Meret 1993	1 Jan 2015

**TABEL 6
DATA PEMBANTU
PEGAWAI PENCATAT NIKAH (P3N)
KANTOR URUSAN AGAMA KEC. KATINGAN KUALA¹³⁰**

No	Nama	TEMPAT TGL LAHIR	WILAYAH KERJA
1	Mulyani	Pegatan, 5 Feb 1957	Pegatan Hulu
2	Hasyim	Pegatan, 10 Nop 1955	Kp. Tengah
3	Juremi	Trenngalek, 6 Mei 1945	Jaya Makmur
4	Sukimin	Sragen, 17 Juli 1956	Subur Indah
5	Ah. Saekhoni Lasa	Cilacap, 08 Juni 1974	Singam Raya
6	M. Sumirin	Ponorogo, 14 Mei 1973	Bangun Jaya

¹²⁹Ibid. h. 25

¹³⁰Dokumen Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Kuala.

7	Habibullah	Jember, 13 Feb. 1983	Kp. Baru
8	Habibullah	Kendal, 4 Feb 1946	Setia Mulia
9	Abdul Khair, S.HI	Parebok, 15 Juli 1979	Selat Bening
10	Misran	Kandangan, 16-05-1971	Sungai Kaki
11	Riyadmi	Amuntai, 06 April 1977	Sbgu. Jaya
12	Wasilan	Kabumen, 7-03-1959	Makmur Utama
13	Fendi	Ciamis, 10 April 1944	Bumi Subur
14	Jahman	Kendal, 4 Feb 1946	Bakung Raya

TABEL 7

DATA PENYULUH AGAMA ISLAM NON PNS
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN
KATINGAN KUALA¹³¹

No	Nama	TEMPAT TGL LAHIR	WILAYAH KERJA
1	Fathul Bari	Martapura, 09 Maret 1974	Pegatan Hulu
2	Ahmad Sayuti	Balimau, 01 Desember 1983	Kampung Tengah
3	Supriyono, S.Pd.I	Jaya Makmur, 26 Juni 1990	Jaya Makmur
4	Syahrudin	Pegatan, 04 Februari 1968	Setia Mulia

¹³¹Dokumen Urais Kementerian Agama Kabupaten Katingan tahun 2017.

5	Irwanto, SH.I	Pegatan, 10 Juni 1979	Pegatan hilir
6	Habibullah	Jember, 13 Februari 1983	Kampung Baru
7	Samsudin, S.Pd.I	Kuala Kapuas, 29 September 1986	Bumi Subur
8	Piani Susilawati, SH.I	Cempaka Mulia Timur, 06 Juni 1985	Jaya Makmur
9	Karimadin	Tasik Malaya, 27 Juli 1973	Bangun jaya

d. Fungsi dan tugas

Sesuai dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 18 Tahun 1975 tentang susunan Organisasi dan tata kerja Departemen Agama yang telah di ubah dan di sempurnakan terakhir dengan keputusan Menteri Agama RI Nomor 75 Tahun 1984 menjelaskan bahwa Kantor urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya di sebut KUA Kecamatan adalah instansi Departemen Agama di Kecamatan yang melaksanakan sebagai tugas Kementerian Agama Kabupaten/Kota dibidang urusan agama Islam.¹³²

Dalam melaksanakan tugas-tugas dibidang dokumentasi dan statistik KUA Kecamatan Katingan Kuala di tuangkan dalam formolir F1 s/d F17, yang meliputi :

¹³²Dokumen Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Kuala. h.12

1). Tata persuratan

- a) Menerima surat
- b) Mengarahkan surat
- c) Menata kearsipan surat
- d) Melakukan pengetikan dan pengadaan surat

Pada tahun 2016 telah di agendakan beberapa jenis surat yang telah dikelola oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Kuala, terdiri dari surat masuk sebanyak 66 surat dan surat keluar dan rekomendasi sebanyak 79 surat.

2). Penghimpunan, penggandaan dan mendokumentasikan peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan seperti keputusan-keputusan, intruksi baik dari pusat maupun daerah.

3). Mengirim serta membuat laporan data menurut sifatnya :

- a) Bersifat bulanan seperti F1, F2, model I dan II
- b) Bersifat semester seperti model F3, F4, F5, F7, F8, F16 dan F17
- c) Bersifat tahunan seperti F9, F10, F11, F12, F13, F14 dan F15.

4). Membuat berbagai macam papan nama seperti :

- a) Struktur organisasi
- b) Visi, misi dan motto
- c) Monografi data penduduk
- d) Data Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N)
- e) Data grafik nikah, talak, cerai dan rujuk

- f) Proses pernikahan
 - g) Data bulanan nikah, talak, cerai dan rujuk
 - h) Jadwal kegiatan
- 5). Melakukan penjilidan berkas Pemeriksaan Nikah, Laporan Bulanan dan sibir (tanda terima kutipan akta nikah)¹³³

e. Program kerja KUA Katingan Kuala

Adapun program kerja KUA Kecamatan Katingan Kuala yaitu :

- 1) Meningkatkan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N). menjadwalkan pertemuan dan rapat bulanan dengan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) untuk merajut kepercayaan dan selalu membangun kualitas silaturahmi yang cerdas dan berkualitas. Melakukan pemeriksaan nikah berlapis, sebagai sebuah upaya antisipasi dari berbagai penipuan data.
- 2) Melakukan pendataan ulang masjid, langgar, musholla secara terus menerus, safari Ramadhan selalu dijadikan sarana silaturrahmim antara Ulama, Umara dan umat. Pendataan zakat disetiap akhir Ramadhan berkerjasama dengan tim pengumpulan Data zakat infaq dan sadaqah Kabupaten Katingan.
- 3) Pembinaan perkawinan sebuah perjuangan menata masyarakat majemuk yang hidup rukun dan harmonis, berperadaban modern, maju dan sejahtera serta memiliki spiritualitas tinggi berdasarkan

¹³³Ibid. h. 13

agama dan kepercayaan masing-masing maka peran KUA sangat penting. Hal ini harus dimulai dari tatanan terkecil dengan satu kesadaran jadikan ***“Rumah tangga kita sebagai miniatur bangsa”*** Maka BP4 salah satu peran penting untuk membekali calon (calon pengantin) dalam membangun rumah tangga mereka menuju keluarga yang sakinah mawaddah warrohmah.

- 4) Memberikan penyuluhan bahayanya dan dampak buruknya pernikahan dibawah tangan yang tidak sedikit menyesatkan berbagai persoalan, maka penerangan akan pentingnya pernikahan yang syar'i dan juga Administrasi agar lebih berkualitas. Sosialisasi kepada masyarakat tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam berbagai Kesempatan.
- 5) Melaksanakan bimbingan manasik haji sejak tahun 2007 KUA Kecamatan Katingan Kuala telah diberikan kewenangan untuk melakukan pendataan dan pelaksanaan manasik haji bagi calon jamaah haji di wilayah Kecamatan Katingan Kuala yang diikuti oleh calon jamaah haji yang meliputi :
 - a) Tahun 2013 berjumlah 12 orang calon jamaah haji
 - b) Tahun 2014 berjumlah 6 orang calon jamaah haji
 - c) Tahun 2015 berjumlah 2 orang calon jamaah haji
 - d) Tahun 2016 berjumlah 7 orang calon jamaah haji
 - e) Tahun 2017 berjumlah 8 orang calon jamaah haji

6) Sosialisasi produk halal di KUA Kecamatan Katingan Kuala sebatas penyampaian informasi tentang berbagai produk yang sudah mendapatkan sertifikai halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang kami siapkan pada saat khatib khutbah jum'at dan di pengajian ibu-ibu.¹³⁴

2. KUA Kecamatan Katingan Hilir

a. Sejarah singkat KUA Katingan Hilir

Kua Kecamatan Katingan Hilir didirikan pada tahun 1970 dengan kabupaten Kotawaringin Timur, pada tahun 1984 kantor Urusan Agama dibangun di Jl. Kehutanan RT. 2 RW. 1 Kelurahan Kasongan Lama Kecamatan Katingan Kuala, tahun 2003 pemekaran kabupaten Kotawaringin Timur salah satunya Kabupaten Katingan dengan ibukota Kasongan, pada tanggal 8 Oktober 2015 Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir pindah tempat ke Jl. Soekarno Hatta RT. 13 Komplek Perkantoran Kereng Humbang menempati bangunan baru dari dana Surat Beharga Sukuk Negara (SBSN).¹³⁵

Secara geografis Kecamatan Katingan Hilir berada di Kabupaten Katingan yang terletak pada posisi 112⁰⁰'-113⁰⁴⁵' bujur timur dan 0⁰²⁰'-3⁰³⁰' lintang selatan. Wilayah administrasi di Kecamatan Katingan Hilir luas wilayah 66.300 ha. berbatasan dengan beberapa wilayah lain, yaitu:

1) Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Cempaga Hulu (Kotim)

¹³⁴Dokumen Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Kuala.

¹³⁵Dokumen Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir. h. 8

- 2) Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Rakumpit (Palangka Raya)
- 3) Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Tasik Payawan
- 4) Sebelah barat berbatsan dengan Kecamatan Tewang Sangalang Garing¹³⁶

Jumlah penduduk Kecamatan Katingan Hilir sebanyak 30.276 orang. Dengan komposisi penduduk laki-laki 15.457 jiwa, perempuan 14.819 jiwa, yang tersebar dalam 2 (dua) Kelurahan dan 6 (enam) desa.

¹³⁶*Ibid.* h. 5

TABEL 8
DATA PENDUDUK KECAMATAN KATINGAN HILIR¹³⁷

No	Nama Desa / Kelurahan	Penduduk Laki-laki	Penduduk Perem.	Jumlah Jiwa
1	Kasongan Lama	4.925	4.730	9.655
2	Kasongan Baru	1.299	1.298	2.597
3	Tumbang Liting	729	541	1.270
4	Telangkah	1.576	1.563	3.139
5	Hampalit	4.941	4.694	9.635
6	Tewang Kadamba	435	378	813
7	Tumbang Liting	729	541	1.270
8	Desa Talian Kereng	926	850	1.776
JUMLAH		15.457	14.819	30.276

b. Visi dan misi

Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir memiliki visi unggul dalam pelayanan dan bimbingan menuju masyarakat Kecamatan Katigan Hilir yang agamis sadar hukum dan beraklaq mulia

Sedangkan misi Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir yaitu:

- 1) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan prima
- 2) Melaksanakan dan mengoptimalkan bimbingan kepenghuluan, zakat, pangan halal, kemitraan hisab ru'yat, haji, kemesjidan dan keagamaan lainnya.
- 3) Memberdayakan dan melaksanakan organisasi semi pemerintah (LPTQ, BP4, P2A)

¹³⁷*Ibid.* h. 5

- 4) Update data zakat, infaq, shadaqah, rumah ibadah dan informasi madrasah, pondok pesantren dan data-data lainnya
- 5) Melaksanakan dan meningkatkan teknis dan administrasi wakaf
- 6) Meningkatkan pembengunan keluarga melalui pemahaman dan pengembangan nilai ajaran agama terwujudnya keluarga sakinah
- 7) Meningkatkan koordinasi dan kerja sama lintas sektoral¹³⁸

b. Organisasi

Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir dipimpin oleh seorang kepala KUA sekaligus sebagai penghulu dan sebagai Petugas Pencatat Nikah (PPN). Berikut tabel kepala KUA dari tahun 1970 sampai dengan 2017.

TABEL 9
DATA KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA
KECAMATAN KATINGAN HILIR¹³⁹

No.	Nama Kepala Kantor	Tahun	Masa Kerja
1.	Ijamrah	1973 – 1984	11
2.	Mahmud A	1984 – 1996	12
3.	Baso Ramli, BA	1996 - 1998	2
4.	Marhat	1998 - 2000	2
5.	Syafruddin, HI	2000 - 2002	2
6.	H. Taufikurrahman, S.Ag	2002 – 2005	3
7.	Drs. Jadwal Sahlan	2005 – 2007	3
8.	Moh. Qariansyah, S.Ag	2007 – 2012	5
9.	Wahid, SH	2012 – 2013	1
10.	Ruslan	2013 – 2015	2
11.	H. Rusdiannor, S.Ag	2015 – Sekarang	2

¹³⁸*Ibid.* h. 9

¹³⁹*Ibid.* h. 10

Dalam menjalankan tugasnya, kepala KUA Kecamatan Katingan Hilir memiliki 4 (empat) pegawai, 2 (dua) pembantu pegawai pencatat nikah, 4 (empat) penyuluh agama islam PNS dan 11 (sebelas) orang penyuluh agama islam Non PNS dengan data sebagai berikut :

TABEL 10
DATA PEGAWAI KANTOR URUSAN AGAMA
KECAMATAN KATINGAN HILIR¹⁴⁰

No	Nama	TEMPAT TGL LAHIR	T M T
1.	H. Rusdiannor, S.Ag	Bapinang Hulu, 16-10-1977	3 Feb 2015
2.	Dehen Pantar Nusantara, S.EI	Ciamis, 09-10-1986	1 Jan 2013
3.	Norhidayah	Kasongan, 10-11-1983	1 Jan 2011
4.	Muhammad Jaini	Kasongan, 06-01-1996	3 Feb 2015

TABEL 11
DATA PEMBANTU
PEGAWAI PENCATAT NIKAH (P3N)
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KATINGAN HILIR¹⁴¹

¹⁴⁰*Ibid.* h. 11

¹⁴¹*Ibid.* h. 11

No	Nama	TEMPAT TGL LAHIR	WILAYAH KERJA
1	H. Sa'ya	Banjarmasin, 5 Feb 1957	Desa Hampalit
2	Angau Narusin	Katingan, 10 Nop 1955	Desa Talangkah

TABEL 12

DATA PENYULUH AGAMA ISLAM PNS
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KATINGAN HILIR¹⁴²

No	Nama	TEMPAT TGL LAHIR	WILAYAH KERJA
1	Moh. Qusiri, S.Ag	Bapinang Hilir, 09 Juli 1974	Kecamatan Katingan Hilir
2	Ahdi Elhami, S.Ag	Amuntai, 01-12-1973	Kecamatan Katingan Hilir
3	Hakim Luthfi, S.Ag	Martapura, 30-01-1973	Kecamatan Katingan Hilir
4	Masidah, S.Ag	Barabai, 11-09-1977	Kecamatan Katingan Hilir

TABEL 13

DATA PENYULUH AGAMA ISLAM NON PNS
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KATINGAN HILIR¹⁴³

No	Nama	Tempat Tgl Lahir	Wilayah Kerja
1	Hj. Siti Rahmah, S.Ag	Kuala Kapuas, 09 Juli 1974	Kasongan Lama
2	Ainur Rahmah, S.Sos.I	Tbg. Sanamang, 01-12-1993	Kasongan Lama
3	Musyafa'ah, S.Kom.I	Banjarmasin,	Desa

¹⁴²*Ibid.* h. 11

¹⁴³*Ibid.* h. 12

		30-01-1991	Hampalit
4	Hudari, SH.I	Bapinangn Hilir, 02-10-1978	Desa Talian Kereng
5	Abdul Hadi	Muara Kuman, 03-01-1974	Desa Talian Kereng
6	H. Muhammad Arsyad	Paminggir, 10-08-1962	Desa Hampalit
7	Daud	Muara Lahai, 08-05-1988	Desa Hampalit
8	Norainah, S.Pd.I	Kasongan, 28-03-1994	Kasongan Lama
9	Anwar Ilahi, S.Pd.I	Jaya Kelapa, 02-06-1986	Desa Talian Kereng
10	H. Srianto Sabdi, S.Sos	Bingkat, 11-05-1971	Desa Hampalit
11	Yayuk Aspiah	Kasongan, 06-10-1980	Kasongan Lama

c. Fungsi dan Tugas

Sesuai dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 18 Tahun 1975 tentang susunan organisasi dan tata Kerja Departemen Agama yg telah di ubah dan di sempurnakan terakhir dengan keputusan Menteri Agama RI Nomor 75 Tahun 1984 menjelaskan bahwa Kantor urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya di sebut KUA Kecamatan adalah

instansi Departemen Agama di Kecamatan yang melaksanakan sebagai tugas kementerian Agama Kabupaten/Kota dibidang urusan Agama Islam.

Dalam melaksanakan tugas-tugas dibidang dokumentasi dan statistik KUA Kecamatan Katingan Kuala di tuangkan dalam formolir F1 s/d F17, yang meliputi :

1). Tata persuratan

- a) Menerima surat
- b) Mengarahkan surat
- c) Menata kearsipan surat
- d) Melakukan pengetikan dan pengadaan surat

Pada tahun 2016 telah di agendakan beberapa jenis surat yang telah dikelola oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Kuala, terdiri dari surat masuk sebanyak 166 surat dan surat keluar dan rekomendasi sebanyak 239 surat.

2). Penghimpunan, penggandaan dan mendokumentasikan peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan seperti keputusan-keputusan, intruksi baik dari pusat maupun daerah.

3). Mengirim serta membuat laporan data menurut sifatnya :

- a) Bersifat bulanan seperti F1, F2, model I dan II
- b) Bersifat semester seperti model F3, F4, F5, F7, F8, F16 dan F17
- c) Bersifat tahunan seperti F9, F10, F11, F12, F13, F14 dan F15.

4). Membuat berbagai macam papan nama seperti :

- a) Struktur organisasi
- b) Visi, misi dan motto
- c) Monografi data penduduk
- d) Data Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N)
- e) Data grafik nikah, talak, cerai dan rujuk
- f) Proses pernikahan
- g) Data bulanan nikah, talak, cerai dan rujuk
- h) Jadwal kegiatan

5). Melakukan penjilidan berkas pemeriksaan nikah, laporan bulanan dan sibir (tanda terima kutipan akta nikah)¹⁴⁴

e. Program Kerja KUA Katingan Hilir

Adapun program kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir meliputi :

- 1) Bidang sarana dan prasarana kantor
 - a) Rehabilitasi gedung balai nikah
 - b) Menata ruang arsip
 - c) Menata ruang karyawan
 - d) Menata ruang dapur
 - e) Menata ruang pelaminan
 - f) Menata halaman kantor

¹⁴⁴Ibid. h. 14

- g) Membuat plang KUA, PPAIW,¹⁴⁵ MUI,¹⁴⁶ P2A,¹⁴⁷ BAZ,¹⁴⁸ DMI,¹⁴⁹ BP4,¹⁵⁰ LPTQ.¹⁵¹

2). Bidang Profesionalisme Personil KUA

- a) Mengusulkan tenaga penghulu dan pelaksana di KUA Katingan Hilir
- b) Mengikuti pemilihan KUA teladan
- c) Membina karyawan KUA mengenai undang-Undang perkawinan
- d) Sosialisasi pengoprasian kitab virtual
- e) Silaturahmi antar karyawan¹⁵²

3) Bidang administrasi

- a) Membuat komputerisasi data
- b) Melengkapi buku-buku administrasi KUA
- c) Menjilid daftar pemeriksaan nikah
- d) Membuat papan struktur organisasi KUA, grafik peristiwa nikah, monografi KUA, data statistik KUA dan papan peta wilayah Katingan Hilir
- e) Membuat visi misi dan motto KUA
- f) Mengarsifkan keluar masuk surat

¹⁴⁵Penjabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW)

¹⁴⁶Majelis Ulama Indonesia (MUI)

¹⁴⁷Pedoman Pengamalam Agama (P2A)

¹⁴⁸Badan Amil Zakat (BAZ)

¹⁴⁹Dewan Mesjid Indonesia (DMI)

¹⁵⁰Badan Pembinaan Pelestraian Pembinaan Perkawinan (BP4)

¹⁵¹Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ)

¹⁵²Ibid. h.14 dan 15

- g) Membuat buku administrasi dan laporan keuangan
 - h) Membuat standarisasi pelayanan prima terhadap masyarakat
 - i) Menyimpan data melalui program website dalam rangka persiapan membuka akses internet
- 4) Bidang kepenghuluan
- a) Menerima pendaftaran nikah dan rujuk
 - b) Meneliti daftar pemeriksaan nikah
 - c) Menulis buku akta nikah
 - d) Memeriksa, mengawasi, dan menghadiri dan mencatat peristiwa nikah dan rujuk
 - e) Mengisi formulir NB, N dan pembuatan laporannya
 - f) Menulis buku akta nikah
 - g) Membantu mencari fatwa hukum khususnya mengenai perkawinan dan rujuk
 - h) Membuat brosur tentang persyaratan dan proses pencatatan NR
 - i) Membuat laporan peristiwa nikah dan rujuk ¹⁵³
- 5) Bidang keluarga sakinah
- a) Menyusun kepengurusan BP.4 Tingkat Kecamatan Katingan Hilir
 - b) Menyelenggarakan penataran calon pengantin setiap hari kerja.
 - c) Mengadakan penasihat 10 (sepuluh menit) menit pada saat pernikahan jika situasi dan kondisi memungkinkan.

¹⁵³Ibid. h. 16

- d) Memberikan penasihatn kepada keluarga yang sedang mengalami krisis rumah tangga.
 - e) Mendata keluarga sakinah sewilayah Kecamatan Katingan Hilir
 - f) Sosialisasi program keluarga sakinah dalam pengajian-pengajian
 - g) Mengadakan pembinaan keluarga sakinah teladan untuk mengikuti pemilihan tingkat nasional
6. Bidang zakat, wakaf, infaq, sodaqoh dan ibadah sosial
- a) Sosialisasi zakat, wakaf, infaq dan sodaqoh
 - b) Mengumpulkan dan menyalurkan zakat
 - c) Mengadakan pembinaan masyarakat tentang sadar zakat
 - d) Mendata tanah wakaf se-Kecamatan Katingan Hilir
 - e) Membuat akta ikrar wakaf
 - f) Mendata tanah wakaf
 - g) Mendata tempat ibadah dan pendidikan
 - h) Pengajian bulanan se-Kecamatan Katingan Hilir
7. Di bidang ibadah haji
- a) Membentuk pengurus Ikatan Persaudaraan Haji (IPHI) baru tingkat Kecamatan Katingan Hilir.
 - b) Mendata calon jama'ah haji se wilayah Kecamatan Katingan Hilir tahun 2017
 - c) Mengadakan bimbingan manasik haji
 - d) Melepas calon jamaah haji se wilayah Kecamatan Katingan Hilirtahun 2017

- e) Mengadakan bimbingan pelestarian haji mabrur
- 8. Di bidang kemasjidan dan hisab ru'yah
 - a) Memberdayakan fungsi masjid
 - b) Membina khotib jum'at se wilayah Kecamatan Katingan Hilir
 - c) Menyusun khuthbah Idul Fitri dan Idul Adha
 - d) Membentuk kepengurusan baru Dewan Kerja Mesjid (DMI) Katingan Hilir
 - e) Mendata Masjid se wilayah Kecamatan Katingan Hilir
 - f) Sosialisasi arah qiblat
 - g) Membuat jadwal waktu solat¹⁵⁴
- 9. Di bidang produk halal
 - a) Sosialisasi produk halal
 - b) Mendata tempat penyembelihan hewan
 - c) Mendata tempat pemeliharaan hewan
 - d) Mengadakan pembinaan terhadap masyarakat tentang cara-cara penyembelihan hewan yang benar
- 10. Di bidang lintas sektoral
 - a) Bekerjasama dengan Kecamatan di bidang data kependudukan, PHBI,¹⁵⁵ LPTQ,¹⁵⁶ sosialisasi undang-undang perkawinan, tata cara perkawinan, perwakafan dan lain-lain.

¹⁵⁴Ibid. h. 17

¹⁵⁵Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)

¹⁵⁶Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ)

- b) Bekerjasama dengan MUI di bidang kerukunan ummat beragama, sosialisasi arah qiblat, penataran calon pengantin, sosialisasi zakat wakaf, sertifikasi label halal, pembinaan khotib jum'at, tata cara penyembelihan yang benar dan pembinaan mental ummat
- c) Bekerjasama dengan kepolisian tentang bahaya narkoba, sosialisasi undang-undang pornografi dan keamanan lingkungan.
- d) Bekerjasama dengan UPTD¹⁵⁷ Pendidikan di bidang data pendidikan, sosialisasi aturan perkawinan terhadap pelajar dan pengaruh kawin muda.
- e) Bekerja sama dengan Dinas Kesehatan tentang kesehatan reproduksi, imunisasi calon pengantin dan Keluarga Berencana dan produk halal.
- f) Bekerjasama dengan IPHI¹⁵⁸ di bidang Bimbingan manasik dan pelestarian haji mabrur.
- g) Bekerjasama dengan Dewan Mesjid Indonesia (DMI) di bidang pemakmuran dan pemberdayaan fungsi masjid, pendataan tempat-tempat ibadah.
- h) Bekerjasama dengan LPTQ di bidang pembinaan Qori dan Qori'ah
- i) Bekerjasama dengan para pengusaha di bidang pengembangan sarana dan prasarana kantor KUA¹⁵⁹

¹⁵⁷Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

¹⁵⁸Ikatan Persaudaraan Haji (IPHI)

Jumlah penduduk Kecamatan Katingan Hilir sebanyak 29.389 orang. Dengan komposisi penduduk laki-laki 6.716 jiwa, perempuan 15.632 jiwa, yang tersebar dalam 1 (satu) Kelurahan dan 15 (limabelas) desa, dengan rincian sebagai berikut:

TABEL 14
DATA PENDUDUK KECAMATAN KATINGAN TENGAH¹⁶²

No	Desa / Kelurahan	Jlh kk	Menurut Jenis Kelamin		Jlh
			Lk	Pr	
1	Tbng Lahang	379	747	705	1.452
2	Tewng Panjang	73	121	108	229
3	Petak Puti	51	83	89	172
4	Telok	316	669	619	1.288
5	Samba Danum	857	2.432	2.238	4.670
6	Samba Kahayan	668	1.736	1.576	3.312
7	Samba Bakumpai	525	841	839	1.680
8	Samba Katung	720	1.343	1.337	2.680
9	Napu Sahur	106	193	197	390
10	Batu Badinding	546	1.340	1.057	2.397
11	Rantau Asem	338	665	635	1.300
12	Mirah Kalanaman	1.384	2.819	2.280	5.099
13	Tbng Kalemei	352	700	631	1.331
14	Tbng Marak	181	1.482	1.040	2.522
15	Tbng Hangei	122	272	237	509
16	Tbng Pareyei	98	189	169	358
	JUMLAH	6.716	15.632	13.757	29.389

Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Tengah yang terletak di Jalan Swaka Insan No. 025 Desa Samba Danum, Status Tanah hak milik dengan No Sertifikat: Ap.75/1 s/d2/593.3.32/VIII-1984 luas 439 M² Luas Tanah untuk Bangunan 80 M², Luas Tanah Kosong 359 M².¹⁶³

¹⁶²*Ibid.* h. 7

¹⁶³*Ibid.* h. 7

b. Visi dan misi

Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Tengah memiliki visi memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat Kecamatan Katingan Tengah.

Sedangkan misi Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Tengah yaitu:

- 1) Meningkatkan kualitas layanan administrasi nikah dan rujuk
- 2) Meningkatkan kualitas pemahaman dan pengembangan keluarga sakinah serta sosialisasi produk makanan halal.
- 3) Meningkatkan kualitas pelayanan ibadah sosial dan pengembangan pemberdayaan Zakat, Wakaf, infaq dan sadaqah
- 4) Optimalisasi pensertifikatan tanah wakaf
- 5) Pemberdayaan lembaga-lembaga keagamaan dalam proses pembangunan
- 6) Memperkokoh kerukunan umat beragama atas dasar saling menghormati
- 7) Meningkatkan pembinaan jamaah haji
- 8) Mendorong berkembangnya masyarakat madani yang dilandasi nilai-nilai religi dan nilai-nilai luhur budaya daerah.

c. Organisasi

Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Tengah dipimpin oleh seorang kepala KUA sekaligus sebagai penghulu dan sebagai Petugas Pencatat Nikah (PPN). Berikut tabel kepala KUA dari tahun 1976 sampai dengan 2017.

TABEL 15
DATA KEPALA
KANTOR URUSAN AGAMA
KECAMATAN KATINGAN TENGAH¹⁶⁴

No.	Nama Kepala Kantor	Tahun	Masa Kerja Tahun
1.	Imam Marhum	1976 – 1980	4
2.	Ahmad Mahali	1980 – 1984	4
3.	Mulkani	1984 - 1991	7
4.	Slamet Tugasman	1991 – 1993	2
5.	Murhan	1993 – 1995	2
6.	Muhran	1995 – 1997	2
7.	Mahlan	1997 – 2010	14
8.	Ruslan	2010 – 2013	3
9.	Drs. Khairl Anwar	2013 – Sekarang	4

Dalam menjalankan tugasnya, kepala KUA Kecamatan Katingan Tengah memiliki 4 (empat) pegawai, dan 8 (delapan) orang penyuluh agama islam non PNS dengan data sebagai berikut :

¹⁶⁴Ibid. h. 10

TABEL 16

DATA PEGAWAI KANTOR URUSAN AGAMA
KECAMATAN KATINGAN TENGAH¹⁶⁵

No	Nama	Gol/Ruang	Jabatan
1.	Drs. Khairil Anwar	Penata / IIIc	Kepala
2.	Sugie	Penata Tk. I / IIIb	JFU /TU
3.	Nurlaila, S.Ag	Penata / IIIC	Penyuluh
4.	Jaki Mubarak, S.Sy	Tenaga Honorer	Operator

TABEL 17

DATA PENYULUH AGAMA ISLAM NON PNS
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KATINGAN
TENGAH¹⁶⁶

No	Nama	Tempat Tgl. Lahir	Wilayah Kerja
1	Raihanah, S.Pd.I	Lok Baintan, 09 September 1984	Samba Kahayan
2	Wardah, S.Pd.I	Teluk Binjai, 25 Maret 1991	Samba Kahayan
3	Mujtahidin, S.Sos.I	Jaya Karet, 11 Januari 1985	Samba Kahayan
4	Endang Abdullah	Bekasi,	Batu

¹⁶⁵*Ibid.* h. 11

¹⁶⁶Dokumen URAIS Kementerian Agama Kabupaten Katingan

		05 Agustus 1981	Badinding
5	Rusnadi	Mataram, 12 Juni 1957	Mirah Kalanaman
6	Sauki Mukhtar	Jaya Karet, 16 September 1985	Samba Danum
7	Edy Surianto	Tumbang Samba, 07 September 1981	Samba Bakumpai
8	Sadriannur	Muara Lahai, 08-05-1988	Samba Danum

a. Fungsi dan Tugas

Sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor : 517 tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan

BAB I Kedudukan, Tugas,dan Fungsi :

Pasal; 1

- (1) Kantor Urusan Agama Kecamatan berkedudukan di wilayah kecamatan dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota yang dikoordinasikan oleh Seksi Urusan Agama Islam/Bimas dan Kelembagaan Agama Islam.
- (2) Kantor Urusan Agama dipimpin oleh Kepala.

Pasal 2

Kantor Urusan Agama Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dibidang Urusan Agama Islam di wilayah.

Adapun fungsi-fungsi sebagai berikut :

- 1) Menyelenggarakan Statistik dan Dokumentasi
- 2) Menyelenggarakan surat-menyurat, Kearsipan, Pengetikan, dan Rumah Tangga Kantor Urusan Agama
- 3) Melaksanakan pencatatan Nikah dan Rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, dan ibadah sosial dan membina kesejahteraan keluarga.¹⁶⁷

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama tersebut sebelumnya, maka pada tahun anggaran 2016 ini, kami telah membuat program kerja sebagai berikut :

- 1) Pokok-Pokok Program meliputi :
 - a) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kantor.
 - b) Meningkatkan profesionalisme personil KUA
 - c) Meningkatkan tertib administrasi
 - d) Meningkatkan pelayanan dibidang kepenghuluan
 - e) Meningkatkan pelayanan dibidang BP.4 dan keluarga sakinah
 - f) Meningkatkan pelayanan dibidang zakat, wakaf, infaq, sodaqoh dan ibadah sosial.
 - g) Meningkatkan pelayanan dibidang ibadah haji
 - h) Meningkatkan pelayanan dibidang kemasjidan dan hisab ru'yah
 - i) Meningkatkan pelayanan dibidang produk halal
 - j) Meningkatkan pelayanan dibidang lintas sektoral¹⁶⁸
- 2) Program Unggulan

¹⁶⁷Ibid. h. 13

¹⁶⁸Ibid. h. 13

Dari beberapa program kerja yang dicanangkan KUA Kecamatan Katingan Tengah, ada tiga program unggulan yang akan dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Katingan Tengah yang semuanya mengarah kepada terwujudnya pelayanan prima terhadap masyarakat meliputi:

- a) Komputerisasi pelayanan nikah. Menyadari keterbatasan tenaga karyawan KUA yang kurang, sementara tugas-tugas rutin semakin banyak, maka salah satu solusi untuk memberikan pelayanan yang prima terhadap masyarakat adalah dengan sistem komputerisasi, termasuk dalam memberikan pelayanan fatwa dan hukum.
- b) Profesionalisme personil KUA. Salah satu untuk terbentuknya karyawan yang profesional, kami memprogramkan supaya karyawan KUA Kecamatan Katingan Tengah dapat mengikuti segala kegiatan yang dilaksanakan dalam masyarakat seperti, khutbah jumat dan Lain-lain.
- c) Akses internet. Hal ini sangat penting untuk mengikuti perkembangan arus teknologi informasi. Dengan program ini diharapkan mobilitas pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan, karena segalanya bisa diakses lewat Website KUA.¹⁶⁹

3) Rincian program bidang sarana dan prasarana kantor meliputi :

¹⁶⁹Ibid. h. 14

- a) Rehabilitasi gedung balai nikah
- b) Menata ruang arsip
- c) Menata ruang karyawan
- d) Menata ruang dapur
- e) Menata halaman kantor¹⁷⁰

4) Bidang profesionalisme personil KUA meliputi:

- a) Mengusulkan tenaga penghulu dan pelaksana di KUA Katingan Tengah
- b) Mengikuti pemilihan KUA teladan
- c) Membina karyawan KUA mengenai undang undang perkawinan

3. Bidang administrasi

- a) Membuat komputerisasi data
- b) Melengkapi buku-buku administrasi KUA
- c) Menjilid daftar pemeriksaan nikah
- d) Membuat papan struktur organisasi KUA, grafik peristiwa nikah, monografi KUA, data statistik KUA dan papan peta wilayah Kec. Katingan Tengah
- e) Membuat visi misi dan motto KUA
- f) Mengarsipkan keluar masuk surat
- g) Membuat buku administrasi dan laporan keuangan
- h) Membuat standarisasi pelayanan prima terhadap masyarakat

¹⁷⁰Ibid. h. 14

- i) Menyimpan data melalui program website dalam rangka persiapan membuka akses internet¹⁷¹

4. Bidang kepenghuluan

- a) Menerima pendaftaran nikah dan rujuk
- b) Meneliti daftar pemeriksaan nikah
- c) Menulis buku akta nikah
- d) Memeriksa, mengawasi, dan menghadiri dan mencatat peristiwa nikah dan rujuk
- e) Mengisi formulir NB, N dan pembuatan laporannya
- f) Menulis buku akta nikah
- g) Membantu mencari fatwa hukum khususnya mengenai perkawinan dan rujuk
- h) Membuat brosur tentang persyaratan dan proses pencatatan NR
- i) Membuat laporan peristiwa nikah dan rujuk¹⁷²

5. Bidang keluarga sakinah

- a) Menyusun kepengurusan BP.4 Tingkat Kecamatan Katingan Tengah
- b) Menyelenggarakan penataran calon pengantin.
- c) Mengadakan penasihatan pada saat pernikahan jika situasi dan kondisi memungkinkan.
- d) Memberikan penasihatan kepada keluarga yang sedang mengalami krisis rumah tangga.

¹⁷¹Ibid. h. 15

¹⁷²Ibid. h. 15

- e) Mendata keluarga sakinah sewilayah Kecamatan Katingan Tengah
 - f) Sosialisasi program Keluarga Sakinah dalam pengajian-pengajian¹⁷³
6. Bidang zakat, wakaf, infaq, sodaqoh dan ibadah sosial meliputi:
- a) Sosialisasi zakat, wakaf, infaq dan sodaqoh
 - b) Mengumpulkan dan menyalurkan dana zakat
 - c) Mengadakan pembinaan masyarakat tentang sadar zakat
 - d) Mendata tanah wakaf se-Kecamatan Katingan Tengah
 - e) Membuat akta ikrar wakaf
 - f) Mendata tempat ibadah dan pendidikan¹⁷⁴
7. Di bidang ibadah haji
- a. Mendata calon jama'ah haji se wilayah Kecamatan Katingan Tengah tahun 2016
 - b. Mengadakan bimbingan manasik haji
 - c. Melepas calon jamaah haji se wilayah Kecamatan Katingan Tengah tahun 2016
 - d. Mengadakan bimbingan pelestarian haji mabrur.¹⁷⁵

B. Temuan Penelitian

Data hasil penelitian yang disajikan dalam tulisan ini adalah merupakan temuan penelitian yang diperoleh peneliti dari sumber data dengan teknik

¹⁷³*Ibid.* h. 15

¹⁷⁴*Ibid.* h. 16

¹⁷⁵*Ibid.* h. 16

wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data itu yang berhubungan dengan rumusan masalah yang diajukan pada bab I yaitu:

1. Terjadinya perceraian dini di Kabupaten Katingan

a. Terjadinya Perceraian dini di Kecamatan Katingan Kuala

Berdasarkan penelitian lapangan yang penulis lakukan terhadap 5 (lima) kasus tentang terjadinya perceraian dini di Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Kuala sangat beragam. Di antaranya;

1) Menurut H. Anwar, S.H.I kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan

Katingan Kuala bahwa terjadinya perceraian dini sebagai berikut:

....Tidak ada kecocokan lagi berumah tangga, sudah tidak ada kasih sayang lagi, ketika dijodohkan oleh orang tua mereka di paksa kawin akhirnya terjadi perpisahan, suaminya tidak mampu memberi nafkah kepada isterinya, suaminya pemabuk, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, campur tangan kedua orang pada saat membina rumah tangga....¹⁷⁶

2) Menurut N seorang perempuan, pekerjaan swasta dengan alamat Jl.

Pelita Kelurahan Pegatan Hulu Kecamatan Katingan Kuala, dengan

pendidikan S1 jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD)

bahwa terjadinya perceraian dini itu disebabkan beberapa

permasalahan, berikut penjelasannya:

Tanggal 15 Juli 2015 kami melaksanakan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Kuala, pada bulan februari 2016 kami telah berambangan (berpisah) usia perkawinan kami hanya 7 bulan, menurut saya pernikahan kami ini adalah pernikahan dini, faktor terjadinya perceraian dini adalah faktor

¹⁷⁶Data wawancara dengan H. Anwar, S.H.I (Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Kuala), Jum'at tanggal 13 Oktober 2017

orang tua masing-masing ikut campur dalam rumah tangga, yang paling menginginkan perceraian kami ini adalah kedua orang tua, orang tua kami tidak pernah memberikan nasihat kepada kami berdua, namun kami sudah berkonsultasi dengan Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Kuala, perceraian kami masih dalam proses ke Pengadilan Agama¹⁷⁷

- 3) Menurut ESD seorang perempuan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pendidikan S1, yang berlamat Jl. Imam Bonjol Kelurahan Pegatan Hilir Kecamatan Katingan Kuala bahwa terjadinya perceraian dini itu disebabkan beberapa permasalahan, berikut penjelasannya:

Pernikahan kami dilaksanakan pada bulan tanggal 4 Januari 2014 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Selat dengan nomor rigester 109/109.I/2014, rumah tangga kami bertahan kurang lebih 2 (dua) tahun, maret 2016 kami melaksanakan perceraian, pernikahan kami dalam usia 2 (dua) tahun menurut saya termasuk pernikahan dini, perceraian kami ini terjadi disebabkan karena saya merasa pasangan saya tidak bertanggung jawab, segala tanggung jawab rumah tangga diserahkan kepada saya, pihak keluarga yaitu orang tua dan saudara saya ikut memberikan saran kepada saya, apabila memang tidak bisa dipertahankan karena sudah beberapa kali diberikan kesempatan kepada suami, tetapi tidak ada perubahan maka orang tua dan saudara saya memberi dorongan untuk memutuskan perceraian, yang menginginkan perceraian ini adalah saya sendiri karena saya merasa terzholomi maka saya memutuskan berkeras untuk meminta perceraian, orang tua saya tidak pernah memberikan nasihat karena saya dianggap dewasa untuk menyelesaikan masalah, saya sudah berkonsultasi ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Kuala tentang status saya ini apakah sudah diceraikan atau di talak secara hukum Islam, perceraian kami sudah diputuskan oleh Pengadilan Agama Sampit dengan nomor putusan 0597/AC/2016/PA/Spt, tanggal 18 Oktober 2016.¹⁷⁸

- 4) Menurut F seorang perempuan, pekerjaan swasta pendidikan SLTP, yang berlamat Jl. Swadaya Kelurahan Pegatan Hulu Kecamatan Katingan Kuala menjelaskan:

¹⁷⁷Data wawancara dengan N. tanggal 14 Oktober 2017

¹⁷⁸Data wawancara dengan ESD. tanggal 13 Oktober 2017

Tahun 2016 kami melaksanakan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Kuala, selama satu tahun kami berumah tangga dan di karuniai seorang anak laki-laki, tahun 2017 terjadi perceraian, menurut saya usia perkawinan kami usia dini (seumur jagung) saya memutuskan untuk bercerai, terjadinya perceraian dini ini dengan alasan suaminya saya berzina disaat saya berkerja mencari nafkah, suami saya menghamili isteri orang juga pada saat saya berkerja, suami saya selingkuh disaat saya mencari nafkah, dari pihak keluarga ada memberikan nasihat dan masukan supaya saya tidak bercerai, yang paling menginginkan perceraian ini adalah saya sendiri, saya sudah pernah berkonsultasi dengan Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Kuala untuk mediasi, namun suami tidak bisa hadir dan kabur pada saat saya ke Kantor Urusan Agama, perceraian kami ini belum sampai ke Pengadilan Agama.¹⁷⁹

- 5) Seorang perempuan, yang bernama RLL, pekerjaan swasta pendidikan SLTP, yang berlatar Desa Kampung Tengah Kecamatan Katingan Kuala menyatakan bahwa:

Pernikahan kami pada bulan Oktober 2015 di kantor urusan agama Kecamatan Katingan Kuala, di rumah penghulu Hasyim desa Kampung Tengah, pada Agustus 2017 pada usia perkawinan kami selama 2 (dua) tahun dimana pernikahan kami ini termasuk pernikahan dini, saya memutuskan sendiri untuk menggugat cerai suami saya dengan alasan suami saya tidak lagi memberi nafkah, karena faktor ekonomi dan suami saya sering mabuk, orang tua saya memberi saran untuk tidak bercerai namun saya tetap melaksanakan gugat cerai, saya sudah konsultasi dengan penghulu desa kampung tengah diberi nasihat supaya tidak melaksanakan perceraian, perceraian saya ini sudah ada putusan dari Pengadilan Agama Sampit.¹⁸⁰

- 6) Seorang laki-laki, yang bernama HHA, pekerjaan swasta pendidikan S1, yang berlatar Jl. Merdeka Kelurahan Pegatan Hilir Kecamatan Katingan Kuala menjelaskan bahwa:

¹⁷⁹Data wawancara dengan F. tanggal 14 Oktober 2017

¹⁸⁰Data wawancara dengan RLL. tanggal 14 Oktober 2017

Pertengahan tahun 2015 tepatnya 15 Juli 2015 saya melaksanakan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Kuala, selama 6 (enam) bulan saya membina rumah tangga dengan isteri saya tepatnya awal Januari 2016 kami memutuskan untuk berpisah, walaupun usia perkawinan kami ini termasuk usia dini, bahkan buku nikah kami sampai saat ini belum kami ambil di Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Kuala, terjadinya perceraian kami ini dikarenakan faktor orang tua saya, orang tua saya selalu memberikan pengaruh supaya saya bercerai, yang paling menginginkan perceraian kami ini adalah keluarga saya sendiri, orang tua saya tidak pernah memberikan nasihat kepada saya bahkan memberi dorongan supaya saya cepat bercerai, saya belum pernah berkonsultasi ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Kuala, perceraian kami ini belum ke Pengadilan Agama.¹⁸¹

b. Terjadinya perceraian dini di Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir

Berdasarkan penelitian lapangan yang penulis lakukan terhadap 5 (lima) kasus yang telah terjadi perceraian dini di Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir.

Berikut ini hasil wawancara penulis dengan beberapa narasumber yang telah bercerai dimana usia perkawinan mereka dari 0 (nol) sampai dengan 3 (tiga) tahun, dengan bermacam-macam sebab terjadinya perceraian dini, berikut hasil wawancara penulis yaitu:

- 1) Menurut Abdul Karim, S.Sos.I kepala Kantor Urusan Agama yang mewilayahi kerja Kecamatan Katingan Hilir mengatakan bahwa banyak alasan terjadinya perceraian dini berikut hasil wawancara penulis:

¹⁸¹Data wawancara dengan HHA. tanggal 14 Oktober 2017

Saya mengetahui bahwa perceraian dini itu adalah pernikahan yang tidak lama antara 1 (satu) sampai dengan 7 (tujuh) tahun kemudian bercerai, kalau di kantor ini selama satu tahun paling banyak antara 1-7 kasus selama setahun dengan berbagai macam alasan diantaranya pada waktu menikah awalnya dipaksa atau dijodohkan pihak keluarga sehingga tidak saling mencintai kedua belah pihak, akibat pergaulan bebas, susah mencari pekerjaan terutama pihak suami atau yang bertanggung jawab tidak sanggup memberi nafkah kepada keluarganya, isteri atau suami melakukan perselingkuhan, sekarang jaman canggih bisa melalui media sosial, melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan campur tangan kedua orang pada saat membina rumah tangga¹⁸²

- 2) Seorang laki-laki Kelahiran Malang tanggal 02 Juni 1997, seorang laki-laki yang berinisial IM dengan pendidikan terakhir SLTP, beralamat jalan Tjilik Riwut KM. 16 desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan, tercatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir dengan nomor register 97/06/VII/2016, tanggal 14 Juli 2016¹⁸³ berikut hasil wawancara penulisan dengan inisial IM sebagai berikut:

Pertengahan tahun 2016 tepatnya 14 Juli 2016 saya melaksanakan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir, selama 3 (tiga) hari saya membina rumah tangga dengan isteri saya tepatnya 17 Juli 2017 kami memutuskan untuk berpisah, walaupun usia perkawinan kami ini termasuk usia dini hanya 3 (tiga) hari, terjadinya perceraian kami ini dikarenakan faktor tidak ada kecocokan serta pada saat pernikahan saya dipaksa, yang paling menginginkan perceraian kami ini adalah saya sendiri, orang tua saya selalu memberikan nasihat supaya saya tidak bercerai, saya sudah pernah berkonsultasi ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir untuk memberikan arahan langkah selanjutnya serta memberikan nasihat untuk mempertahankan pernikahan tapi saya tidak mau saya tetap ingin bercerai, selama tiga hari pernikahan kami, kami tidak pernah

¹⁸²Data wawancara dengan Bapak Abdul Karim, S.Sos.I

¹⁸³Dokumen Akta Cerai

melakukan hubungan suami isteri, perceraian kami ini sudah tercatat di Pengadilan Agama sampit.¹⁸⁴

- 3) Seorang perempuan, yang berinisial Z, pekerjaan swasta pendidikan SLTA, yang beralamat Jl. Bungai Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan, telah melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki yang berinisial DN, dengan nomor rigester 092/04/VI/2015¹⁸⁵ tanggal 01 Juni 2015, pernikahan mereka tidak terlalu lama dan terjadinya perceraian berikut hasil wawancara penulis:

Pernikahan kami pada tanggal 01 Juni 2015 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir, pernikahan kami tidak berjalan lama tepatnya pada bulan Desember 2015 saya memutuskan untuk bercerai dengan suami saya, pada usia perkawinan kami selama 6 (enam) bulan dimana pernikahan kami ini termasuk pernikahan dini, saya memutuskan sendiri untuk menggugat cerai suami saya dengan alasan tidak adanya kebahagiaan dalam membina rumah tangga, suami saya tidak lagi memberi nafkah, tidak ada lagi rasa senang didalam rumah tangga, meskipun kami sudah dikarunia anak seorang laki-laki, orang tua dan mertua saya memberi saran untuk tidak bercerai namun saya tetap melaksanakan gugat cerai, saya sering konsultasi dengan kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir untuk diberikan nasihat supaya tidak melaksanakan perceraian, kami berusaha lagi supaya tidak terjadi perceraian, namun saya tidak sanggup lagi, perceraian saya ini sudah ada putusan dari Pengadilan Agama Sampit. Dengan nomor 0274/AC/2017/PA/Spt. Tanggal 07 Juni 2017¹⁸⁶

- 4) Berinisial DR, seorang laki-laki pekerjaan swasta pendidikan SLTA, yang beralamat Jl. Tjilik Riwut Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan, telah melaksanakan pernikahan dengan seorang perempuan yang berinisial F, dengan nomor rigester 078/11/V/2015 tanggal 12

¹⁸⁴Data wawancara dengan IM. tanggal 1 Nopember 2017

¹⁸⁵Data Sistem Informasi Manajemen (SIMKAH) KUA Katingan Hilir 16 Oktober 2017

¹⁸⁶Data wawancara dengan RLL. tanggal 14 Oktober 2017

Mei 2015¹⁸⁷, pernikahan mereka tidak terlalu lama dan terjadinya perceraian berikut hasil wawancara penulis:

Kami melaksanakan pernikahan pada hari selasa tanggal 12 Mei 2015, pernikahan kami hanya mampu bertahan selama 3 bulan tepatnya pada bulan Agustus 2015 terjadi perceraian, pernikahan kami ini termasuk pernikahan dini, adapun alasan kami untuk bercerai karena tidak ada kecocokan, pekerjaan saya belum tetap, belum punya penghasilan yang cukup. Yang mengharap kami untuk bercerai adalah kami berdua, namun orang tua kami sudah memberi nasihat untuk tidak bercerai, namun yang menjalani hidup dan kehidupan adalah kami berdua, perceraian kami sudah terdaftar di Pengadilan Agama Sampit, tinggal menunggu akta cerainya saja.¹⁸⁸

- 5) Inisial DA, seorang perempuan pekerjaan swasta pendidikan SLTA, yang berlatar Jl. Palangka Raya Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan, berikut hasil wawancara penulis dengan inisial DA bahwa:

Pernikahn kami terjadi pada tanggal 15 Juli 2016 dengan nomor register 98/07/VII/2016, 1 (satu) bulan kemudian tepatnya pertengahan bulan Agustus 2016 terjadi perceraian, pernikahan kami ini termasuk pernikahan dini karena hanya berusia satu bulan, saya memutuskan untuk berpisah karena suami saya kembali keagama asalnya (Kristen), orang tua saya sudah memberi nasihat untuk mempertahankan rumah tangga kami, sepengetahuan saya bahwa nikah beda agama itu tidak dibolehkan. Bahkan saya sudah berkonsultasi ke kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir KUA juga menyatakan bahwa perkawinan kami putus secara otomatis karena beda agama, KUA menyarankan saya untuk menyelesaikan perceraian kami ke Pengadilan Agama sampit.¹⁸⁹

- 6) Inisial AZ, seorang laki-laki pekerjaan swasta pendidikan SLTA, yang berlatar Jl. Palangka Raya Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten

¹⁸⁷Data Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) KUA Kecamatan Katingan Hilir, Tanggal, 16 Oktober 2017

¹⁸⁸Dokumen wawancara dengan DR, 31 Oktober 2017

¹⁸⁹Data wawancara dengan DA tanggal 31 Oktober 2017

Katingan, pernikahan mereka tercatat di KUA Katingan Hilir dengan nomor rigester 009/09/I/2015 tanggal 6 Januari 2015,¹⁹⁰ berikut hasil wawancara penulis dengan inisial AZ bahwa:

Pernikahan kami terjadi pada tanggal 6 Januari 2015, 9 (sembilan) bulan kemudian tepatnya pertengahan bulan September 2015 terjadi perceraian, pernikahan kami ini termasuk pernikahan dini karena hanya berusia sembilan bulan, saya memutuskan untuk berpisah karena kami tidak lagi memiliki kehormonisan dalam rumah tangga dikarenakan kami dijodohkan oleh kedua orang tua kami. Orang tua kami sudah memberi nasihat untuk mempertahankan rumah tangga kami, Bahkan saya sudah berkonsultasi ke kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir, KUA memberikan penasihatan bahwa kami diminta untuk mempertahankan rumah tangga kami, perceraian kami sudah tercatat Pengadilan Agama sampit dengan nomor perkara 0309/AC/2017/PA/Spt, tanggal 21 Juni 2017.

c. Terjadinya perceraian dini di Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Tengah

Berdasarkan penelitian lapangan yang penulis lakukan terhadap terjadinya perceraian dini di Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Tengah yang disajikan dalam tulisan ini adalah merupakan temuan penelitian yang diperoleh peneliti dari sumber data dengan teknik wawancara, observasi, dan dengan dokumentasi dengan 5 (lima) kasus yaitu :

1) Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Tengah Bapak Drs. Khairil Anwar mengatakan bahwa :

Perceraian dini itu adalah perkawinan yang usia perkawinannya antara 0 (nol) sampai 3 (tiga) tahun kemudian terjadinya perceraian, permasalahan yang terjadi di KUA Katingan Tengah

¹⁹⁰Data Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) KUA Kecamatan Katingan Hilir

dalam setahun bisa terjadi antara 1 (satu) sampai dengan 7 (tujuh) perkara terjadinya perceraian dini dengan alasan terjadinya perceraian yaitu salah satu pihak berbuat zina, menjadi pemabuk, pematik, penjudi atau lain sebagainya yang sulit disembuhkan. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuan, salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara lebih dari lima tahun, ada juga masalah uang jujur tidak ada kesepakatan antara mempelai wanita dan pria, pihak suami ada keterbelakangan mental, pihak perempuan bersikap atau berperilaku seperti anak-anak dan ada pula salah satu pihak pindah agama (murtad)¹⁹¹

2) Seorang Laki-laki, yang inisial N bin A, pekerjaan swasta pendidikan

SLTP, yang beralamat Jl. Samba Kahayan Kecamatan Katingan

Tengah Kabupaten Katingan menyatakan bahwa:

29 September 2014 kami melaksanakan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan simpang empat Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan dengan nomor register 278/16/IX/2014, kehidupan rumah tangga kami berjalan selama 3 (tiga) bulan kami membina rumah tangga dengan seorang perempuan dengan inisial LA binti RE, tepatnya awal Januari 2015 saya merasa tidak sanggup lagi membina rumah tangga kami memutuskan untuk berpisah, walaupun usia perkawinan kami ini termasuk usia dini, terjadinya perceraian kami ini dikarenakan faktor orang tua kami, orang tua kami menjodohkan kami berdua untuk menikah, awalnya kami setuju, setelah beberapa bulan setelah nikah isteri saya tidak setuju, selama 3 (tiga) bulan saya tidak bisa berhubungan badan dengan isteri saya, isteri tidak mau melayani sebagaimana kewajiban seorang isteri terhadap suaminya. kami pernah berkonsultasi ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Tengah supaya memberikan upaya supaya kami tidak melaksanakan perceraian, perceraian kami ini sudah ada putusan Pengadilan Agama Sampit dengan nomor putusan 164/AC/2015/PASpt.¹⁹²

3) Inisial DRS, seorang perempuan pekerjaan swasta pendidikan SLTA,

yang beralamat Jl. Samba Katung Kecamatan Katingan Tengah

¹⁹¹Data Hasil wawancara dengan Drs. Khairil Anwar. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Tengah, 30 Oktober 2017

¹⁹²Data wawancara dengan HHA. tanggal 14 Oktober 2017

Kabupaten Katingan, berikut hasil wawancara penulis dengan inisial

DRS bahwa:

Pernikahan kami terjadi pada tanggal 13 Mei 2017 dengan nomor register 39/17/II/2016 dengan nomor buku nikah BB. 2629672, 1 (satu) tahun kemudian tepatnya awal bulan september 2017, pernikahan kami ini termasuk pernikahan dini karena hanya berusia satu tahun, saya memutuskan untuk berpisah karena suami saya kembali keagama asalnya (Hindu), orang tua saya sudah memberi nasihat untuk mempertahankan rumah tangga kami bahkan saya sudah berkonsultasi ke kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Tengah KUA juga menyatakan bahwa perkawinan kami putus secara otomatis karena beda agama, KUA menyarankan saya untuk menyelesaikan perceraian kami ke Pengadilan Agama sampit.¹⁹³

4) Seorang laki-laki, yang inisial HA bin A, pekerjaan swasta pendidikan

SLTA, yang beralamat Jl. Samba Katung Kecamatan Katingan

Tengah Kabupaten Katingan dengan hasil wawancara sebagai berikut:

Kami melaksanakan pernikahan pada tanggal 10 Mei 2017 dengan nomor register 76/10/V/2017 dengan nomor buku nikah KH. 7211593, pernikahan kami berjalan selama 4 (empat) bulan kemudian tepatnya awal bulan september 2017 terjadi perceraian, pernikahan kami ini termasuk pernikahan dini karena hanya berusia empat bulan, saya memutuskan untuk berpisah karena isterinya mempunyai sifat dan perilaku seperti anak-anak padahal usianya 18 (delapanbelas) tahun, orang tua saya sudah memberi saran kepada saya untuk mempertahankan rumah tangga tetapi saya tidak sanggup lagi, bahkan saya sudah berkonsultasi ke kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir, namun isteri saya tidak mau menghadapi panggilan dari BP4 KUA Katingan Tengah, KUA menyarankan saya untuk menyelesaikan permasalahan saya ini secara kekeluargaan dulu kalau tidak bisa selesai baru ke Pengadilan Agama.¹⁹⁴

5) Inisial N, seorang perempuan pekerjaan swasta pendidikan SLTP,

yang berlamat Jl. Samba Danum Belakang SMP 1 Katingan Tengah

¹⁹³Data wawancara dengan DRS tanggal 30 Oktober 2017

¹⁹⁴Data wawancara dengan HA, tanggal 30 Oktober 2017

Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan menyatakan bahwa:

Saya melaksanakan pada tanggal 27 Juni 2016 jam 20.00 WIB kemudian pada tanggal 28 Juni 2016 jam 05.00 WIB suami saya kabur dari rumah orang tua saya dijemput oleh mertua saya pernikahan kami ini hanya bertahan 9 (sembilan) jam padahal pernikahan kami sudah tercatat di KUA Kecamatan Katingan Tengah dengan nomor register 80/01/VII/2016 dengan nomor buku nikah KH. 5152073, pernikahan kami ini termasuk pernikahan sangat dini karena hanya berusia sembilan jam, suami saya memutuskan perkawinan ini dengan alasan tidak sanggup membeikan jujuran yang sudah disepakati sebanyak 50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah) bahkan cincin emas seberat 5 gram sebagai maskawin dibawa lari oleh suami saya, saya sudah berkonsultasi ke kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Tengah untuk meminta jalan keluar, KUA Katingan Tengah memberikan nasihat dan arahan kepada saya untuk mempertahankan keluarga kami.¹⁹⁵

- 6) Seorang perempuan berinisial ELD, pekerjaan swasta pendidikan SLTP, yang beralamat Jl. Samba Danum Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan, berikut hasil wawancara penulis sebagai berikut:

Kami melaksanakan pernikahan pada tanggal hari Jum'at tanggal 12 Pebruari 2016 dengan nomor register 19/06/II/2016 dengan nomor buku nikah KH. 5152011, pernikahan kami berjalan selama 6 (enam) hari kemudian tepatnya pada tanggal 18 Pebruari 2016 terjadi perceraian, pernikahan kami ini termasuk pernikahan dini karena hanya berusia 6 (enam) hari saja, suami saya memutuskan untuk berpisah karena keluarga suami saya tidak setuju kami melaksanakan pernikahan dan suami saya belum memiliki pemikiran yang dewasa, orang tua saya sudah memberi saran kepada saya untuk mempertahankan rumah tangga tetapi pihak keluarga suami saya tetap bersi keras untuk cerai, saya bahkan saya sudah berkonsultasi ke kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir KUA namun isteri saya tidak mau menghadari panggilan dari BP4 KUA Katingan Tengah, KUA menyarankan saya untuk menyelesaikan permasalahan saya ini secara

¹⁹⁵Data wawancara dengan N, tanggal 30 Oktober 2017

kekeluargaan dulu kalau tidak bisa selesai baru ke Pengadilan Agama.¹⁹⁶

2. Strategi pencegahan perceraian dini Kantor Urusan Agama di Kabupaten Katingan

a. Strategi pencegahan perceraian dini Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Kuala

Berdasarkan penelitian lapangan yang penulis lakukan terhadap kehadiran KUA Kecamatan Katingan Kuala mengenai strategi pencegahan perceraian dini pada dasarnya di dirintis semenjak berdirinya pada tahun 1973 sampai sekarang KUA Kecamatan Katingan Kuala terletak di wilayah keluarahan Pegatan Hulu Kecamatan. Tepatnya di Jl. Pantai RT. No. 21 dengan menempati bangunan dengan panjang 15 m, lebar 10 m dan luas 150 m², dengan luas tanah 40 m².

Dari hasil wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Katingan Kuala Bapak H. Anwar, S.H.I :

Mengetahui bahwa perceraian dini adalah usia perkawinan dari 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun setelah akad nikah di ucapkan, perceraian dini tidak terlalu banyak dalam setahun ada 9 (Sembilan) sampai dengan 10 (sepuluh) pasang yang melakukan perceraian dini.¹⁹⁷

Melihat fakta lapangan yang penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwa peran KUA Kecamatan Katingan Kuala dalam strategi pencegahan perceraian dini adalah sebagai berikut:

¹⁹⁶Data wawancara dengan ELD, tanggal 30 Oktober 2017

¹⁹⁷Data wawancara Kepala KUA Kecamatan Katingan Kuala H. Anwar, S.H.I tanggal 13 Oktober 2017

- 1) Memberikan nasihat penerangan dan tuntunan pada yang berkepentingan, seperti calon pengantin, pasangan bermasalah, keluarga calon pengantin, keluarga pasangan bermasalah dan masyarakat umum. Baik melalui acara penasihatnik, wawancara dan dialog umum, wawancara dan dialog khusus, dan melakukan kunjungan rumah (*home-visit*).
- 2) Mengadakan upaya-upaya yang dapat memperkecil atau meminimalisasi terjadinya perceraian.
- 3) Memberikan bantuan moril kepada calon pengantin, pasangan bermasalah, dan masyarakat umum dalam menyelesaikan kesulitan-kesulitan permasalahan perkawinan dan juga kerumah tanggaan secara umum.¹⁹⁸

Strategi yang dilakukan pihak KUA Kecamatan Katingan Kuala untuk mencapai tujuan tersebut, adalah berpedoman kepada Anggaran Dasar BP.4 Bab III tentang upaya dan usaha adalah sebagai berikut:

- 1) Memberikan bimbingan, penasihatnik dan penerangan mengenai nikah, talak, cerai dan rujuk kepada masyarakat.
- 2) Memberikan bimbingan bimbingan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga.
- 3) Memberikan bantuan mediasi kepada para pihak yang berpekar di Pengadilan Agama.

¹⁹⁸*Ibid.* H. Anwar, S.H.I

- 4) Memberikan bantuan advokasi dalam mengatasi masalah perkawinan, keluarga dan perselisihan rumah tangga di Pengadilan Agama.
- 5) Menurunkan terjadinya perselisihan serta perceraian, poligami yang tidak bertanggung jawab, pernikahan di bawah umur dan tidak tercatat;
- 6) Bekerjasama dengan instansi, lembaga dan organisasi yang memiliki kesamaan tujuan baik di dalam maupun di luar negeri.
- 7) Menerbitkan dan menyebarluaskan majalah perkawinan dan keluarga, buku, brosur dan media elektronik yang dianggap perlu.
- 8) Menyelenggarakan kursus calon pengantin, penataran, pelatihan, diskusi, seminar dan kegiatan sejenis berkaitan dengan perkawinan dan keluarga.
- 9) Menyelenggarakan pendidikan keluarga untuk peningkatan, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan *akhlakul karimah* dalam rangka membina keluarga sakinah.
- 10) Berperan aktif dalam kegiatan lintas sektoral yang bertujuan membina keluarga sakinah;¹⁹⁹

Dari beberapa peran dan strategi yang dilakukan KUA Kecamatan Katingan Kuala, ada kontribusi khusus atau paling utama dan terus dilakukan saat ini, yaitu:

- 1) Program Pra Nikah

¹⁹⁹*Ibid.* H. Anwar, S.H.I

KUA Kecamatan Katingan Kuala melalui Kepala KUA, Penghulu dan Penyuluh Agama Islam melakukan atau mengadakan penataran atau lebih dikenal dengan istilah suscatin (kursus calon pengantin) atau penasihatn calon pengantin yang dikhususkan bagi para calon pengantin yang hendak melangsungkan pernikahan dan ini wajib diikuti oleh calon pengantin.

Adapun materi yang disampaikan kepada calon pengantin dalam penasihatn calon pengantin adalah:

- a) Hukum pernikahan;
- b) Mekanisme dan prosedur pencatatan perkawinan;
- c) Merawat cinta kasih dalam keluarga;
- d) Manajemen konflik dalam keluarga;
- e) Menciptakan keluarga sakinah;
- f) Penanaman nilai keimanan, ketaqwaan dan *akhlakul karimah* dalam keluarga;²⁰⁰

2) Program Pasca Nikah

Program ini dilakukan KUA Kecamatan Katingan Kuala melalui Kepala KUA, Penghulu dan Penyuluh Agama Islam (PAI) dengan **melakukan** wawancara dan dialog secara khusus kepada keluarga yang sedang mengalami konflik, atau terhadap keluarga pasangan yang mengalami konflik tersebut. Untuk pasangan yang sedang bermasalah maka dilakukan dialog secara khusus untuk

²⁰⁰*Ibid.* H. Anwar, S.H.I

mencari titik permasalahannya apabila yang hadir pasangan suami istri bersangkutan dan melakukan pemanggilan pasangannya apabila yang hadir ternyata hanya salah satunya saja. Terhadap keluarga pasangan bermasalah maka dikumpulkan semua yang terkait dan dicari solusinya, sehingga terhindar dari perceraian, dengan materi sebagai berikut :

- a) Kewajiban suami isteri
- b) Pendidikan anak dalam keluarga
- c) Memberikan solusi bagi pasangan yang bermasalah²⁰¹

3) Program konsultasi hukum perkawinan

Melalui program ini, pihak KUA Kecamatan Katingan Kuala melalui Kepala KUA, Penghulu, staf KUA dan Penyuluh Agama Islam melakukan atau mengadakan bimbingan terhadap masyarakat secara umum terhadap persoalan pernikahan. Misalnya, tentang prosedur pernikahan (kelengkapan berkasnya, pendaftarannya, dan yang terkait lainnya), permasalahan wali nikah, permasalahan calon pengantin, dan masyarakat umum.

4) Program sosialisasi dalam upaya pencegahan perceraian dini

KUA Kecamatan Katingan Kuala melalui Kepala KUA, Penghulu, staf KUA dan Penyuluh Agama Islam melakukan atau mengadakan kegiatan sosialisasi yang dapat meminimalisasi terjadinya perceraian dini kepada masyarakat secara umum. Kegiatan ini

²⁰¹*Ibid.* H. Anwar, S.H.I

dilakukan melalui: sosialisasi Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan pemberian materi tentang hukum-hukum perkawinan.

5) Program keluarga sakinah

Melalui program ini merupakan program nasional, Kepala KUA, penghulu, staf KUA dan Penyuluh Agama Islam melakukan atau mengadakan kegiatan pemilihan keluarga sakinah untuk tingkat kecamatan yang diadakan setiap tahunnya. Pemenangnya kemudian diikuti dalam pemilihan keluarga sakinah tingkat Kabupaten Katingan.

Selain kegiatan tersebut, ada strategi khusus yang dilakukan oleh pihak KUA Kecamatan Katingan Kuala dalam upaya pencegahan perceraian dini, yaitu:

1) Memberikan bimbingan penyuluhan langsung ke lapangan

Untuk melaksanakan program ini, Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Kuala berperan untuk menyediakan tenaga penyuluh, menjaring dan memfasilitasi. Biasanya melalui Penyuluh Agama Islam (PAI) sebagai tenaga lapangan memfasilitasinya melalui perekrutan tenaga Penyuluh Agama Non PNS (PAH). Semua Penyuluh Agama Honorer merupakan perpanjangan tangan KUA dalam melaksanakan tugas pendidikan keagamaan di masyarakat dan keluarga. Mereka biasa bertugas sebagai pengasuh majelis taklim, dai, guru TKA/TPA, guru honor dan kegiatan keagamaan lainnya.

Relevansinya dengan gerakan keluarga sakinah, bagi yang mengasuh majelis taklim maka salahsatu materi yang disajikan adalah masalah pernikahan, ibadah serta Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974. Kalaupun tidak menggunakan kitab, maka bagi mereka diminta menyelipkan materi hukum perkawinan dan strategi membentuk keluarga yang sakinah.

2) Mewajibkan pasangan calon pengantin mengikuti penasihatn catin

Bagi calon pengantin yang sudah mendaftarkan pernikahannya di KUA Kecamatan Katingan Kuala, dan telah memenuhi semua persyaratannya, termasuk pula kalau ada yang bermasalah, seperti persoalan wali nikah, maka sebelum dilaksanakan pernikahan, mereka wajib mengikuti acara penasihatn calon pengantin yang diadakan setiap hari, dari jam 08.30 Wita sampai jam 12.00 wib, bertempat di ruang balai nikah KUA Kecamatan Kecamatan Katingan Kuala.

Kepada calon pengantin dibekali tentang hukum-hukum perkawinan, tentang upaya menciptakan keluarga sakinah, tentang pemenuhan hak dan kewajiban suami istri, dan upaya mengatasi problematika rumah tangga untuk menghindari perceraian.²⁰²

Adapun materi yang diberikan pada saat pelaksanaan penasihatn adalah:

a) Hukum pernikahan

²⁰²*Ibid.* H. Anwar, S.H.I

- b) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
- c) Pendidikan agama dalam Keluarga
- d) Upaya menciptakan keluarga sakinah
- e) Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri
- f) Upaya mengatasi problematika rumah tangga
- g) Praktik tata cara pernikahan bagi calon²⁰³

2. Mengajak masyarakat untuk mengikuti program keluarga sakinah

Program keluarga sakinah merupakan program nasional. Tujuannya adalah untuk menciptakan keluarga yang “samara” yaitu sakinah, mawaddah dan warahmah. Dengan tercipta keluarga sakinah maka perceraian dini dapat dihindarkan.²⁰⁴

BP.4 KUA Kecamatan Katingan Kuala sebagai konselor atau konsultan dalam hal ini terus berupaya memberikan penasihat dan merumuskan jalan untuk membantu kearah kedamaian dan kebahagiaan keluarga, mendamaikan perselisihan, mengurangi perceraian, mencegah perceraian yang sewenang-wenang, dan membantu mewujudkan rumah tangga yang bahagia sejahtera.²⁰⁵

Pada program ini biasa baik Kepala KUA, Penghulu, staf KUA dan Penyuluh Agama Islam menyarankan para pasangan yang baru menikah untuk mengikuti program pembinaan keluarga sakinah. Saat menyarankan ini biasanya dilakukan saat calon pengantin mengikuti penasihat calon pengantin (sebelum nikah), saat

²⁰³*Ibid.* H. Anwar, S.H.I

²⁰⁴*Ibid.* H. Anwar, S.H.I

²⁰⁵*Ibid.* H. Anwar, S.H.I

mengambil buku nikah ke KUA, saat melegalisir buku nikah, saat acar pernikahan, dan acara lainnya.

b. Strategi pencegahan perceraian dini Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir

Hasil temuan penelitian lapangan yang penulis lakukan terhadap strategis pencegahan perceraian dini pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir dalam strategi melakukan pencegahan perceraian dini pada dasarnya dimulai dirintis semenjak berdirinya pada tahun 1970. Sesuai dengan tujuan dan pendirian dan kehadiran KUA, maka KUA Kecamatan Katingan Hilir saat ini kehadirannya sangat berperan terutama dalam pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk, serta pelayanan bimbingan keluarga sakinah, intinya adalah pelayanan pernikahan dan bimbingan keluarga sakinah yang berarti mencegah dan menghindarkan terjadinya perceraian dini, khususnya di wilayah Kecamatan Katingan Hilir. Karena kalau bercerai berarti tidak sakinah.

Untuk melaksanakan tugas demikian, maka semenjak berdirinya KUA Kecamatan Katingan Hilir telah berdiri badan semiresmi yang bernama BP.4. yang pada mulanya berarti Badan Penasihat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian dan semenjak tahun 1977 berubah menjadi Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan.

Dari hasil wawancara dengan kepala KUA yang wilayah kerjanya di Kecamatan Katingan Hilir Bapak Abdul Karim, S.Sos.I :

Sangat mengetahui tentang perceraian dini yaitu sejak akad nikah sampai usia perkawinan 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun kemudian terjadinya perceraian, bahwa perceraian dini tidak terlalu sering paling 1 (satu) sampai dengan 7 (tujuh) perkara perceraian dini tersebut.²⁰⁶

Adapun strategi yang dilakukan oleh kantor urusan agama Kecamatan Katingan Hilir dalam pencegahan perceraian dini adalah sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan harmonisasi hubungan suami istri.
- 2) Hubungan yang baik antara anggota keluarga dan lingkungannya.
- 3) Melaksanakan pembinaan kesejahteraan keluarga.
- 4) Membina kehidupan beragama dalam keluarga.
- 5) Memberikan nasihat penerangan dalam tuntutan tentang berkeluarga yang baik kepada yang berkepentingan, seperti calon pengantin, pasangan bermasalah, keluarga calon pengantin, keluarga pasangan bermasalah dan masyarakat umum.
- 6) Memberikan bantuan moril kepada calon pengantin, pasangan bermasalah, dan masyarakat umum dalam menyelesaikan kesulitan-kesulitan perkawinan dan kerumah-tangga secara umum.²⁰⁷

²⁰⁶Wawancara dengan Abdul Karim, S.Sos.I (Kepala KUA yang wilayah kerjanya di Kecamatan Katingan Hilir) Kamis, 29 Oktober 2017

²⁰⁷*Ibid.* Abdul Karim, S.Sos.I

Pencegahan perceraian dini pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir yang sering dilakukan sebelum (pra) pernikahan dan sesudah (pasca) pernikahan :

1) Program pembinaan pra nikah

Menyelenggarakan kursus calon pengantin KUA Kecamatan Katingan Hilir melalui Kepala KUA, melakukan atau mengadakan penataran atau lebih dikenal dengan istilah Suscatin (kursus calon pengantin) atau penasihatn calon pengantin yang dikhususkan bagi para calon pengantin yang sebelum (pra) pernikahan dan ini wajib diikuti oleh mereka. Melalui kegiatan ini apa yang diharapkan calon pengantin dapat dicapai, maka perlu adanya pengarahan dan perbekalan sebelum mereka melangsungkan pernikahan. Di KUA Kecamatan Katingan Hilir masyarakat dapat berkomunikasi tentang masalah yang berkaitan tentang perkawinan, baik pra nikah atau pasca nikah melalui kursus calon pengantin. Dengan materi sebagai berikut:

- a) Hukum munakahat (pernikahan)
- b) Mekanisme dan prosedur pencatatan perkawinan;
- c) Merawat cinta kasih dalam keluarga;
- d) Manajemen konflik dalam keluarga apabila ada masalah dalam rumah tangga di antara mereka berdua;
- e) Menciptakan keluarga sakinah mawaadah wa rahmah;

f) Penanaman nilai keimanan, ketaqwaan dan *akhlakul karimah* dalam keluarga;²⁰⁸

2) Memberikan Pembinaan Pasca Nikah

Pembinaan pasca nikah ini ditujukan pada keluarga yang berusia dibawah tiga tahun. Karena pernikahan dibawah usia tiga tahun masih rentan sekali mendapat cobaan-cobaan dalam kehidupan rumah tangganya, sehingga dirasa masih perlu mendapat pembinaan. Program ini dilakukan melalui atau mengadakan wawancara dan dialog secara husus kepada keluarga atau keluarga yang mengalami konflik. Terhadap pasangan tersebut maka dilakukan dialog secara husus untuk mencari titik permasalahannya apabila hadir pasangan suami istri bersangkutan dan melakukan pemanggilan asangannya apabila yang hadir ternyata hanya salah satunya saja. Terhadap keluarga pasangan bermasalah maka dikumpulkan semua yang terkait dari dicari solusinya, sehingga terhindar dari perceraian, dengan mater:

- a) Kewajiban suami isteri
- b) Pendidikan anak dalam keluarga
- c) Memberikan solusi bagi pasangan yang bermasalah

Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir mempunyai program khusus yang sering dilaksanakan dalam upaya pencegahan perceraian dini yaitu:

1) Program sosialisasi dalam strategi pencegahan perceraian

²⁰⁸*Ibid.* Abdul Karim, S.Sos.I

KUA Kecamatan Katingan Hilir membuat program dengan melakukan atau mengadakan kegiatan sosialisasi yang dapat mengurangi terjadinya perceraian dini kepada masyarakat secara umum. Kegiatan ini dilakukan melalui: sosialisasi Undang Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan pemberian materi tentang hukum-hukum perkawinan, dan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri untuk mencegah perceraian dini.²⁰⁹

2) Mewajibkan pasangan calon pengantin mengikuti penasihatn catin

Pihak KUA Kecamatan Katingan Hilir ketika menerima pendaftaran berkas nikah calon mempelai, baik yang didaftarkan sendiri oleh mempelai ataupun walinya, menyerahkan berkas penasihatn nikah untuk diisi mempelai dan diwajibkan pula untuk menghadiri atau mengikuti penasihatn nikah pada setiap hari, Jam 09.00 Wib sampai selesai bertempat di Balai Nikah KUA Kecamatan Katingan Hilir.

Pada saat penasihatn nikah tersebut, calon pengantin dibekali tentang hukum-hukum perkawinan, strategi menciptakan keluarga sakinah, pemenuhan hak dan kewajiban suami istri, dan upaya mengatasi problematika rumah tangga agar terhindar dari perceraian. Adapun materi yang disampaikan yaitu :

- a) Hukum munakahat (pernikahan)
- b) Mekanisme dan prosedur pencatatan perkawinan;

²⁰⁹*Ibid.* Abdul Karim, S.Sos.I

- c) Merawat cinta kasih dalam keluarga;
- d) Manajemen konflik dalam keluarga apabila ada masalah dalam rumah tangga di antara mereka berdua;
- e) Menciptakan keluarga sakinah mawaadah wa rahmah;
- f) Penanaman nilai keimanan, ketaqwaan dan *akhlakul karimah* dalam keluarga;²¹⁰

3) Mengajak masyarakat untuk mengikuti program keluarga sakinah

Biasanya keluarga yang mengalami permasalahan diberikan penasihatannya adalah mengatasi perselisihan dalam keluarga, bimbingan, nasihat, konsultasi tentang keluarga, mengatasi perceraian, tentang cerai dan rujuk, dan bagi yang akan melaksanakan pernikahan. Bagi keluarga yang bermasalah, BP.4 KUA Kecamatan Katingan Hilir menjadi mediasi dan berusaha membantu mencegah terjadinya perceraian, hanya bersifat membantu menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi oleh pasangan suami istri yang berselisih secara damai. Sedapat mungkin berusaha memediasi atau mendamaikannya agar jangan berakhir dengan perceraian di Pengadilan Agama.

KUA Kecamatan Katingan Hilir melalui BP.4 yang bertugas sebagai konselor atau konsultan dalam hal ini memberikan pasetahan dan merumuskan jalan untuk membantu kearah kedamaian dan kebahagiaan keluarga, mendamaikan perselisihan, mengurangi

²¹⁰*Ibid.* Abdul Karim, S.Sos.I

perceraian, mencegah perceraian yang sewenang-wenang, dan membantu mewujudkan rumah tangga muslim yang bahagia dan sejahtera.

Pihak KUA Kecamatan Katingan Hilir menyarankan para pasangan yang baru menikah untuk mengikuti program pembinaan keluarga sakinah. Saat menyarankan ini biasanya dilakukan saat calon pengantin mengikuti penasihatn calon pengantin (sebelum nikah), saat mengambil buku nikah ke KUA, saat melegalisir buku nikah, saat acara pernikahan, dan acara lainnya.²¹¹

c. Strategi pencegahan perceraian dini Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Tengah

Berdasarkan penelitian lapangan yang penulis lakukan terhadap peran KUA Kecamatan Katingan Tengah dalam strategi pencegahan perceraian dini pada dasarnya dimulai dirintis semenjak berdirinya pada tahun 1976.

Sesuai dengan tujuan adanya KUA, maka KUA Kecamatan Katingan Tengah saat ini kehadirannya sangat berperan terutama dalam strategi pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk, serta pelayanan bimbingan keluarga sakinah, intinya adalah pelayanan pernikahan dan bimbingan keluarga sakinah yang berarti mencegah dan menghindarkan terjadinya perceraian. Apalagi wilayah

²¹¹Ibid. Abdul Karim, S.Sos.I

Kecamatan Katingan Tengah merupakan wilayah yang heterogen penduduknya dan pemeluk agamanya.

Dari hasil wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Katingan Tengah Bapak Drs. Khairil Anwar :

Sangat mengetahui tentang perceraian dini yaitu sejak akad nikah sampai usia perkawinan 0 (nol) bulan sampai dengan 3 (tiga) tahun kemudian terjadinya perceraian, bahwa perceraian dini tidak terlalu sering paling 1 (satu) sampai dengan 7 (tujuh) perkara perceraian dini tersebut.²¹²

Adapun stretegi yang dilaksanakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Tengah dalam pencegahan perceraian dini adalah:

1. Membantu untuk mewujudkan harmonisasi hubungan suami istri.
2. Menjambatani hubungan yang baik antara anggota keluarga dan lingkungannya.
3. Melaksanakan pembinaan kesejahteraan keluarga
4. Membina kehidupan beragama dalam keluarga.
5. Memberikan nasihat dalam tuntutan kehidupan berkeluarga yang baik kepada yang berkepentingan, seperti calon pengantin, pasangan bermasalah, keluarga calon pengantin, keluarga pasangan bermasalah dan masyarakat umum.
6. Memberikan bantuan moril kepada calon pengantin, pasangan bermasalah, dan masyarakat umum dalam menyelesaikan kesulitan-kesulitan perkawinan dan kerumah-tangga secara umum.

²¹²Wawancara dengan Drs. Khairil Anwar (Kepala KUA Kecamatan Katingan Tengah) Tanggal, 14 Oktober 2017

Pencegahan perceraian dini pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Tengah yang sering dilakukan sebelum (pra) pernikahan dan sesudah (pasca) pernikahan :

1) Program pembinaan pra nikah

Menyelenggarakan kursus calon pengantin KUA Kecamatan Katingan Tengah melalui Kepala KUA, melakukan atau mengadakan pembinaan atau lebih dikenal dengan istilah Suscatin (kursus calon pengantin) atau penasihatan calon pengantin yang dikhususkan bagi para calon pengantin yang sebelum pernikahan dan ini wajib diikuti oleh mereka. Melalui kegiatan ini apa yang diharapkan calon pengantin dapat dicapai, maka perlu adanya pengarahan dan perbekalan sebelum mereka melangsungkan pernikahan. Di KUA Kecamatan Katingan Tengah masyarakat dapat berkomunikasi tentang masalah yang berkaitan tentang perkawinan, baik pranikah atau pasca nikah melalui kursus calon pengantin.²¹³ Dengan materi sebagai berikut:

- a) Hukum pernikahan dan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan serta praktik tata cara pernikahan bagi calon pengantin
- b) Pendidikan agama dalam keluarga;
- c) Upaya menciptakan keluarga sakinah;
- d) Pemenuhan hak dan kewajiban suami dan isteri;
- e) Merawat cinta dan kasih sayang dalam keluarga;

²¹³Ibid. Drs. Khairil Anwar , Tangal, 14 Oktober 2017

f) Menciptakan keluarga sakinah mawaddah wa rahmah;²¹⁴

3) Memberikan Pembinaan Pasca Nikah

Program ini dilakukan melalui atau mengadakan wawancara dan dialog secara khusus kepada keluarga atau keluarga yang mengalami konflik. Terhadap pasangan tersebut maka dilakukan dialog secara khusus untuk mencari titik permasalahannya apabila hadir pasangan suami isteri bersangkutan dan melakukan pemanggilan pasangannya apabila yang hadir ternyata hanya salah satunya saja. Terhadap keluarga pasangan bermasalah maka dikumpulkan semua yang terkait dicari solusinya, sehingga terhindar dari perceraian,²¹⁵ dengan materi yang disampaikan sebagai berikut:

- a) Hak dan Kewajiban suami isteri dalam rumah tangga
- b) Bagaimana pendidikan anak dalam keluarga
- c) Memberikan solusi bagi pasangan-pasangan yang bermasalah
- d) Penanaman nilai-nilai keimanan, ketakwaan, dan akhlakul karimah dalam keluarga.

Dari beberapa peran dan strategi yang dilakukan KUA Kecamatan Katingan Tengah, ada kontribusi khusus atau utama dan terus menerus dilakukan saat ini, yaitu:

- a) Memberikan bimbingan, penasihat, dan konsultasi keluarga bagi rumah tangga yang memiliki problematika keluarga semakin kritis. BP4 secara terbuka bersedia menjadi mediator bagi keluarga

²¹⁴Ibid. Drs. Khairil Anwar, Tanggal, 14 Oktober 2017

²¹⁵Ibid. Drs. Khairil Anwar, Tanggal, 14 Oktober 2017

yang berkonflik sebagaimana tujuan awal pendirian lembaga ini. Kini tergantung kepada masyarakatnya agar mau dan bersedia memanfaatkan secara maksimal lembaga BP4 sebelum memutuskan ke Pengadilan Agama.

- b) Pelayanan konsultasi hukum perkawinan di KUA Kecamatan Katingan Tengah dengan mengadakan bimbingan terhadap masyarakat secara umum terhadap persoalan pernikahan. Misalnya, tentang pengurusan itsbat nikah bagi yang menikah tidak tercatat, tentang prosedur pernikahan, permasalahan wali nikah, permasalahan calon pengantin, dan masyarakat umum.

Mengembangkan Pembinaan keluarga sakinah

Para pasangan suami istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga tidak selamanya berjalan lancar tanpaada rintangan, kadangkala badai menerpa, sehingga menimbulkan masalah dalam rumah tangga. Jika tidak dapat diatasi dan mengarah pada perceraian, maka untuk mengatasinya pihak KUA Kecamatan Katingan Tengah membantu mencari solusi. Salah satunya melalui program Keluarga Sakinah (KS). Program ini merupakan program unggulan KUA Kecamatan Katingan Tengah. Melalui program nasional, kepala KUA, mengadakan kegiatan pemilihan keluarga sakinah untuk tingkat Kecamatan Katingan Tengah setiap tahunnya. Pemenangnya kemudian diikuti dalam pemilihan keluarga sakinah tingkat Kabupaten Katingan.

BAB V

ANALISIS STRATEGI PENCEGAHAN PERCERAIAN DINI MENURUT TEORI SADD AZ-ZARI'AH, TEORI KEWENANGAN DAN TEORI MAQASID AL-SYARI'AH

A. Analisis Strategi Pencegahan Perceraian Dini Menurut Teori Sadd Az-Zari'ah

Sadd Az-Zari'ah merupakan suatu metode penggalian hukum Islam dengan mencegah, melarang, menutup jalan atau wasilah suatu pekerjaan yang awalnya dibolehkan karena dapat menimbulkan sesuatu yang menyebabkan terjadinya kerusakan atau sesuatu yang dilarang.

Kata *Az-Zari'ah* itu didahului dengan *Sadd* yang artinya menutup, maksudnya menutup jalan terjadinya kerusakan. Sehingga, pengertian *Sadd Az-Zari'ah* menurut para ulama ahli ushul fiqh, yaitu:

مَنْعَ كُلِّ مَا يَتَوَصَّلُ بِهِ إِلَى الشَّيْءِ الْمَمْنُوعِ الْمُشْتَمِلِ عَلَى مَفْسَدَةٍ أَوْ مُضَرَّةٍ

Mencegah segala sesuatu (perkataan maupun perbuatan) yang menyampaikan pada sesuatu yang dicegah/dilarang yang mengandung kerusakan atau bahaya.²¹⁶

Menurut Al-Syatibi, *Sadd Az-Zari'ah* ialah:

التَّوَصُّلُ بِمَا بِهِ وَ مَصْلَحَةٌ إِلَى مَفْسَدَتِهِ

Melaksanakan suatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan menuju pada suatu kerusakan (kemafsadatan)²¹⁷

Ulama' Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Syi'ah dapat menerima *sadd al-dzari'ah* dalam masalah-masalah tertentu saja dan menolaknya dalam

²¹⁶Wahbah Al-Zuhayliy, *Al-Wajiz fi Ushul Al-Fiqh*, Damaskus: Dar Al-Fiqr, 1999, h. 108

²¹⁷Andewi Suhartini, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2012, h. 156.

masalah-masalah lain. Sedangkan Imam Syafi'i menerimanya apabila dalam keadaan udzur, misalnya seorang musafir atau yang sakit dibolehkan meninggalkan sholat jum'at dan dibolehkan menggantinya dengan sholat dzuhur. Namun, sholat dzuhurnya harus dilakukan secara diam-diam, agar tidak dituduh sengaja meninggalkan sholat Jum'at.

Mengakaji secara mendalam terhadap peran Kantor Urusan Agama atau lebih sering disingkat dengan KUA yang ada di wilayah Kabupaten Katingan, dengan mengambil lokasi di KUA Kecamatan Katingan Kuala, KUA Kecamatan Katingan Hilir dan KUA Kecamatan Katingan Tengah dalam strategi pencegahan perceraian dini melalui analisis Teori *Sadd Az-Zari'ah* adalah hal yang menarik.

Dengan demikian, aplikasi metode *sadz azd-dzari'ah* tentu sangat besar pengaruhnya dalam pengembangan dan pembaharuan hukum Islam di Indonesia. Dengan ini maka akan ada upaya untuk melakukan ijtihad-ijtihad dalam konteks kekinian. Upaya ini penting karena menurut A. Qodri Azizi, bahwa pada dasarnya hukum Islam dihadirkan dalam rangka merealisasikan kemaslahatan umat manusia (*li-tahqiq mashalih al-nas*),²¹⁸

²¹⁸Tujuan *tahqiq mashalih al-nas* atau merealisasikan maslahat bagi manusia ini sesuai dengan maqashidus syari'ah. Dalam kajian ushul fiqh, kemaslahatan dibagi menjadi tiga, pertama, maslahat mu'tabarah yaitu masalah yang didasarkan untuk memudahkan menjalankan perintah-perintah Allah. Hukum Allah menurut kebanyakan fuqaha memiliki alasan khusus (illah), misalnya bagi kesejahteraan hidup, akal budi, keturunan dan harta benda, bagi pelanggaran dikenakan hukuman seperti pembalasan (qisas) untuk pembunuhan, pemotongan tangan bagi para pencuri dan seterusnya. Kedua, maslahat mulghat yaitu maslahat yang berasal dari pemikiran manusia yang berlawanan dengan nash atau konsensus. Contoh maslahat ini misalnya mengenai hak yang sama antara laki-laki dan perempuan sebagai ahli waris untuk memiliki tanah milik dan sebagai saksi di pengadilan. Ketiga, masalah mursalah adalah kegunaan umum yang tidak diatur

M. Hasbi Ash-Shiddieqy menyebutkan bahwa *Sadd Sadd Az-Zari'ah* merupakan salah satu pengecualian dalam metode penggalan hukum Islam selain *Ihtihsan*. Di mana, *Ihtihsan* merupakan pengecualian yang merupakan kebolehan dan kemudahan sementara *Sadd Az-Zari'ah* merupakan pengecualian yang merupakan pencegahan.²¹⁹

Salah satu kaidah *Sadd Az-Zari'ah* adalah:

مَا تَكُونُ وَسِيَّةً وَطَرِيقًا إِلَى شَيْءٍ مَمْنُوعٍ شَرْعًا

Sesuatu yang menjadi perantara dan jalan kepada sesuatu yang terlarang pada syara'.²²⁰

Sesungguhnya segala maksud syara' yaitu mendatangkan manfaat kepada manusia dan menolak mafsadat dari mereka, tidaklah mungkin diperoleh kecuali dengan melalui sebab-sebab yang menyampaikan kita kepadanya. Maka kita diharuskan mengerjakan sebab-sebab itu karena sebab itulah yang menyebabkan kita kepada maksud.

Dengan demikian, kita dapat menetapkan bahwa pekerjaan-pekerjaan yang menyampaikan kepada kemaslahatan, dituntut untuk mengerjakannya, dan pekerjaan-pekerjaan yang menyampaikan kita pada kerusakan dan kemafsadatan dilarang kita mengerjakannya.

Di kalangan ulama Ushul terjadi perbedaan pendapat dalam menetapkan boleh atau tidaknya menggunakan *Sadd Az-Zari'ah* sebagai dalil syara'. Sebagaimana dijelaskan M. Quraish Shihab, Ulama Malikiyah

langsung dengan kepentingan al-Syari'. Para fuqaha memberikan contoh Khalifah Abu Bakar yang menghimpun al-Qur'an, memerangi mereka yang enggan membayar zakat dan menunjuk sahabat Umar untuk menggantikannya sebagai khalifah. Lihat: Abd al-Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Kuwait: Dar al-Qalam, 1977, h. 84-86

²¹⁹M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990, h. 320.

²²⁰*Ibid.* 321

²²³M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Volume 4*, Jakarta: Lentera Hati. 2001, h. 237

ini adalah kehati-hatian dalam beramal ketika menghadapi perbenturan antara maslahat dan mafsadat. Bila maslahat dominan, maka boleh dilakukan; dan bila mafsadat yang dominan, maka harus ditinggalkan. Namun, jika sama-sama kuat, maka untuk menjaga kehati-hatian harus mengambil prinsip yang berlaku.

مَا أَذَا إِلَى الْحَرَامِ فَهُوَ حَرَامٌ

Apa yang membawa kepada yang haram maka hal tersebut juga haram hukumnya.²²⁴

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan.²²⁵

Sementara itu, ulama Zhahiriyyah, Ibnu Hazm secara mutlak menolak metode *Sadd Az-Zari'ah* ini. Hal ini dikarenakan ulama Zhahiriyyah hanya menggunakan sumber nash murni (Al-Qur'an dan As-Sunnah) dalam menetapkan suatu hukum tertentu tanpa campur tangan logika pemikiran manusia (ra'yu) seperti pada *Sadd Az-Zari'ah*. Hasil ra'yu selalu erat dengan adanya persangkaan (zhan), dan haram hukumnya menetapkan sesuatu berdasarkan persangkaan, karena menghukumi dengan persangkaan sangat dekat dengan kebohongan, dan kebohongan adalah satu bentuk kebatilan.²²⁶

Menurut penulis teori *Sadd Az-Zari'ah* adalah mendatangkan kemaslahatan menolak mudarat, mudarat yang dimaksud penulis adalah

²²⁴Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, h. 32

²²⁵Nashr Farid Muhammad Washil, dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Al-Madkhalu fi Al-Qaw'id Al-Fiqhiyyati wa Asaruha fi Al-Ahkami Al-Syar'iiyyati*, terj. *Qawaid Fiqhiyyah* penterj. Wahyu Setiawan, Jakarta: Amzah, 2009, h. 21.

²²⁶Al-Imam Muhammad Abu Zahrah, Ibnu Hazm: *Hayatuh Wa 'Asruh, Arauh Wa Fiqhuh*, Qaira: Daar Al-Fikr Al-'Arabi, tt, h. 372.

terjadinya perceraian suami isteri yang sudah melaksanakan pernikahan, sehingga dengan adanya strategi yang dilakukan kantor urusan agama kecamatan memberikan nasehat atau penerangan dan tuntunan pada yang berkepentingan, seperti calon pengantin, pasangan bermasalah, keluarga calon pengantin, keluarga pasangan bermasalah dan masyarakat umum. Baik melalui acara penasihat nikah, wawancara dan dialog umum, wawancara dan dialog khusus, dan melakukan kunjungan rumah (*home-visit*). Kemudian mengadakan upaya-upaya yang dapat memperkecil atau meminimalisasi terjadinya perceraian. Memberikan bantuan moril kepada calon pengantin, pasangan bermasalah, dan masyarakat umum dalam menyelesaikan kesulitan-kesulitan permasalahan perkawinan dan juga kerumah-tangga secara umum sehingga perceraian itu upayakan supaya tidak terjadi. Searah dengan dengan teori *Sadd Az-Zari'ah* mendatangkan kemaslahatan menolak mudarat,

Perceraian dalam hukum Islam merupakan pintu darurat. Perceraian adalah sesuatu perkara yang paling tidak disenangi oleh istri maupun suami, perceraian merupakan pintu darurat yang tidak perlu digunakan kecuali dalam keadaan terpaksa untuk mengatasi krisis. Perceraian akan berakibat merugikan, bukan saja terhadap kepada kedua belah pihak, tetapi juga mengorbankan anak-anak dan masyarakat pada umumnya. Serta mengakibatkan tidak terwujudnya keluarga sakinah. Wajar jika Nabi Muhammad Saw. melarang terjadinya talak dan sangat membecinya, kecuali jika didasari alasan yang benar, sesuai sabdanya:

أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ الطَّلَاقُ²²⁷

Artinya: Dari Ibnu Umar ra., ia berkata: Rasulullah Saw. bersabda:
Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak”.

Oleh karena itu Undang-Undang Perkawinan (UU. No.1 Tahun 1974) Pasal 39 menentukan, bahwa perceraian itu harus ada alasan tertentu, serta harus dilaksanakan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan tidak berhasil mendamaikannya.

Alasan untuk melakukan perceraian tidak mudah dan harus sesuai dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh Undang-Undang perkawinan (UU. No.1 Tahun 1974) Pasal 39, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Pasal 19 adalah dengan alasan sebagai berikut:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, penjudi, pemadat, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pada pihak yang lain dan tanpa alasan yang syah, atau karena hal lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang berat yang membahayakan pada pihak lain.

²²⁷Abi Daud, *Sunan Abi Daud, Kitab at-Thalaq, Bab Talak Sunnah*, Beirut Libanon: Dar Al-Fikr, 1994., h. 500

5. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri.
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Dengan kaidah ini segala sesuatu yang mengandung bahaya atau kerusakan harus dihindari dan dicegah.

Karena perceraian itu dilihat dari beberapa aspek *pertama* dari bentuk sesuatu perbuatan yang jika dilakukan menurut pertimbangan adalah sama kemungkinannya untuk terbawa pada yang terlarang dan yang tidak terlarang. *Kedua* di lihat dari (dampak) bahwa perceraian itu akan menimbulkan putusnya hubungan silaturrahi antara kedua belah pihak baik keluarga laki-laki maupun keluarga perempuan. *Ketiga* dilihat dari tingkat kerusakan yang ditimbulkan akibat dari perbuatan perceraian itu membawa kerusakan pasti karena perceraian suatu perbuatan yang halal tetapi dibenci oleh Allah SWT.

Penulis menginginkan teori *Sadd Az-Zari'ah* menempatkan faktor manfaat dan mafsadat sebagai pertimbangan dalam menetapkan hukum, salah satunya dalam metode *Sadd Az-Zari'ah* ini. Dasarnya untuk menggunakan metode ini adalah harus hati-hati dalam beramal ketika menghadapi perbenturan antara maslahat dan mafsadat. Antara perceraian atau rujuk. Bila maslahat dominan, maka boleh dilakukan dan bila mafsadat yang dominan, maka harus ditinggalkan. Namun, jika sama-sama kuat, maka untuk menjaga kehati-hatian harus mengambil prinsip yang berlaku.

B. Analisis Strategi Pencegahan Perceraian Dini Menurut Teori Kewenangan

Kewenangan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan dikukuhkan melalui Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk (NTCR). Undang-undang ini diakui sebagai pijakan legal bagi berdirinya KUA kecamatan. Pada mulanya, kewenangan KUA sangat luas, meliputi bukan hanya masalah Nikah Rujuk (NR) saja, melainkan juga masalah talak dan cerai. Dengan berlakunya Undang Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang diberlakukan dengan PP. No. 9 tahun 1975, maka kewenangan KUA kecamatan dikurangi oleh masalah talak cerai yang diserahkan ke Pengadilan Agama.

Kewenangan KUA sebagai lembaga pencatatan pernikahan telah dimuat dalam berbagai produk hukum di Indonesia. Dasar utamanya adalah UU. No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk:

Pasal 1:

- (1) Nikah yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut nikah, diawasi oleh pegawai Pencatat Nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau oleh pegawai yang ditunjuk olehnya. Talak dan rujuk yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut talak dan rujuk, diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah”.
- 2) Yang berhak melakukan pengawasan atas nikah dan menerima pemberitahuan tentang talak dan rujuk, hanya pegawai yang diangkat oleh Menteri Agama atau Pegawai Pencatat Nikah.²²⁸

Penegasan kewenangan KUA dalam pencatatan nikah tersebut kemudian dimuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 2

²²⁸*Ibid.* h. 206.

ayat (1) bahwa Pencatatan perkawinan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah.²²⁹

Selama ini KUA lebih dikenal masyarakat sebagai instansi yang mengurus pernikahan, baik pendaftarannya maupun menikahkan, dan tempat minta bimbingan kalau ada permasalahan suami istri, namun siapa yang bertugas sebagai pegawai yang mencatat nikah, maka berdasarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 298 Tahun 2003 Tentang Pencatatan Nikah :

Pasal 1:

- (c) Pegawai Pencatat Nikah yang selanjutnya disebut PPN adalah pegawai negeri sipil yang diangkat dalam jabatan tersebut berdasarkan undang-undang Nomor 22 tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk pada tiap KUA Kecamatan sebagai Kepala KUA Kecamatan.

Pasal 2:

- (3) PPN mempunyai tugas mengawasi dan atau mencatat nikah dan rujuk serta mendaftarkan cerai talak dan cerai gugat dibantu oleh pegawai pada KUA Kecamatan sebagaimana diatur dalam penjelasan Undang-undang Nomor 22 tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.²³⁰

Kewenangan KUA sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang untuk melakukan pencatatan pernikahan bagi warga negara Indonesia beragama Islam tersebut, dalam pelaksanaannya diperkuat lagi melalui Peraturan Menteri Agama. Salah satunya adalah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.

²²⁹*Ibid*, h. 41.

²³⁰*Ibid*. h. 334.

Pasal 2:

- (1) Pegawai Pencatat Nikah yang selanjutnya disebut PPN adalah pejabat yang melakukan pemeriksaan persyaratan, pengawasan dan pencatatan peristiwa nikah/rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat, dan melakukan bimbingan perkawinan.
- (2) PPN dijabat oleh Kepala KUA.
- (3) Kepala KUA sebagaimana pada ayat (2) menandatangani akta nikah, akta rujuk, buku nikah (kutipan akta nikah) dan/atau kutipan akta rujuk.²³¹

Selanjutnya tugas PPN diperkuat lagi dalam Peraturan Menteri Agama PMA Nomor 39 Tahun 2012:

Pasal 2:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat

- (1) KUA menyelenggarakan fungsi:

Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk;

- a. Penyusunan statistik, dokumentasi dan pengelolaan sistem informasi manajemen KUA;
- b. Pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga KUA;
- c. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah;
- d. Pelayanan bimbingan kemesjidan;
- e. Pelayanan bimbingan pembinaan syariah; dan
- f. Penyelenggaraan fungsi lain di bidang agama Islam yang ditugaskan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.²³²

²³¹Departemen Agama RI, *Pedoman Penghulu*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2012), h. 206

²³² *Ibid*, h. 218

Menurut hemat penulis dan berdasarkan teori kewenangan yang dilakukan Kantor Urusan Agama kecamatan Katingan Kuala, Katingan Hilir dan Katingan Tengah berdasarkan teori kewenangan tentang strategi pencegahan perceraian dini dengan melaksanakan dua program unggulan di antaranya program pembinaan pra nikah dan memberikan Pembinaan Pasca Nikah.

Memperhatikan lebih mendalam dan seksama terhadap kedudukan dan fungsi KUA sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor: 39 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama,²³³ sebenarnya KUA tidak menangani permasalahan perceraian secara langsung karena tidak termasuk dari tugas dan fungsinya. Hanya saja kalau dikait-kaitkan dengan sejarah perceraian ditangani langsung oleh Pengadilan Agama, secara historis perceraian dahulu memang awalnya ditangani Kementarian Agama yang dahulunya bernama Departemen Agama. Sebelum adanya Undang-undang tentang Pengadilan Agama maka perceraian ditangani oleh Pengadilan Agama dan Pencatatan Perceraianya atau Surat Cerainya dikeluarkan oleh KUA. Selain itu Pengadilan Agama sebelum masuk dalam lingkungan Mahkamah Agung (MA) berada langsung di bawah Departemen Agama pada Direktorat Jendral Bina Kelembagaan Islam (Dirjen Binbaga Islam)

Penulis mengharapkan adanya regulasi yang mengatur bahwa apabila akan mengajukan cerai gugat atau cerai talak ke Pengadilan Agama,

²³³Dapat dilihat pada buku: Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji Departemen Agama RI, *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji, 2003), cet. 3, h.10.

harus adanya rekomendasi dari Kantor Urusan Agama bahwa permasalahan perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak sudah dimediasi serta diberikan penasehatan dan bimbingan oleh kepala KUA Kecamatan. Apabila yang berperkara tidak melampirkan rekomendasi dari KUA kecamatan yang telah memberikan mediasi diharapkan Pengadilan Agama menolak perkara tersebut.

C. Analisis Strategi Pencegahan Perceraian Dini Teori Maqasid Al-Syari'ah

Maqashid al-Syari'ah adalah tujuan segala ketentuan Allah yang disyariatkan kepada umat manusia. Istilah *Maqashid al-Syari'ah* dipopulerkan oleh Abu Ishak Al-Syatibi yang tertuang dalam karyanya *Muwaffaqat* juz II sebagaimana dalam ungkapannya adalah:

هذه الشريعة وضعة لتحقيق مقاصده الشرع قيام مصالح في الدين الدنيا معا

Artinya :“Sesungguhnya syariat itu diturunkan untuk merealisasikan maksud Allah dalam mewujudkan kemashlahatan duniyah dan duniawiyah secara bersama-sama”.²³⁴

Sedangkan menurut Yusuf Qardhowi dalam bukunya “*Membumikan Syariat Islam*” dengan mengutip dari “*Mu'jam Al-Fadz al-Qur'an al-Karim*” menjelaskan bahwa kata syari'at berasal dari kata syara'a al syari'a yang berarti menerangkan atau menjelaskan sesuatu, atau juga berasal dari kata *syir'ah* dan *syari'ah* yang berarti suatu tempat yang dijadikan sarana untuk mengambil air secara langsung sehingga orang yang mengambilnya tidak memerlukan bantuan alat lain²³⁵ kesamaan syari'at dengan arti bahasa syari'ah yakni jalan menuju sumber air ini adalah dari segi bahwa siapa saja

²³⁴Al-Syatibi, al-Muafaqot Juz II.

²³⁵Yusuf Qardhowi, *Membumikan Syari'at Islam, Keluwasan aturan Illahi untuk Manusi*, (Bandung: Pustaka Mizan, 2003), Cet. ke I, h. 13

yang mengikuti *syari'ah* itu, ia akan mengalir dan bersih jiwanya. Allah menjadikan air sebagai penyebab kehidupan tumbuh-tumbuhan dan hewan sebagaimana dia menjadikan *syari'ah* sebagai penyebab kehidupan jiwa manusia.²³⁶

Sedangkan menurut Imam al-syatibi, *Maqashid al-syrai'ah* adalah tujuan-tujuan disyari'atkannya hukum oleh Allah SWT. Yang berintikan kemaslahatan umat manusia di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Setiap penyari'atan hukum oleh Allah mengandung Maqashid (tujuan-tujuan) yakni kemaslahatan bagi umat manusia.²³⁷

Menurut Al-syatibi kemaslahatan tersebut dilihat dari dua sudut pandang. Dua sudut pandang itu adalah:

- a. *Maqasid Al-Syari'* (Tujuan Tuhan)
- b. *Maqasid Al-mukalaf* (Tujuan Mukallaf)²³⁸

Menurut penulis inti dari semua kegiatan yang dilakukan ketiga KUA di kabupaten Katingan, dan di fokuskan pada KUA Kecamatan Katingan Kuala, KUA Kecamatan Katingan Hilir dan KUA Kecamatan Katingan Tengah tidak lain bertujuan agar setiap calon pengantin, pasangan suami isteri, anggota keluarga dan masyarakat dapat menjunjung tinggi nilai-nilai budi pekerti luhur dalam penampilan, pergaulan, sikap dan ucapan yang baik dalam menjalani kehidupan berkeluarga, sehingga tidak hanya terhindar dari perceraian dini tetapi juga untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah warahmah*.

²³⁶ Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), Edisi Ke I, h. 2-3

²³⁷ Asafri Jaya bakri, *Konsep Maqashid al_syari'ah menurut al-syatibi*..... h. 5 dan 167

²³⁸ Al Muafaqat, Juz II hal 5

Mengacu kepada kepentingan dan kualitas kemaslahatan, strategi pencegahan perceraian dini di Kabupaten Katingan yang dilakukan KUA berkaitan dengan lima kebutuhan pokok yang disebut dengan *al masalih al khamisah*, yaitu:

Pertama, memelihara agama, maksudnya mencegah perceraian dini berarti akan memelihara keberagamaan pasangan suami isteri dari perbuatan zina yang jelas-jelas dilarang agama.

Kedua, memelihara jiwa. Maksudnya melindungi jiwa pasangan bersangkutan agar jangan terjadi kegoncangan karena perceraian, bahkan bagi orang tertentu kadang karena sakitnya perceraian bisa menyebabkan bunuh diri atau membunuh pasangannya.

Ketiga, memelihara akal. Orang yang bercerai kadangkala berada dalam kondisi kebingunan, atau terbawa nafsu amarah sehingga akalnya hilang. Orang yang bercerai kadang-kadang pula bisa terlibat dalam minum-minuman keras dan lainnya yang memabukkan. Dengan menghindarkan terjadinya perceraian, maka kerusakan akal dapat dihindari.

Keempat, memelihara keturunan. Rumah tangga yang berakhir dengan perceraian maka akan berdampak langsung terhadap kehidupan anak-anak pasangan bersangkutan. Artinya, dengan memelihara perkawinan dan menghindari perceraian berarti memelihara keturunan pasangan bersangkutan.

Kelima, memelihara harta. Menghindari perceraian berarti sebagai upaya untuk memelihara harta. Sebab, orang yang bercerai kalau punya harta maka permasalahan harta menjadi sengketa utama. Namun terkadang harta itu juga disalahgunakan atau dihambur-hamburkan untuk kepentingan yang tidak baik.

Untuk menjaga kelima hal tersebut dan menghindari perceraian dini, maka strategi pembekalan kepada remaja usia nikah harus diberikan secara arif dan bijak. Salah satu akar penyebab perceraian yang terbesar adalah rendahnya pengetahuan dan kemampuan suami istri mengelola dan mengatasi berbagai permasalahan rumah tangga.

Segala sesuatu yang tidak sesuai dengan kelima unsur pokok di atas adalah bertentangan dengan tujuan *syara*. Oleh karena itu, kebijakan dan wewenang pemerintah untuk melakukan tindakan atas dasar kemaslahatan, meskipun tanpa dilandasi *particular (dalil juz'i)* dan hukum siasyah yang adil (*al siasyah aladillah*) adalah konsep hukum yang mengandung prinsip pokok berupa mencegah semua bentuk penganiayaan, melindungi hak rakyat, menindak pelaku kejahatan serta mewujudkan cita-cita syariat (*maqasid al syar'iyah*).

Praktik pemerintah yang mengatur tentang penasihat nikah dan pembekalan bagi calon pengantin tersebut, meminjam istilah dalam epistemologi hukum Islam adalah metode *istislah* atau *maslahat mursalat*. Hal ini karena meski secara formal tidak ada ketentuan ayat atau sunnah yang memerintahkan panasehatan nikah dan pembekalan

bagi calon pengantin tersebut, kandungan maslahatnya sejalan dengan tindakan *syara* yang ingin mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Atau dengan memperhatikan ayat yang dikutip tersebut, dapat dianalogikan (*qiyas*)²³⁹ karena ada kesamaan *illat*,²⁴⁰ yaitu dampak negatif yang ditimbulkannya.²⁴¹ Kaidah fikih menyebutkan:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Menolak kemudharatan lebih didahulukan daripada memperoleh kemaslahatan.

Tentang ukuran yang lebih konkret dari maksud kemaslahatan ini, dijelaskan oleh Imam Al-Syatibi dalam kitab *al muwafaqah* dan ulama seperti Abu Zahrah dan Abdul Wahab Khalaf. Apabila disimpulkan, maka persyaratan kemaslahatan yang mereka tetapkan adalah:

- a. Kemaslahatan itu harus sesuai dengan *maqashid al-syariah*, semangat ajarannya, dalil-dalil *kulli* dan *qath'i* baik *wurud* maupun terhadap *dalalah*-nya.
- b. Kemaslahatan itu harus meyakinkan, artinya kemaslahatan itu berdasarkan penelitian yang telah dilakukan cermat dan akurat, sehingga tidak meragukan bahwa itu bisa mendatangkan manfaat dan menghindarkan *mudarat*.

²³⁹*Qiyas* secara istilah menurut ahli fiqih adalah menyamakan suatu perkara yang belum ada hukumnya dengan hukum perkara lain yang sudah ditetapkan oleh nash.

²⁴⁰*Illat* menurut Ahmah Hasan memiliki empat pengertian, yaitu 1) sesuatu yang mempengaruhi hukum dengan sendirinya, 2) sesuatu yang menandakan hukum, 3) sesuatu yang menjadikan hukum wajib bukan dengan sendirinya tetapi berdasarkan otoritas tuhan, 4) sesuatu yang memotivasi pemberian hukum untuk memberikan hukum. Lihat Ahmad Hasan, *Qiyas*, h. 205

²⁴¹Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 112.

- c. Kemaslahatan itu membawa kemudahan dan bukan mendatangkan kesulitan yang diluar batas, dalam arti kemaslahatan itu bisa dilaksanakan.
- d. Kemaslahatan itu memberi manfaat kepada sebagian besar masyarakat bukan kepada sebagian kecil masyarakat.²⁴²

Dengan demikian, persoalan penasihatn nikah dan pembekalan bagi calon pengantin tersebut, sangat jelas mendatangkan masalahat bagi tegaknya rumah tangga.

Kalau peraturan yang dibuat pemerintah tersebut untuk kepentingan atas dasar kemaslahatan yang ada dalam konteks kenegaraan, sebenarnya tidak jauh berbeda dengan perbandingan kepentingan *maslahat* individu. Dimana aspek yang harus dikedepankan dan diberikan prioritas adalah sama. Dalam syariat Islam kepentingan manusia dalam tatanan *maslahat* diberikan legitimasi sebagai salah satu misi syari'at, dimana dalam standar penetapannya bermuara pada syariat bukan dari inisiatif pribadi.

Dari strategi pencegahan perceraian dini yang dilakukan KUA Kecamatan Katingan Kuala, KUA Kecamatan Katingan Hilir, KUA Kecamatan Katingan Tengah, menurut penulis ada tiga strategi diaplikasikan kepada masyarakat sesuai dengan teori *Maqashid al-Syari'ah*, yaitu dengan cara:

²⁴²Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 112.

- a. Memberikan nasihat dan penerangan mengenai nikah, talaq, cerai dan rujuk kepada yang akan melakukannya baik perseorangan maupun kelompok.
- b. Mencegah terjadinya perceraian dini (cerai talaq atau cerai gugat) sewenang-wenang, poligami yang tidak bertanggung jawab, dan perkawinan di bawah umur serta perkawinan di bawah tangan.
- c. Memberikan bantuan dalam mengatasi permasalahan perkawinan keluarga dan perselisihan rumah tangga, menurunkan terjadinya perselisihan serta perceraian, poligami yang tidak bertanggung jawab, pernikahan di bawah umur, dan pernikahan tidak tercatat.

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis tentang strategi pencegahan perceraian dini pada kantor urusan agama se kabupaten Katingan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Terjadinya perceraian dini pada kantor urusan agama se kabupaten disebabkan suami selingkuh, pemabuk, tidak mau mencari nafkah, ada campur tangan kedua orang terhadap anaknya yang sudah menikah, dan pindah agama (murtad), adanya putusan Pengadilan Negeri terhadap suami dengan vonis diatas 5 (lima) tahun penjara, belum dewasanya pola berpikir dalam keluarga dan isteri tidak melaksanakan kewajibannya sehingga hubungan suami isteri tidak lagi harmonis
2. Adapun strategi yang dilakukan oleh kantor urusan agama se kabupaten katingan tentang pencegahan perceraian dini dengan melaksanakan penasihat pra pernikahan, pasca pernikahan serta melaksanakan program Badan Penasihat Pelestarian dan Pembinaan Perkawainan (BP4) kepada kedua mempelai, sehingga tercapai keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* untuk calon mempelai pria dan wanita serta memberikan solusi bagi rumah tangga yang bermasalah, sehingga dapat membina rumah tangga yang benar sesuai dengan syari'at hukum islam yang berlaku. Sehingga dapat membantu mengurangi angka perceraian dini.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka penulis memberikan rekomendasi terkait hal tersebut sebagai berikut :

1. Perlunya regulasi yang mengatur bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) mempunyai hak dan wewenang untuk memberikan penasihatn perkawinan bagi keluarga yang bermasalah, serta pihak Pengadilan Agama tidak menerima perkara perceraian dari masyarakat sebelum adanya mediasi atau penasihatn dari Kantor Urusan Agama setempat yang dibuktikan surat keterangan dari Kantor Urusan Agama yang melaksanakan penasihatn.
2. Perlunya adanya penelitian lanjutan terhadap permasalahan yang belum dapat dijawab dalam penelitian ini, yakni permasalahan yang membahas lebih spesifik tentang rumasan strategi pencegahan perceraian dini pada masyarakat.